

**PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN
DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN
SETELAH PEMEKARAN**

T E S I S

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**ALKODRA HUZAIN
L4D006055**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN
DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN
SETELAH PEMEKARAN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

ALKODRA HUZAIN
L4D 006 055

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 25 Juni 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 25 Juni 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

M. Mukti Alie, SE, MSi, MT

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syachbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (*plagiat*) dari Tesis orang lain/institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 25 Juni 2008

ALKODRA HUZAIN
NIM L4D 006 055



“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Faatihah ayat : 1-3)

Lembar demi lembar kertas putih tertulis

*Mengajak dan mengetuk segala hati dan perasaan
Ketika badai kebosanan mulai datang, mulai mengoyak,
Meruntuhkan semangat, saat itu pula kita berdo'a kepada Allah Swt,
Dan minta do'a kan kepada orang tua kita,
Hingga kini tiba saatnya yang kita tunggu,
Yang kita harapkan akhirnya tercapai juga.*



*“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu,
jika kamu tidak mengetahui “. (Q.S. Al-Anbiyaa ayat : 7)*

Tesis ini kupersembahkan untuk:

*Ayah Bundaku, H.Hupi
Ayah Bunda Mertuaku, Dahlan Ston*

*Keluargaku yang tercinta:
Istriku Susiyanti Ratnadewi, SE serta Anak-
anakku Muhammad Almatin Jahfal dan
Najmi Mumtaz yang menanti dengan penuh
kesabaran saat ku menempuh studi di
Universitas Diponegoro Semarang.*



ABSTRAK

Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah isu pemekaran wilayah menjadi tren dalam menangani permasalahan sosial penduduk dan persoalan pembangunan. Kewenangan daerah otonom untuk melakukan pembangunan serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Lahat. Pemerintah melakukan pemekaran wilayah yang terjadi pada tahun 2001 dengan dibentuknya Kota Otonom Pagar Alam. Pemekaran wilayah tersebut dirasakan lebih efektif untuk mempercepat pembangunan guna meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat.

Kabupaten Lahat melakukan pemekaran juga pada tingkat kecamatan guna mempercepat dan pemeratakan pembangunan daerah di Kabupaten Lahat. Jumlah kecamatan yang semula 11 wilayah sekarang mekar menjadi 19 kecamatan. Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Lahat yang hampir 80% bekerja pada sektor primer mencerminkan perekonomian Kabupaten Lahat berbasis pada sektor pertanian, sehingga produktivitas wilayah mempunyai peranan yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi wilayah kinerja kecamatan di Kabupaten Lahat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran, dengan sasaran meneliti dan mengidentifikasi aspek ekonomi, sosial penduduk dan infrastruktur sebagai fungsi layanan publik dan untuk meneliti perkembangan yang terjadi dalam tahun 1993 hingga 2004. pengolahan data menggunakan metode skoring untuk mengetahui tingkat perkembangan yang terjadi pada setiap wilayah kinerja kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kecamatan hasil pemekaran cenderung menurun, sedangkan peningkatan perekonomian yang terjadi tidak sebanding dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat diketahui dari menurunnya persentase kelompok konsumsi rumah tangga yang bergeser pada kelompok konsumsi rendah. Jika dilihat dari tingkat pelayanan publiknya secara kuantitas semakin meningkat. Hal ini merupakan akumulasi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya.

Rekomendasi terhadap persoalan sosial yang terjadi adalah dengan memperhatikan peluang infrastruktur yang meningkat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari segi pendidikan dan kesehatan, serta membangun fasilitas perdagangan berupa bangunan pasar permanen. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat terwadahi, sehingga hasil produksi wilayah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan.

Kata Kunci : *Produktivitas, Tingkat Pelayanan, Kesejahteraan*

ABSTRACT

In line with decentralization and local autonomy, the regional spin-offs issues becomes a trend in overcoming social and development problem. The authority of autonomous area and utilize existing resources improve local community welfare and optimize development in Lahat Regency, The government perform regional spin-offs in 2001 with the establishment of Pagar Alam autonomy city, the regional spin-off becomes effective to accelerate development to improve community social life.

The Government of Lahat Regency perform regional spin-off also in district level utilize to accelerate and distribute local development in Lahat Regency, in earlier distrik numbers are 11 and its become 19 district, The economic structure of Lahat Regency community which almost 80% employing in the primary sector it express that Lahat Regency economy based by agriculture sector, so that area productivity has an important role to improve economy of district performance area in Lahat Regency.

This Research aim to identify distrik area in Lahat Regency before and after regional spin-off performed, with the objective is study and identifies economic aspect, social-community and its infrastructure as public service function, it used to observe developments which occurs in 1993 to 2004, data processing with Scoring method to identify the development level which occur in each district performance area that exist in Lahat Regency.

The result of this research show that community welfare after spin-off tend to decrease, while, economy improvement that happens are not equal with household consumption. The percentage of household consumption group was displace to low consumption group, and seem from by public service level in quantity, it becomes increase, then, it becomes budget allocation accumulation for infrastructure development, annually.

Recommendation based on existing social problems are by considering the increasing of infrastructure chance, that can be done through improving the service quality from education and healthy aspect and developing trade facilities such as permanent market, so that economic activities and regional production result it can optimize improving the district community economy.

Keyword: Productivity, Level of service, Welfare.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis mohonkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan tesis ini diberi judul “**Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat Sebelum dan Setelah Pemekaran**”.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, baik bantuan yang berupa bimbingan teknis, moril maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syachbana. MSc, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh civitas akademika.
2. Bapak Dr. Ir. Nana Rukmana D Wirapradja, MA, selaku Kepala PUSBIKTEK Departemen Pekerjaan Umum.
3. Bapak Bupati Lahat Drs. H. Harunata, Dipl. HF. MM. yang telah memberikan dukungan dalam tugas belajar pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro.
4. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang tak ternilai dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak M. Mukti Alie, SE, MSi, MT selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan segala kesabarannya, sejak awal sampai selesai penulisan tesis ini.
6. Bapak Samsul Maarif, SP, MT, dan Bapak PM. Broto Sunaryo, MSP selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, kritikan, dan koreksi untuk kesempurnaan tulisan ini.
7. Bapak Ir. Djoko Sugiono, M.Eng.Sc, selaku Kepala Balai Peningkatan Keahlian Pengembangan Wilayah dan Teknik Konstruksi Departemen PU – UNDIP beserta seluruh staf.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
9. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran untuk studi lanjutan dari penulisan ini merupakan hal yang sangat diharapkan guna memperoleh hasil yang lebih baik dikemudian hari.

Akhir kata, semoga itikad baik dan bantuan semua pihak, akan mendapat pahala yang lebih baik atas amal kebajikannya. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan terkait dengan topik tulisan ini.

Semarang, 25 Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Permasalahan..... | 5 |
| 1.3. Tujuan | 5 |
| 1.4. Sasaran..... | 6 |
| 1.5. Ruang Lingkup Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Lingkup Substansial..... | 7 |
| 1.4.2 Lingkup Wilayah | 7 |
| 1.6. Kerangka Pikir Penelitian..... | 8 |
| 1.7. Metode Penelitian | 10 |
| 1.7.1 Data..... | 10 |
| 1.7.1.1 Jenis Data | 10 |
| 1.7.1.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 12 |
| 1.7.1.3 Teknik Pengolahan Data..... | 12 |
| 1.7.1.4 Teknik Penyajian | 13 |
| 1.7.2 Kerangka Analisis | 13 |
| 1.7.2.1 Proses Analisis..... | 15 |
| 1.7.2.2 Tahapan Analisis..... | 15 |
| 1.7.3 Teknik Analisis | 16 |
| 1.7.3.1 Analisis Skoring | 17 |
| 1.7.3.2 Analisis Komparasi | 22 |
| | |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERKEMBANGAN WILAYAH | |
| 2.1. Aspek Ekonomi..... | 28 |
| 2.1.1 Ekonomi Makro dalam Perkembangan Wilayah | 29 |
| 2.1.2 Ekonomi Mikro dalam Perkembangan Wilayah..... | 30 |
| 2.2. Aspek Sosial, Penduduk | 30 |
| 2.2.1 Pendidikan | 32 |
| 2.2.2 Kesehatan | 33 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 2.3. Aspek Infrastruktur..... | 33 |
| 2.3.1 Belanja Publik..... | 35 |
| 2.3.2 Teknologi | 36 |
| 2.4. Kelembagaan..... | 37 |
| 2.5. Variabel Penelitian | 38 |

BAB III WILAYAH KABUPATEN LAHAT

| | |
|---|----|
| 3.1. Kondisi Geografis | 41 |
| 3.2 Topografi | 44 |
| 3.3 Keadaan Iklim | 44 |
| 3.4 Demografi | 45 |
| 3.5 Sosial Budaya | 46 |
| 3.5.1. Pendidikan..... | 46 |
| 3.5.2. Agama | 47 |
| 3.5.3. Kesehatan..... | 47 |
| 3.5.4. Kepariwisataaan | 49 |
| 3.5.5. Angkatan Kerja..... | 51 |
| 3.6 Pertanian | 52 |
| 3.7 Industri, Pertambangan, Listrik dan Air Bersih..... | 55 |
| 3.8 Perdagangan..... | 56 |
| 3.9 Perhubungan dan Komunikasi | 57 |
| 3.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... | 58 |
| 3.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... | 61 |
| 3.12 Pendapatan Perkapita..... | 61 |

BAB IV. ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

| | |
|--|-----|
| 4.1 Analisis Perkembangan Ekonomi | 66 |
| 4.1.1 Analisis Struktur Ekonomi | 67 |
| 4.1.2 Analisis Produktivitas Ekonomi Kecamatan | 69 |
| 4.1.3 Tingkat Konsumsi Keluarga di Kecamatan | 87 |
| 4.1.4. Belanja Publik | 90 |
| 4.2 Analisis Sosial Penduduk | 92 |
| 4.2.1 Kondisi Pendidikan | 93 |
| 4.2.2 Kondisi Kesehatan | 94 |
| 4.2.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk | 95 |
| 4.3 Analisis Infrastruktur Wilayah | 107 |
| 4.3.1 Transportasi | 107 |
| 4.3.1 Fasilitas Sosial | 108 |
| 4.4 Temuan Penelitian | 113 |
| 4.4.1 Utama | 113 |
| 4.4.2 Implikasi..... | 114 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan | 122 |
| 5.2 Rekomendasi | 123 |

| | |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |
| LAMPIRAN | 129 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|----|
| TABEL I.1 | Sasaran-Sasaran yang ditetapkan dalam Perkembangan Wilayah | 6 |
| TABEL I.2 | Kecamatan Sebelum dan Setelah Pemekaran..... | 7 |
| TABEL I.3 | Kebutuhan Data Penelitian | 11 |
| TABEL I.4 | Pemberian Bobot/ Nilai Setiap Variabel Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Lahat | 19 |
| TABEL I.5 | Kelas Hasil Skoring..... | 20 |
| TABEL I.6 | Pemberian Bobot/ Nilai Setiap Variabel Kondisi Sosial Penduduk Kecamatan di Kabupaten Lahat | 21 |
| TABEL I.7 | Pemberian Bobot/ Nilai Setiap Variabel Infrastruktur Kecamatan di Kabupaten Lahat | 22 |
| TABEL II.1 | Variabel Penelitian | 39 |
| TABEL II.2 | Pendekatan Tiga Pilar Perkembangan Wilayah..... | 40 |
| TABEL III.1 | Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Lahat..... | 43 |
| TABEL III.2 | Kabupaten Lahat Menurut Ketinggian di Atas Permukaan Laut..... | 44 |
| TABEL III.3 | Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lahat Tahun 2003..... | 45 |
| TABEL III.4 | Kondisi Pendidikan di Kabupaten Lahat..... | 47 |
| TABEL III.5 | Rasio Tenaga Kesehatan..... | 48 |
| TABEL III.6 | Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Lahat | 49 |
| TABEL III.7 | Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Lahat Tahun 2004..... | 51 |
| TABEL III.8 | Panjang Jalan Menurut Lapisan Permukaan | 57 |
| TABEL III.9 | Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Kabupaten Lahat Tahun 1999-2002..... | 60 |
| TABEL III.10 | Pertumbuhan PDRB Perbidang Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1999-2002..... | 62 |
| TABEL IV.1 | Persentase Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan..... | 68 |
| TABEL IV.2 | Kelas Hasil Skoring | 79 |

| | | |
|------------|--|-----|
| TABELIV.3 | Hasil Skoring Perkembangan Ekonomi..... | 79 |
| TABELIV.4 | Aspek Ekonomi..... | 83 |
| TABELIV.5 | Persentase Rumah Tangga Menurut Pengeluaran Perbulan.... | 88 |
| TABELIV.6 | Hasil Skoring Perkembangan Sosial Penduduk..... | 100 |
| TABELIV.7 | Komparasi Perkembangan Aspek Sosial Penduduk | 103 |
| TABELIV.8 | Hasil Skoring Perkembangan Tingkat Pelayanan..... | 110 |
| TABELIV.9 | Komparasi Skoring Variabel Perkembangan Wilayah Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Lahat | 116 |
| TABELIV.10 | Kondisi Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Lahat Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Lahat | 118 |
| TABELIV.11 | Sintesis Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 120 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| GAMBAR 1.1 | Peta Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Lahat..... | 8 |
| GAMBAR 1.2 | Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| GAMBAR 1.3 | Kerangka Analisis | 14 |
| GAMBAR 1.4 | Skala Linker Perkembangan Wilayah | 23 |
| GAMBAR 2.1 | Grafik Model Pertumbuhan Keynes..... | 26 |
| GAMBAR 2.2 | Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Alam yang Harmoni | 35 |
| GAMBAR 3.1 | Lokasi Pariwisata di Kabupaten Lahat..... | 49 |
| GAMBAR 3.2 | Komoditas di Kabupaten Lahat..... | 52 |
| GAMBAR 3.3 | Galian C di Sungai Lematang..... | 55 |
| GAMBAR 3.4 | Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lahat | 60 |
| GAMBAR 3.5 | Peta Perkembangan Wilayah Kecamatan | 65 |
| GAMBAR 4.1 | Grafik Produksi Beras Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 71 |
| GAMBAR 4.2 | Grafik Produksi Kopi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 73 |
| GAMBAR 4.3 | Grafik Perkembangan Ternak Besar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 75 |
| GAMBAR 4.4 | Grafik Perkembangan Produksi Ikan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 77 |
| GAMBAR 4.5 | Diagram Perkembangan Ekonomi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 80 |
| GAMBAR 4.6 | Sumber Perekonomian Kecamatan di Kabupaten Lahat | 82 |
| GAMBAR 4.7 | Peta Perkembangan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Lahat | 86 |
| GAMBAR 4.8 | Grafik Perkembangan Alokasi Anggaran | 91 |

| | |
|--|-----|
| GAMBAR 4.9 Grafik Perkembangan Jumlah Siswa SLTP di Kecamatan Kabupaten Lahat | 93 |
| GAMBAR 4.10 Grafik Perkembangan Jumlah Dokter di Kecamatan Kabupaten Lahat | 94 |
| GAMBAR 4.11 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Kabupaten Lahat | 96 |
| GAMBAR 4.12 Grafik Perkembangan Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Kabupaten Lahat | 98 |
| GAMBAR 4.13 Diagram Kondisi Perkembangan Sosial Penduduk Kecamatan Kabupaten Lahat | 101 |
| GAMBAR 4.14 Kondisi Perkembangan Sosial Penduduk Kecamatan Kabupaten Lahat | 102 |
| GAMBAR 4.15 Peta Perkembangan Sosial Penduduk Kecamatan Kabupaten Lahat | 106 |
| GAMBAR 4.16 Kondisi Perkembangan Transportasi Kecamatan di Kabupaten Lahat | 108 |
| GAMBAR 4.17 Diagram Perkembangan Tingkat Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Lahat | 106 |
| GAMBAR 4.18 Profil Perkembangan Infrastruktur di Kecamatan Lahat Dan Kec. Pulau Pinang | 112 |
| GAMBAR 4.19 Peta Sintesis Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat | 121 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| LAMPIRAN A: Hasil Analisis Scoring | |
| Tabel A.1 : Penilaian Skoring Ekonomi Kecamatan | 129 |
| Tabel A.2 : Perhitungan Skoring Ekonomi Kecamatan | 130 |
| Tabel A.3 : Hasil Skoring Ekonomi Kecamatan | 131 |
| Tabel A.4 : Penilaian Skoring Sosial Penduduk | 132 |
| Tabel A.5 : Perhitungan Skoring Sosial Penduduk | 133 |
| Tabel A.6 : Hasil Skoring Sosial Penduduk | 134 |
| Tabel A.7 : Penilaian Skoring Tingkat Pelayann Infrastrktur | 135 |
| Tabel A.8 : Perhitungan Skoring Tingkat Pelayanan Infrastuktur..... | 136 |
| Tabel A.9 : Hasil Skoring Tingkat Pelayanan Infrastruktur | 137 |
| | |
| LAMPIRAN B: Kondisi Perkembangan Infrastruktur | |
| Tabel B.1 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 1993 | 138 |
| Tabel B.2 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 1994 | 140 |
| Tabel B.3 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 1995 | 142 |
| Tabel B.4 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 1996 | 144 |
| Tabel B.5 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 2000 | 146 |
| Tabel B.6 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 2001 | 148 |
| Tabel B.7 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 2002 | 150 |
| Tabel B.8 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 2003 | 152 |
| Tabel B.9 : Infrastruktur Kecamatan Tahun 2004 | 154 |
| | |
| LAMPIRAN C : Produksi Komuditi Utama Kecamatan | 156 |
| LAMPIRAN D : Perkembangan Jumlah Penduduk Pertahun | 160 |
| LAMPIRAN E : Distribusi Penduduk Setiap Kecamatan | 161 |
| LAMPIRAN F : Jumlah KK Perkecamatan | 164 |
| LAMPIRAN G : Jumlah Pelajar Jenjang SLTP Pertahun Perkecamatan ... | 165 |

| | |
|---|-----|
| LAMPIRAN H : Jumlah Penduduk Prasejahtera Pertahun Perkecamatan ... | 168 |
| LAMPIRAN I : Jumlah Tenaga Dokter Perkecamatan Pertahun | 172 |
| LAMPIRAN J : Kepadatan Penduduk Perkecamatan Pertahun..... | 175 |
| LAMPIRAN K : Alokasi Anggaran Kabupaten Pertahun | 177 |
| LAMPIRAN L : Perhitungan Scoring Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Lahat..... | 178 |
| LAMPIRAN M : Komparasi Hasil Scoring Perkembangan Kecamatan Sebelum dan Setelah Pemekaran..... | 179 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi dan otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan telah diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004, yang merupakan payung hukum bagi daerah otonom. Desentralisasi dalam wujudnya sebagai otonomi daerah, memberikan sebagian kewenangan pengelolaan urusan publik untuk dilimpahkan pada provinsi dan kabupaten (Dwiyanto ed, 2005: 45), termasuk pemekaran wilayah dalam usaha mempercepat pembangunan dan perkembangan wilayah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (UU No.32, 2004).

Adanya aspirasi masyarakat yang memiliki visi terhadap kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Lahat untuk dimekarkan wilayah guna meningkatkan perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang kaya, serta akses jalan yang strategis berupa jalur lintas Sumatera, yang merupakan jalur perekonomian bagi Pulau Sumatera.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mendorong masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai kesejahteraan. Dalam realita kehidupan banyak terdapat kesenjangan ekonomi antara pusat pemerintahan dengan daerah yang relatif jauh dan terpencil. Minimnya pelayanan pemerintah serta kurangnya sarana dan prasarana wilayah menyebabkan rendahnya produktivitas perekonomian masyarakat. Jauhnya rentang kendali pemerintahan terhadap daerah-daerah desa layanannya juga menyebabkan lambatnya perkembangan tingkat perekonomian masyarakat desa tersebut.

Kecamatan di Kabupaten Lahat awalnya terdiri dari 12 Kecamatan dengan luas wilayah 7251,93 km² atau 725,193 Ha yang terdiri dari: Lahat, Merapi, Kikim, Tebing Tinggi, Pulau Pinang, Kota Agung, Pagar Alam, Tanjung Sakti, Jarai, Muara Pinang, Pendopo, Ulu Musi, dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 1990 sebanyak 601.323 jiwa. Dalam perkembangannya, yaitu pada tahun 1994 Kabupaten Lahat terdiri dari 15 Kecamatan, dengan jumlah penduduk 633.318 jiwa dengan angkatan kerja sebesar 354.483 jiwa, dan angka pencari kerja 1.686 jiwa.

Adanya isu pemekaran wilayah yang berkembang akhir-akhir ini mendorong Kabupaten Lahat untuk memekarkan wilayahnya. Hal tersebut terjadi

pada tanggal 21 Juni 2001, dengan disahkannya Undang-undang no.8 tahun 2001 mengenai pembentukan Pagar Alam menjadi Kota otonom. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2007, juga terbentuk kabupaten baru hasil pemekaran wilayah, yaitu Kabupaten Empat Lawang. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat secara menyeluruh, yang meliputi: pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dengan adanya pemekaran wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Lahat terdiri atas 19 kecamatan.

Realita perkembangan wilayah di Kabupaten Lahat berdasarkan data empiris menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja sebesar 12.795 jiwa, dengan jumlah penduduk 541.894 jiwa pada tahun 2004, serta tingkat pertumbuhan 1,16% pertahun. Kabupaten Lahat memiliki potensi wisata alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, prasarana jalan dan jaringan pengairan kabupaten yang kurang terpelihara, serta masih banyaknya keluarga prasejahtera, dimana berjumlah 31.362 keluarga atau sebesar 19,5 % dari total keluarga pada tahun 2004. Hal ini merupakan dampak penambahan penduduk, inflasi dan lapangan kerja yang terbatas (BPS Kabupaten Lahat, 2004).

Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, suatu daerah dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki guna pembiayaan daerah serta mengaktifkan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat dikembangkan sebagai sektor ekonomi basis dan ekonomi unggulan yang memiliki daya saing dalam persaingan ekonomi global.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Supriyanto, 2006) mengungkapkan bahwa pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, (Wijaya, 2006), pemekaran daerah seharusnya sebaliknya. Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, dimana terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah lama dan baru, sehingga kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara. Penelitian dilakukan dengan cara menghitung *trend* struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2002-2004, untuk kemudian dibandingkan dengan trend struktur perekonomian 4 provinsi. Besaran miring ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan perkapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka ekonomi di 4 provinsi baru cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Hal tersebut disebabkan setelah pemekaran, kerjasama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar, padahal sisi lain geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi. Demikian juga halnya dengan kondisi ketenagakerjaan, dimana setelah pemekaran yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa, dimana provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Supriyanto, 2006).

Mengacu pada uraian di atas perlu diketahui bagaimana perkembangan Kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Daerah pemekaran dituntut untuk mampu merintis dan mengembangkan kemampuan untuk membangun dengan melakukan langkah-langkah terobosan, “Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah kemampuan untuk mendanai dan mengelola keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/ kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan dari daerah induk dan provinsi, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah induk dan provinsi,” (Amzulian).

1.2. Perumusan Masalah.

Pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat akan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, dan seiring dengan berbagai upaya daerah otonom untuk meningkatkan perkembangan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan pertanyaan penelitian: *“Bagaimana Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat setelah Pemekaran bila Dibandingkan dengan Sebelum Pemekaran ?”*.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan wilayah di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran wilayah, serta mendeskripsikan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lahat dalam unit kecamatan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran–sasaran yang ditetapkan, yaitu meneliti dan mengidentifikasi aspek-aspek dominan yang mempengaruhi perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran wilayah:

1. Mengidentifikasi aspek sosial penduduk wilayah Kabupaten Lahat yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah.
2. Mengidentifikasi aspek ekonomi yang berperan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Lahat.
3. Mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur wilayah sebagai fasilitas pelayanan dasar yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat.

TABEL.I.1
SASARAN-SASARAN YANG DITETAPKAN
DALAM PERKEMBANGAN WILAYAH

| No. | ASPEK KAJIAN | SASARAN PENELITIAN |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Ekonomi | - Struktur Ekonomi - Produktivitas - Konsumsi Keluarga Belanja Publik. |
| 2. | Sosial Penduduk | - Pendidikan - Kesehatan - Kesejahteraan |
| 3. | Infrastruktur | - Sarana Pendidikan dan Kesehatan - Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman - Sarana Perdagangan, Sarana Ibadah - Penerangan, Transportasi dan Telekomunikasi |

Sumber: Hasil Analisis, 2007

1.5 Ruang Lingkup

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas dibatasi pada ruang lingkup materi atau substansial dan ruang lingkup wilayah.

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial dibatasi pada pembahasan mengenai aspek-aspek sebelum dan setelah pemekaran wilayah sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai aspek sosial, penduduk wilayah Kabupaten Lahat.
2. Pembahasan mengenai aspek ekonomi wilayah Kabupaten Lahat.
3. Pembahasan mengenai infrastruktur wilayah Kabupaten Lahat.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah kajian:

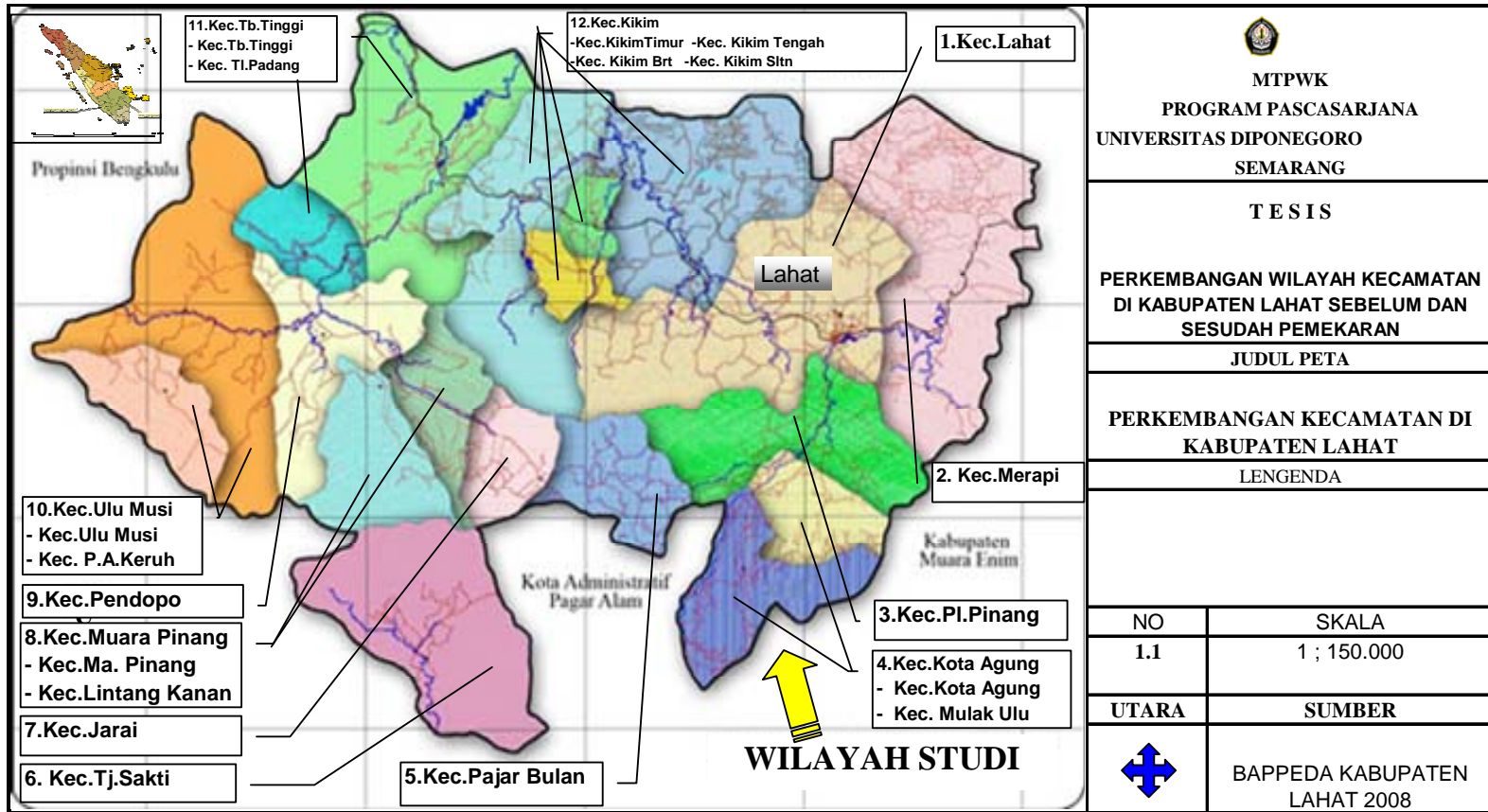
- a. Wilayah Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran, sesuai Tabel I.2

TABEL I.2
KECAMATAN SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

| Kode | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| K.1 | Kec.Tanjung Sakti | 1. Kec.Tanjung Sakti |
| K.2 | Kec.Kota Agung | 2. Kec.Kota Agung |
| K.3 | Kec.Pulau Pinang | 3. Kec.Mulak Ulu |
| K.4 | Kec.Jarai | 4. Kec.Pulau Pinang |
| K.5 | Kec.Muara Pinang | 5. Kec.Jarai |
| K.6 | Kec.Pendopo | 6. Kec. Pajar Bulan |
| K.7 | Kec.Ulu Musi | 7. Kec.Muara Pinang |
| K.8 | Kec.Tebing Tinggi | 8. Kec.Lintang Kanan |
| K.9 | Kec.Kikim | 9. Kec.Pendopo |
| | | 10. Kec.Ulu Musi |
| | | 11. Kec.Pasemah Air Keruh |
| | | 12. Kec.Tebing Tinggi |
| | | 13. Kec.Talang Padang |
| | | 14. Kec.Kikim Timur |
| | | 15. Kec.Kikim Tengah |
| | | 16. Kec.Kikim Barat |
| | | 17. Kec.Kikim Selatan |
| K.10 | Kec.Lahat | 18. Kec.Lahat |
| K.11 | Kec.Merapi | 19. Kec.Merapi. |

Sumber: Analisis, 2007

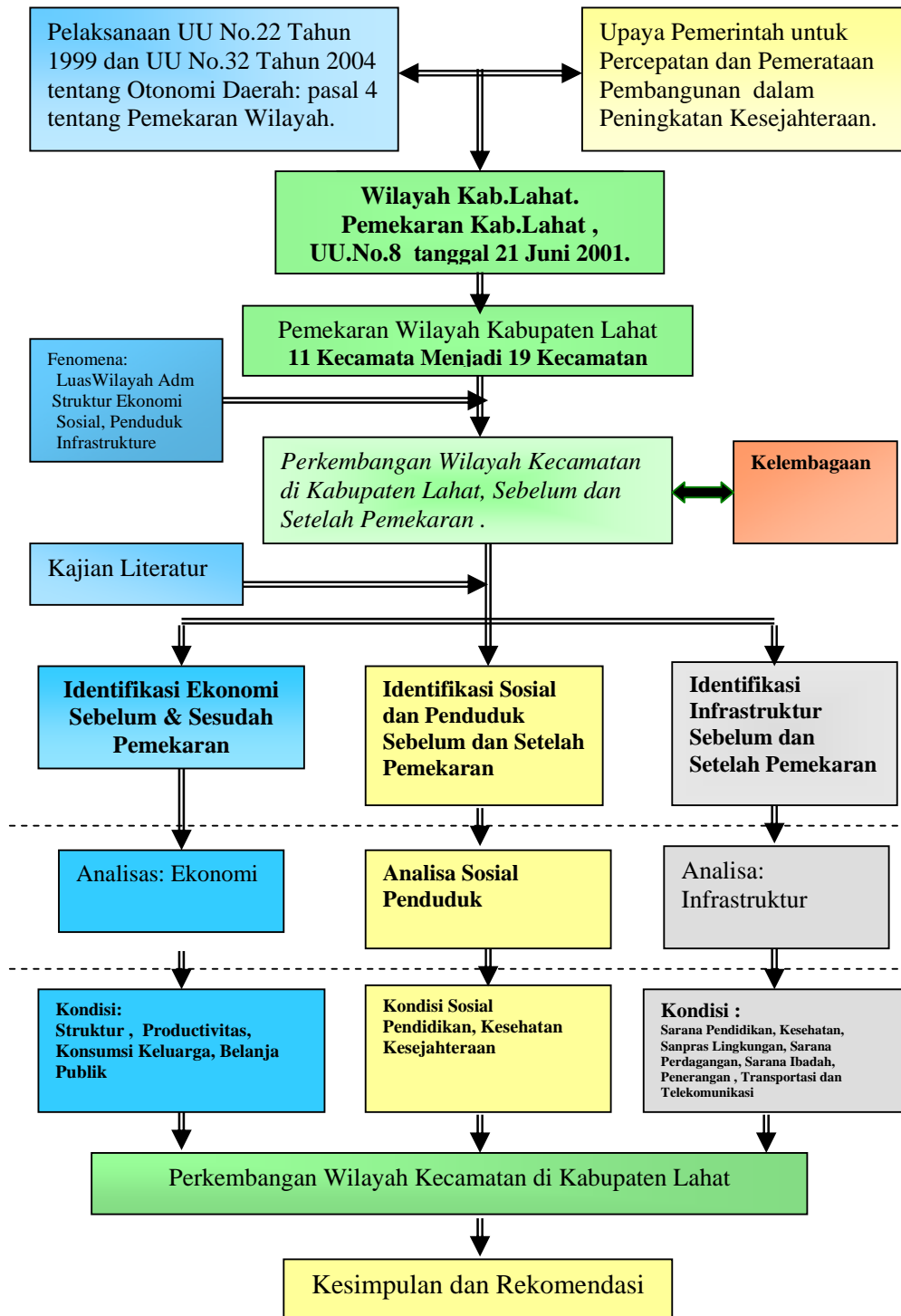
- b. Peta wilayah Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran.



1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penulisan kajian perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran wilayah, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mengetahui perkembangan wilayah Kabupaten Lahat dan upaya untuk meningkatkan perkembangan dalam pembangunan Kabupaten Lahat, sehubungan dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan pembangunan sarana dan prasarana wilayah pada berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. seiring otonomi daerah maka sejak tahun 2001 Kabupaten Lahat dimekarkan menjadi dua wilayah dengan dibentuknya Kota Otonom Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang pada Bulan April 2007. Secara skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat di bawah ini:



Sumber: Hasil Analisis, 2007

GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan (Riduwan, 2004: 49)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengumpulan data skunder dan penelitian evaluasi sumatif. Kerlinger (1996) mengatakan bahwa penelitian sekunder adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, dengan pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan laporan dari data penelitian dan penelitian *Sumatif*, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian akan berfungsi menjelaskan fenomena. Dengan demikian hasil penelitian evaluasi *sumatif* menekankan pada efektivitas pencapaian program yang berupa produk tertentu (Kidder dalam Riduwan, 2004: 54).

1.7.1 Data

1.7.1.1 Jenis Data

Data penelitian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu: data hasil observasi aktivitas ekonomi wilayah Kabupaten Lahat, data hasil observasi tentang aspek sosial penduduk, data hasil observasi tentang infrastruktur wilayah.

2. Data Sekunder, yaitu: data luas wilayah kabupaten dan kecamatan, data sarana dan prasarana wilayah, data kependudukan, lapangan kerja, data aktivitas perekonomian, produktivitas dan konsumsi keluarga, alokasi anggaran.

Untuk lebih jelasnya, kebutuhan data dalam studi perkembangan wilayah kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Lahat, pada Tabel I.3 :

TABEL I.3
DATA PENELITIAN

| No | Variabel | Kebutuhan Data | Jenis Data | Sumber Data |
|----|-----------------------|---|------------------------|--|
| 1 | Aspek Ekonomi | Strukture ; Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Jumlah Tenaga Kerja Bangunan Jumlah Tenaga Kerja Perdagangan. Alokasi Anggaran Produksi; - Komoditi - Peternakan - Perikanan - Perkebunan Pendapatan Masyarakat | ✓ Sekunder | Sekunder ✓ BAPPEDA ✓ BPS |
| 2 | Aspek Sosial Penduduk | Kesehatan: Jumlah dokter Jumlah tenaga Kesehatan Pendidikan: Jumlah Pelajar Jenjang SLTP Jumlah Komposisi SDM Kesejahteraan: Jumlah penduduk Prasejahtera Jumlah penduduk per Kecamatan Jumlah KK per Kecamatan % Penduduk Jumlah Kepadatan Pddk/Km ² Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Angka Pengangguran | ✓ Sekunder | Sekunder ✓ BAPPEDA ✓ Depnaker ✓ BPS |
| 3 | Infrastruktur | Transportasi; - Jalan Raya - Jembatan - Jalan Kereta Api - Stasiun/ Terminal Fasilitas Umum; - Sarana Air Bersih - Sarana Pendidikan - Sarana Kesehatan - Sanitasi - Perlistrikan - Pasar - Jalan Lingkungan - Sarana Ibadah - Sarana Aparatur - Persampahan - Telekomunikasi | ✓ Primer ✓ Sekunder | Primer ✓ Observasi Sekunder ✓ BAPPEDA ✓ DPU ✓ BPS |

Sumber: Hasil Analisis, 2008

1.7.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada obyek penelitian di lapangan melalui pengamatan (*observasi*) langsung, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian (Singarimbus, 1987).

1. Pengumpulan Data Primer

Dilakukan dengan pengamatan di lapangan dan dokumentasi. Pengamatan langsung ditujukan untuk mengamati dan mendokumentasikan aktivitas, kondisi sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Lahat.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui buku bacaan, *website*, dokumen penelitian atau melalui kajian literatur. Instansi yang dituju adalah BAPPEDA Kabupaten Lahat, BPS Kabupaten Lahat, Dinas Perhubungan, Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lahat.

1.7.1.3 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data primer maupun sekunder, kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

1) Editing

Data primer maupun data sekunder diolah dengan melakukan reduksi data atau memilih data-data yang dibutuhkan dan mendukung kegiatan penelitian.

2) Coding

Untuk yang bersifat deskriptif pengolahannya dengan membuat abstraksi/ringkasan data hasil pengamatan, kemudian dipilah mana yang termasuk satuan informasi, kemudian dilakukan pengkodean tiap satuan.

3) Tabulasi

Merupakan tahapan pengelompokan data dan memasukkan data dalam bentuk tabel analisis, sehingga dapat terlihat dan terbaca maksud data dalam analisis.

4) Analisis

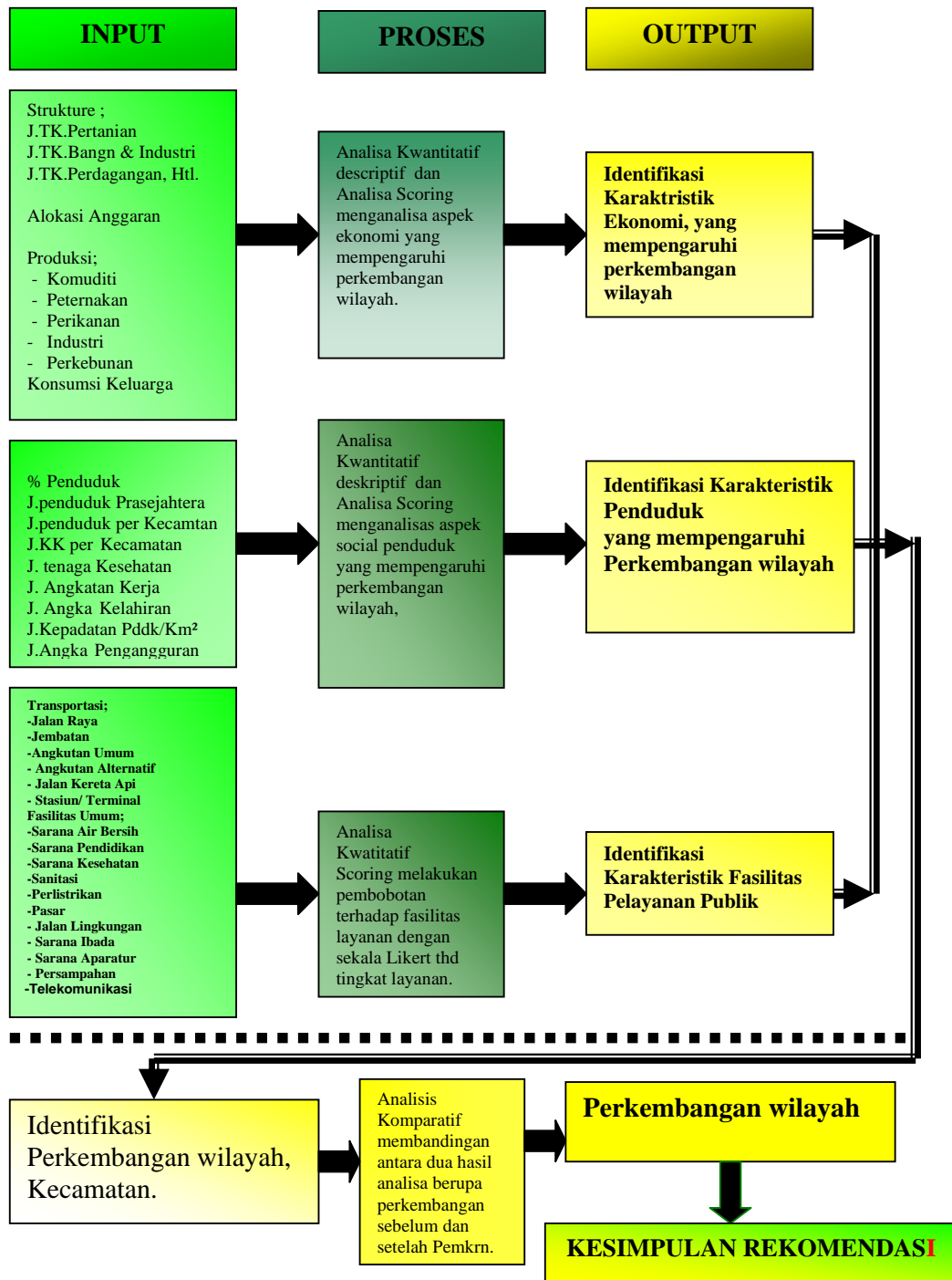
Tahapan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian.

1.7.1.4 Teknik Penyajian Data

Data yang direduksi disajikan dalam bentuk peta, grafik, diagram atau tetap dalam bentuk deskriptif untuk data yang bersifat kualitatif. Data-data tersebut didukung oleh data foto untuk memperlihatkan secara visual kondisi nyata di lapangan.

1.7.2 Kerangka Analisis

Kerangka Analisis merupakan suatu acuan atau metode dalam tahapan-tahapan pendekatan penelitian dan bertujuan untuk mempermudah teknis dan analisisnya. Secara diagramatis digambarkan dalam kerangka analisis berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.3 **KERANGKA ANALISIS**

1.7.2.1 Proses Analisis

Tahapan proses analisis dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian berupa proses analisis untuk mengetahui dan mendapatkan penyebab permasalahan dalam penelitian. Untuk melakukan proses analisis diperlukan penelitian secara terpadu yang mencakup unsur-unsur terkait yang menjadi variabel dalam penelitian, sehingga semua unsur yang terlibat dapat dianalisis dan menghasilkan produk yang dapat mengurangi permasalahan yang ada.

Tahapan proses analisis dalam penelitian ini adalah tahapan berupa pengelolaan dan identifikasi data dasar yang ada untuk mengetahui kondisi, potensi, kendala, karakteristik, serta keterbatasan obyek penelitian. Identifikasi dalam tahapan proses dalam penelitian ini berupa:

1. Identifikasi aspek ekonomi, data yang dianalisis antara lain: struktur perekonomian, pendapatan, belanja publik dan produksi di daerah.
2. Identifikasi aspek sosial: persentase penduduk, pendapatan, pendidikan dan kesehatan penduduk, serta tingkat kesejahteraan penduduk.
3. Identifikasi infrastruktur, data yang dianalisis berupa: infrastruktur sebagai fasilitas pelayanan publik, transportasi sebagai sarana dan prasarana wilayah, utilitas; perlistrikan, telekomunikasi.

1.7.2.2 Tahapan Analisis

Tahapan analisis merupakan tahapan dalam penelitian untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif.

Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan terhadap variabel sosial penduduk sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah. Analisis kedua dilakukan terhadap variabel ekonomi yang mempengaruhi perkembangan wilayah setelah pemekaran Kabupaten Lahat, kemudian analisis juga dilakukan pada infrastruktur yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan wilayah Kabupaten Lahat. Hasil ketiga analisis digunakan sebagai masukan untuk analisis selanjutnya, yaitu komparasi perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran.

1.7.3 Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif dipergunakan untuk mengukur data berupa angka atau bentuk kualitatif yang diangkakan, sedangkan teknik kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan kondisi di wilayah studi dan proses perkembangan wilayah.

Analisis kualitatif berupa deskriptif, merupakan analisis keadaan obyek studi melalui uraian, pengertian ataupun penjelasan-penjelasan, baik terhadap analisis terukur maupun tidak terukur. Adapun analisis kualitatif normatif, yaitu analisis terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu aturan atau pedoman ideal maupun landasan hukum atau lainnya. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan verbal terhadap informasi, gambar skema dan lain-lain berkenaan dengan perkembangan wilayah.

1.7.3.1 Analisis Skoring

Analisis skoring digunakan untuk memberikan penilaian terhadap indikator-indikator setiap variabel, sehingga dapat diketahui bobot masing-masing parameter yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pelaksanaan penilaian maka digunakan skala penilaian untuk masing-masing parameter tersebut. Cara ini disebut dengan *Jugment Of Similarty* (Rankin, 1983: 6). Dalam penilaian ini, masing-masing parameter tersebut mempunyai ukuran yang sama. Dengan demikian, penilaiannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan angka dari masing-masing parameter tersebut. Dengan cara ini, ukuran masing-masing parameter tersebut dinyatakan dalam obyek psikologi yang bentuknya dapat berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa yang menghasilkan pengaruh kognitif misalnya baik dan tidak baik, cukup dan kurang dan sebagainya. Skala penilaian untuk masing-masing parameter harus simetris dengan kondisi netral.

Dalam penelitian ini skala kategori penilaian dan pembobotan yang ditentukan untuk beberapa variabel data, agar dapat dengan mudah untuk dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan yang dikemukakan. Oleh karena itu, maka penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu frekuensi dengan tidak mengurangi obyektivitas hasil penelitian, yaitu dengan membuat suatu daftar yang membagi data ke dalam tiga kategori.

Dengan sistem tersebut di atas pada hasil akhir penilaian dapat diketahui sebagai hasil penjumlahan. Untuk memudahkan memberikan ukuran penilaian maka nilai skor yang sudah dikonversikan ke dalam rentang besar nilai

produk tersebut merupakan produk yang dominan yang mempengaruhi perkembangan perekonomian untuk kabupaten yang berbasis pada sektor pertanian.

TABEL.I.4
PEMBERIAN BOBOT/ NILAI SETIAP VARIABEL
EKONOMI KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

| No. | Variabel | Kriteria | Klasifikasi | Skor |
|-----|---------------------------------|--|-------------|--------|
| 1. | Hasil Pertanian P(ton) | Meningkatnya produksi padi sawah, ladang setiap tahun dalam satuan ton. | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Produksi hasil padi sawah, ladang cenderung tetap setiap tahun tanpa adanya peningkatan. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Produksi hasil sawah, ladang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. | Menurun | 1 - 3 |
| 2. | Hasil Perkebunan Kopi (ton) | Meningkatnya jumlah produksi hasil perkebunan berupa kopi pada setiap tahunnya. | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Jumlah produksi hasil perkebunan berupa kopi cenderung stabil tidak terjadi peningkatan hasil. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Produksi hasil perkebunan berupa kopi cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. | Menurun | 1 - 3 |
| 3. | Hasil Ternak Besar (Ekor) | Bertambahnya jumlah hasil peternakan berupa ternak besar dalam satuan ekor setiap tahunnya. | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Jumlah ternak besar jumlahnya cenderung stabil tidak mengalami peningkatan. | Menurun | 1 - 3 |
| | | Jumlah ternak besar berupa kerbau, sapi, kuda cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. | Tetap | 4 - 7 |
| 4. | Hasil Perikanan Air Tawar (ton) | Meningkatnya produksi hasil perikanan air tawar setiap tahun. | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Produksi perikanan air tawar cenderung tetap setiap tahun tanpa adanya peningkatan. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Produksi hasil perikanan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. | Menurun | 1 - 3 |

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Hasil analisis ini menggambarkan bahwa ekonomi yang terjadi di setiap kecamatan berbeda-beda sesuai dengan produktivitas ekonomi wilayah yang dominan seperti produk hasil pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan,

yang setiap tahun akan mengalami perubahan, baik meningkat ataupun menurun, hal ini mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakat wilayah kecamatan.

Berdasarkan pemberian bobot/ nilai didapat skor tertinggi dan terendah untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut;

- Total skor tertinggi = $8.33 \times 8.33 \times 100 = 100$.
- Total skor terendah = $2.67 / 8.33 \times 100 = 32$.

Keterangan;

10 = Bobot tertinggi untuk setiap variabel.

1 = Bobot terendah untuk setiap variabel.

Dari perhitungan rumus rentang, banyak kelas, dan interval kelas, diperoleh perhitungan sebagai berikut;

$$\text{Rentang} = (100 - 32) / 3 = 22,667$$

TABEL I.5
KELAS HASIL SKORING

| Kelas | Penjelasan | Skor |
|-------|---------------------------------------|------------|
| I | Kecamatan yang mengalami Perkembangan | 86,4 - 100 |
| II | Kecamatan yang Tetap Stabil | 59,3-72,8 |
| III | Kecamatan Menurun | 32 – 45,6 |

Sumber : Hasil Analisa, 2008

2. Variabel sosial penduduk, meliputi pendidikan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Kabupaten Lahat.

Untuk mengetahui kondisi perkembangan setiap kecamatan maka di lakukan analisis *scoring* guna mengukur tingkat perkembangan yang terjadi, melalui pemberian nilai terhadap variabel perkembangan berupa pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dengan kriteria perkembangan yang terjadi.

TABEL.I.6
PEMBERIAN BOBOT/ NILAI SETIAP VARIABEL
KONDISI SOSIAL PENDUDUK KECAMATAN
DI KABUPATEN LAHAT

| No. | Variabel | Kriteria | Klasifikasi | Skor |
|-----|-----------------------|---|-------------|--------|
| 1. | Pendidikan | Terdapat banyak usia sekolah jenjang SLTP yang bersekolah pada suatu wilayah kecamatan tertentu. | Berkembang | 8 - 10 |
| | | Terdapat sejumlah usia sekolah jenjang SLTP yang cukup memadai pada suatu kecamatan. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Banyak terdapat anak usia sekolah yang tak bersekolah, sehingga masih banyak warga yang buta huruf, dan diindikasikan dengan banyaknya angka pengangguran pada usia angkatan kerja. | Menurun | 1 - 3 |
| 2. | Kesehatan | Banyaknya masyarakat yang mendapat layanan kesehatan dari dokter spesialis dan dokter Umum. | Berkembang | 8 - 10 |
| | | Terdapat layanan dokter umum yang sedikit di suatu wilayah kecamatan, sehingga masih kurangnya tenaga dokter. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Tidak terdapatnya layanan kesehatan dari dokter, penduduk masih banyak menggunakan layanan dukun. | Menurun | 1 - 3 |
| 3. | Tingkat Kesejahteraan | Berkurangnya keluarga prasejahtera pada wilayah kecamatan. | Berkembang | 8 - 10 |
| | | Terdapat sedikit jumlah keluarga prasejahtera, dengan ditandai masih banyaknya pengangguran. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Banyak nya keluarga prasejahtera, dan banyaknya terdapat pengangguran pada wilayah kecamatan. | Menurun | 1 - 3 |

Sumber : Hasil Analisis, 2008

3. Variabel Infrastruktur, meliputi ketersediaan sejumlah fasilitas publik yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Lahat seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, akses jalan, sarana perdagangan, sarana ibadah, sarana pendukung pemukiman serta penerangan guna mengukur tingkat pelayanan masyarakat, pengukuran dilakukan terhadap variabel penelitian dengan cara menilai kriteria-kriteria yang berkaitan dengan variabel ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah setiap kecamatan, untuk selanjutnya sebagai mana tahapan di bawah ini:

TABEL.I.7
PEMBERIAN BOBOT/ NILAI SETIAP VARIABEL
INFRASTRUTUR KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

| No. | Variabel | Kriteria | Klasifikasi | Skor |
|-----|--|---|-------------|--------|
| 1. | Ketersediaan Sarana Kesehatan | Tersedianya Sarana Kesehatan setingkat Puskesmas dan R S pemerintah maupun swasta. | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Tersedianya Sarana Kesehatan setingkat Puskesmas dan Pustu | Tetap | 4 - 7 |
| | | Tersedianya Sarana Kesehatan Pustu, Posyandu. Klinik | Menurun | 1 - 3 |
| 2. | Ketersediaan Sarana Pendidikan | Tersedianya Sarana Pendidikan SD, SLTP hingga SLTA | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Terdapat Sarana Pendidikan SD hingga SLTP | Tetap | 4 - 7 |
| | | Terdapat Sarana Pendidikan hingga Sekolah Dasar . | Menurun | 1 - 3 |
| 3. | Ketersediaan Sarana Perdagangan. | Tersedianya Pasar Inpres maupun Pasar Swasta yang permanen . | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Tersedianya Pasar Kalangan tetap atau semi permanen | Menurun | 1 - 3 |
| | | Tersedianya Pasar tidak tetap, kalangan /swadaya masyarakat. | Tetap | 4 - 7 |
| 4. | Ketersediaan Prasarana dan Sarana Lingkungan | Tersedianya Jl.Lingkungan, Drainase Air Bersih, Penerangan serta pengolahan sampah yang baik. | | 8 - 10 |
| | | Tersedianya Jl.Lingkungan, Drainase dan Air Bersih dan Penerangan yang cukup. | | 4 - 7 |
| | | Tersedianya Jalan Lingkungan, dan Drainase Lingkungan. | | 1 - 3 |
| 5. | Perhubungan dan Telekomunikasi | Tersedianya Jaringan Jalan, Jaringan Telephon dan rute Transportasi Kolektor Primer. | Meningkat | 8 - 10 |
| | | Tersedianya Jaringan Jalan , Jaringan Telephon dan dilalui rute Transportasi Kolektor Sekunder. | Tetap | 4 - 7 |
| | | Tersedianya Jaringan Jalan serta Jaringan Telephon. | Menurun | 1 - 3 |

Sumber : Hasil Analisis, 2008

1.7.3.2 Analisis Komparasi

Analisis komparasi yang bertujuan untuk menggambarkan perbedaan karakteristik dari dua variabel yaitu hasil analisis yang didapat berupa perkembangan wilayah kecamatan kondisi perkembangan sebelum dan kondisi perkembangan setelah pemekaran wilayah yang ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial penduduk dan dari aspek infrastruktur sebagai fungsi pelayanan bagi masyarakat.

Dari hasil analisis komparasi maka tingkat perkembangan yang terjadi di setiap kecamatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kondisi perkembangan, skala Linkert digunakan untuk mengukur kejadian atau gejala sosial yang berkaitan dengan variabel penelitian (Riduwan, 2004: 86), dalam hal ini variabel yang diteliti yaitu ekonomi, sosial penduduk dan infrastruktur sebagai tingkat layanan. Adapun klasifikasi yang diukur yaitu:

- a. Klasifikasi Berkembang, merupakan klasifikasi untuk wilayah kecamatan yang memiliki nilai skor yang tertinggi.
- b. Klasifikasi Stagnan, adalah klasifikasi untuk wilayah kecamatan yang memiliki nilai skor yang sedang dan cenderung tidak adanya perkembangan baik meningkat ataupun menurun.
- c. Klasifikasi menurun, adalah klasifikasi untuk wilayah kecamatan yang memiliki nilai skor yang rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR.1.4
SKALA LINKER, PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

TENTANG PERKEMBANGAN WILAYAH

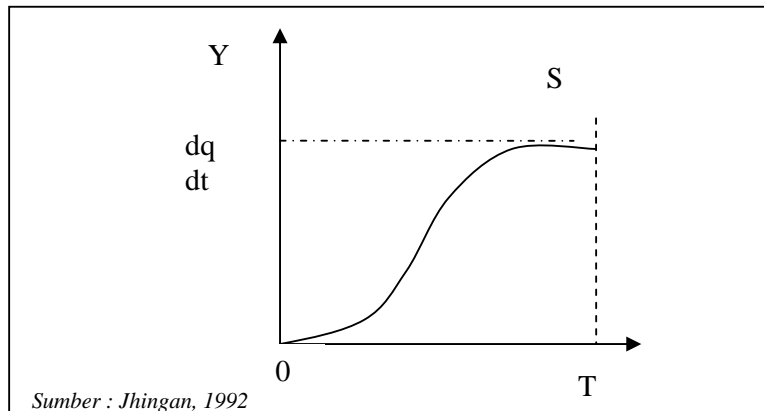
Wilayah dapat diartikan suatu ruang geografis dengan fungsi atau batasan administrasi tertentu, ditinjau dari fungsional suatu wilayah, wilayah merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri dari sistem ekonomi, sistem ekologi, sistem sosial politik (Blair, 1991 dalam Abdurrahman B, 2005: 15). Secara normatif, wilayah juga didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional (Undang-Undang Penataan Ruang No.26, 2007: 4). Adapun pemekaran wilayah merupakan wujud implementasi otonomi daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk membentuk suatu kabupaten/kota yang baru, yang terpisah dan tidak berhierarki dengan kabupaten induk, sedangkan wilayah kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan (Undang-Undang Otonomi Daerah no.32, 2004), Dalam hal ini, kabupaten merupakan daerah otonom yang terdiri dari beberapa kecamatan sebagai perangkat perwilayahan.

Perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa (Okun dan Richardson dalam Jhingan,1992: 8), sedangkan perkembangan suatu wilayah merupakan integral pertumbuhan

setiap sistem yang terdiri dari sosial, ekonomi, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah (Riyadi, 2002). Perkembangan wilayah menurut Schumpeter (dalam Jhingan, 1992: 6) adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, dimana dapat diasumsikan bahwa indikator perkembangan wilayah dapat ditinjau dari perkembangan aspek ekonomi, sosial dan infrastruktur.

Pendekatan menekankan perlunya campur tangan pemerintah dalam pertumbuhan suatu wilayah. Menurut Keynes (dalam Jhingan, 1983), hal tersebut berkisar pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja secara penuh, termasuk penggunaan kapasitas produksi yang terpasang dan merupakan suatu proses pertumbuhan yang berlangsung dalam *equilibrium* yang stabil, antara tabungan-investasi-pendapatan, dalam dinamika pertumbuhan ekonomi yang lebih dikenal dengan *istabiliti theorm*. Ia merumuskan gagasannya:

1. Laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai bagi investor (*the warranted rate of growth*).
2. *The natural rate of growth*: laju pertumbuhan produksi dan pendapatan;
 - a. bertambahnya angkatan kerja, karena penambahan penduduk.
 - b. meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan teknologi.



GAMBAR.2.1
GRAFIK MODEL PERTUMBUHAN KLASIK

Pendekatan Neoklasik menekankan pada peran teknologi yang sangat memegang peranan penting untuk meningkatkan produktivitas dalam upaya meningkatkan pertumbuhan. Menurut Solow, 1970 (dalam Tarigan, 2005: 52), pendekatan Neoklasik memusatkan pada harga dan pasar, persaingan monopoli dan pasar tidak sempurna, serta tingkat pertumbuhan. Adapun tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Terdapat dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi ke daerah yang berupah rendah.

Pendekatan dependensi memasukkan unsur perdagangan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah, sehingga ada

ketergantungan pada permintaan dari wilayah lainnya pada kenaikan ekspor akan meningkatkan pendapatan wilayah (Richardson dalam Sihatang, 1977: 7) membagi kegiatan produksi berdasarkan pekerjaan basis dan pekerjaan pelayanan (*service*) Basis, yang merupakan kegiatan kegiatan yang bersifat *exogenous*, artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Adanya pekerjaan *service* (nonbasis) merupakan kegiatan untuk masyarakat di daerahnya sendiri. Pekerjaan basis seperti barang dan jasa yang dibeli oleh orang luar daerah, pariwisata, restoran, bengkel, usaha grosir, swalayan dan sebagainya menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Richardson merumuskan pendapatan daerah merupakan jumlah konsumsi dan investasi, belanja pemerintah dan ekspor dikurang impor.

$$Y = C + I + G + X - M. \quad (1)$$

Multiplier perdagangan interregional dalam kajiannya, sudah memperhitungkan wilayah yang bersangkutan menerima impor dari daerah lain dan juga telah memperhitungkan pajak (pajak langsung dan pajak tidak langsung). *Multiplier* ini dilandaskan pada kenyataan, bahwa penginjeksian atau penyuntikan sejumlah uang tertentu ke dalam perekonomian regional akan dapat mendorong kenaikan pendapatan daerah yang bersangkutan secara berlipat.

Kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat perkembangan suatu daerah adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan kehidupannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha. Pemakaian kriteria pendapatan daerah perkapita sangat sulit untuk

mencari keterkaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, karena belum dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, dimana pendapatan tinggi belum berarti merupakan suatu jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya.

Menurut Hill dan Williams (1989), untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perkembangan wilayah, diperlukan variabel yang cukup banyak macamnya yang berfungsi untuk menilai suatu daerah. Berkaitan dengan analisis variabel-variabel ekonomi perlu ditambahkan indikator-indikator yang mengacu pada Kebutuhan Fisik Minimum (*Minimum Physical Needs*), yang terdiri dari tiga area kunci indikator-indikator sosial yang mempengaruhi nilai perkembangan suatu daerah yaitu kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

2.1 Aspek Ekonom

Perkembangan wilayah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi yang secara kontinu merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi yang dapat diukur dan obyektif, adanya perluasan tenaga kerja, modal, serta volume perdagangan dan konsumsi, perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga. (Jhingan, 1983).

Kutnets (dalam Jhingan, 1983: 72-84) menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasari pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebagainya:

1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita; laju kenaikan perkapita yang tinggi diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk .
2. Peningkatan produktivitas; pertumbuhan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju produk perkapita sebagai akibat adanya perbaikan kualitas.
3. Laju perubahan struktural yang tinggi; ditandai dengan peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh.
4. Urbanisasi: pertumbuhan yang ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.
5. Ekspansi negara maju; pertumbuhan ini ditandai dengan revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi.
6. Arus barang, modal, dan orang antarbangsa; pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan migran akibat mudahnya angkutan antarbenua.

2.1.1 Ekonomi Makro dalam Perkembangan Wilayah

Ruang lingkup ekonomi makro meliputi tingkat harga secara umum (indek harga), serta yang berkenaan dengan pendapatan nasional, investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perkembangan pembangunan yang terjadi digerakkan oleh adanya investasi (Syamsudin, Ahmad dan Marzuki, 2007: 1-4). Investasi sebagai pendayagunaan diartikan sumber daya hari ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Pertumbuhan investasi yang terjadi serta keuntungan yang berpengaruh secara luas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

2.1.2 Ekonomi Mikro dalam Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah ekonomi mikro menitikberatkan secara individual pada pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan dan faktor-faktor produksi; tenaga kerja dan modal sampai pada keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan mata rantai perkembangan ekonomi wilayah. Aktivitas perekonomian masyarakat pada sektor riil akan meningkatkan pendapatan keluarga, terutama ekonomi basis (Ricardson dalam Tarigan, 2005: 55-56). Hal ini merupakan aktivitas ekonomi mikro yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah

2.2. Aspek Sosial, Penduduk

Potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hal ini akan semakin memperberat persoalan kelangkaan modal karena untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi pada setiap tahunnya maka perlu dilakukan investasi secara besar-besaran (Jhingan, 1992: 26-27). Laju pertumbuhan penduduk yang beragam, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat diiringi dengan tingkat pendapatan yang rendah dan nihilnya tingkat pemupukan modal merupakan kesulitan bagi negara berkembang. *Output* yang meningkat karena teknologi akan tertekan oleh pertumbuhan tersebut, akibatnya tidak ada perbaikan taraf hidup.

Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan dan sektor industri yang tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja. Navarrete (dalam Jhingan, 1992: 29) mengatakan: pengangguran dapat dilukiskan sebagai suatu keadaan, dimana pengalihan sejumlah tertentu faktor tenaga kerja ke bidang lain tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asal. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa produktivitas marginal unit-unit faktor tenaga kerja tempat asal mereka kerja adalah nol atau menduduki nol atau bahkan negatif. Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan berpenduduk padat pengangguran tersembunyi diperkirakan 25-30 persen dari tenaga kerja (di dalam pertanian).

Dalam menentukan betapa penting arti pendidikan di masa pembangunan ekonomi, suatu negara tidak dapat mengaku dirinya maju, tanpa menyelenggarakan pendidikan di bidang peradaban industri (Cairncross dalam Jhingan, 1992: 70). Petani harus di bawah menuju perekonomian moneter dan tidak dibiarkan saja bergerak pada usaha tani pangan. Para pekerja harus dibiasakan bekerja pada jam kerja yang ditentukan di pabrik-pabrik untuk mendapat bayaran. Kota-kota harus tumbuh, begitu juga bank dan usaha bisnis. Hasil ilmu pengetahuan harus diterapkan di seluruh perekonomian, dimana harus muncul kelompok pemuda bisnis, administrasi dan politik, sebagai nyawa kehidupan bangsa yang dapat menjadi tumpuan dalam mempertahankan momentum pembangunan.

Faktor manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada efisiensi. Para ahli ilmu ekonomi modern

menyebutkan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Dalam mengetahui perkembangan suatu wilayah dari aspek sosial, kemiskinan (*poverty*) merupakan indikator yang digunakan dalam menilai perkembangan suatu wilayah (Hill dan Williams, 1989: 195).

2.2.1 Pendidikan

Pembangunan ekonomi tidaklah mungkin tanpa pendidikan. Melalui pendidikan umum pemerintah dapat meningkatkan persediaan buruh efektif dan kapasitas produktif bangsa, serta lembaga latihan yang diperlukan untuk memberikan pengajaran kepada ahli mesin, montir listrik, tukang, perawat, guru, penyuluh pertanian dan lain-lain. Pendidikan tinggi dan lembaga penelitian didirikan untuk mencetak dan meningkatkan jumlah dokter, administrator, insinyur dan semua jenis personil terlatih. Program pendidikan pada usaha menjalin kesatuan bangsa pada umumnya, memanfaatkan energi rakyat dan membangun bangsa dan sumber daya manusia di seluruh negeri, investasi dalam mendidik massa sama juga produktifnya. Galbraith (dalam Jhingan, 1992: 550) berpendapat "Menolong petani dan pekerja dari kebutuhurufan mungkin merupakan suatu tujuan tersendiri, tetap juga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan bagi setiap bentuk kemajuan pertanian. Dipandang secara demikian, pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang sangat produktif".

Dalam melihat perkembangan suatu wilayah dari segi pendidikan, alternatif yang digunakan untuk mengukur perkembangan adalah rasio banyaknya

pelajar pada jenjang SLTP, yaitu banyaknya pelajar grup usia (13-15 tahun) sebagai indikator pendidikan(Hill dan Williams, 1985: 191-195).

2.2.2 Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kesehatan masyarakat harus diperbaiki. Langkah tersebut meliputi perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan pembuangan air kotor dan menggenang, pembenahan daerah kumuh, penyediaan perumahan yang lebih baik, penyediaan air bersih, penyediaan fasilitas pembuangan kotoran yang lebih baik, pengawasan penyakit menular, penyediaan layanan medis dan kesehatan, terutama kesejahteraan ibu dan anak, pendidikan kesehatan dan keluarga berencana, serta latihan petugas medis kesehatan (Jhingan,1992:551).

Menurut Hill dan Williams (1985), dari segi kesehatan indikator perkembangan wilayah diukur berdasarkan *Infant Mortality Rate* Per 1000 Kelahiran yang berkaitan dengan perkembangan suatu wilayah dan sebagai input ukuran pelayanan ideal tenaga dokter per 100.000 penduduk.

2.3 Infrastruktur

Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

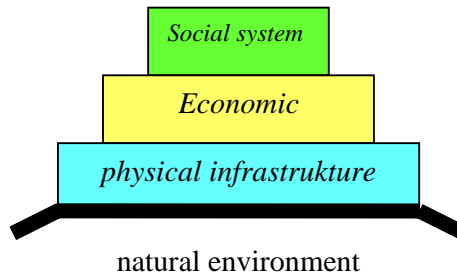
Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Komponen-komponen infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem, komponen infrastruktur dikelompokkan ke dalam beberapa macam grup infrastruktur, yaitu:

1. Sumber daya air merupakan infrastruktur keairan, seperti sistem air bersih, sanitasi, irigasi, drainase, pengendalian banjir dll
2. Infrastruktur transportasi, meliputi jalan raya, jembatan, terminal, jaringan rel dan stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.
3. Infrastruktur pengolahan limbah; meliputi sistem manajemen limbah padat.
4. Infrastruktur bangunan kota, seperti pasar dan sarana olahraga
5. Infrastruktur energi, meliputi produksi, distribusi ketenagalistrikan serta gas
6. Perumahan dan pemukiman penduduk
7. Infrastruktur telematika (telekomunikasi)

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, dalam Kodoatie, 2005). Sistem infrastruktur merupakan

pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.



Sumber : Grigg, dalam Kodoatie, 1988

GAMBAR 2.2
HUBUNGAN ANTARA SISTEM SOSIAL, EKONOMI,
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ALAM YANG HARMONI

Dari Gambar 2.2 di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi penting.

2.3.1 Belanja Publik

Dalam rangka meningkatkan perkembangan wilayah, peran pemerintah adalah melakukan pembangunan infrastruktur wilayah yang berfungsi sebagai layanan publik dan sebagai penunjang sistem aktivitas ekonomi wilayah dan aktivitas sosial, melalui anggaran daerah sebagai wujud pengeluaran pemerintah sebagai belanja publik. Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur secara tidak langsung akan meningkatkan perkembangan wilayah melalui peningkatan layanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi dalam bentuk transportasi, telekomunikasi dan perlistrikan secara bijaksana akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar industri dan konsentrasi masyarakat (Oey dan Gardiner, 1990).

Menurut Lewis (dalam Jhingan, 1992: 544) ruang lingkup tindakan pelayanan umum antara lain menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi dan menentukan laju investasi. Pemerintah dapat membangun sarana transportasi dan komunikasi untuk mengembangkan pasar, organisasi dan pembangunan lembaga keuangan untuk membantu pertumbuhan pertanian dan industri. Lembaga keuangan demikian dapat berupa koperasi, bank hipotik, bank industri, perusahaan investasi dan keuangan. Penyediaan pelayanan seperti pembangunan wilayah pemukiman, sekolah, universitas, rumah sakit, taman, transportasi kota, air minum, penyediaan listrik dan sebagainya termasuk dalam fungsi pemerintah (Jhingan, 1992: 547).

2.3.2 Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat. Peran teknologi dalam kehidupan semakin menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam kegiatan sesuai dengan fungsi dari teknologi yang digunakan. Dalam hubungan dengan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi menjadi faktor penting dan berperan sangat besar bagi upaya pencapaiannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi pembangunan dan pembangunan yang berhasil akan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Schoorl (1984 dalam Riyadi, 2003: 37) menyatakan bahwa modernisasi suatu

masyarakat ialah suatu proses transformasi, suatu perubahan dalam masyarakat dalam segala aspeknya.

2.4 Kelembagaan

Kebutuhan akan pemerintahan yang bersih dalam pembangunan ekonomi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korupsi merupakan *sine quo non* pembangunan ekonomi. Pemerintahan harus kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban dan mampu mempertahankan negeri dari agresi dari luar. Pembangunan ekonomi memerlukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dan memberikan kepastian tentang keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan. Pembangunan ekonomi juga memerlukan suatu sistem administrasi yang tepat untuk melaksanakan rencana yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor politik dan administratif merupakan faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi yang berupa stabilitas politik serta administrasi yang kokoh, efisien dan tidak korupsi yang kesemuanya akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Lewis (dalam Jhingan, 1983: 97) berpendapat bahwa tindakan pemerintah memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi.

Pemerintah selaku organisasi formal harus menyediakan pelayanan kepada masyarakat, kapan saja dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi; ketertiban; keadilan, polisi, pertahanan; imbalan yang sepadan dengan kemampuan dan penerapan di dalam produksi; jaminan dalam menikmati hak milik yang sifatnya bisa sangat beraneka ragam; hak waris; jaminan bahwa

persetujuan dan perjanjian bisnis akan ditepati. Ketentuan tentang standar satuan berat, ukuran dan mata uang serta stabilitas sistem pemerintah itu sendiri juga harus dijaga untuk memelihara rasa ketertiban dan harapan serta tugas masa depan yang dapat diperhitungkan (Finer dalam Jhingan 1992: 71).

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mengatasi perbedaan sosial dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi (Jhingan, 1992: 545). Pemerintah harus memegang peranan positif, sehingga diperlukan adanya rasio pembaharuan secara cepat. Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal, yaitu mengarah pada penciptaan *overhead* sosial dan ekonomi seperti tenaga, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pengawasan dan pengaturan oleh pemerintah menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan serta keseimbangan memerlukan atas produksi, distribusi dan konsumsi komoditas.

2.5 Variabel Penelitian

Selanjutnya kajian literatur di atas digunakan sebagai dasar dalam penentuan variabel penelitian yang terkait dengan aspek ekonomi, aspek sosial penduduk dan aspek infrastruktur sebagai fungsi layanan yang mempengaruhi perkembangan wilayah, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.1.

TABEL II.1
VARIABEL PENELITIAN

| NO | Aspek | Variabel | Dasar Teori | Keterkaitan Penelitian |
|----|------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Ekonomi | Karakteristik ekonomi | Suatu proses pertumbuhan yang berlangsung dalam <i>equilibrium</i> yang stabil, antara tabungan-investasi-pendapatan, dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. (Keynes, 1936 dalam Jhingan, 1983) | Untuk mengetahui besarnya pemupukan modal melalui produktivitas, dan pendapatan |
| 2. | Sosial, Penduduk | Karakteristik Penduduk | Perkembangan suatu wilayah dari aspek sosial berkenaan dengan tiga area kunci; Kesehatan, Kemiskinan, dan Pendidikan (Hill and Williams, 1989: 193-195) | Untuk mengetahui pertambahan penduduk, pendidikan dan kesehatan serta tingkat kesejahteraan. |
| 3 | Infrastruktur | Karakteristik Fasilitas Pelayanan | Infrastruktur merujuk pada sistem fisik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. (Grigg, 1998 dalam Kodoatie, 2005) | Untuk mengukur tingkat ketersediaan fasilitas layanan wilayah yang ada bagi publik dan transportasi. |

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Perkembangan wilayah ditinjau dari pendekatan pilar utama perkembangan wilayah, yaitu dari aspek infrastruktur, aspek ekonomi dan aspek sosial penduduk, sebagaimana tercantum dalam sketsa di bawah ini:

TABEL II.2
PENDEKATAN TIGA PILAR
PERKEMBANGAN WILAYAH

VARIABEL – VARIABEL
PENELITIAN
PERKEMBANGAN WILAYAH



| No. | ASPEK | VARIABEL | DASAR TEORITIS |
|-----|-----------------|---|--|
| 1 | SOSIAL,PENDUDUK | Karakteristik Penduduk - Pendidikan - Kesehatan - Kesejahteraan | Hill And Williams,1989 |
| 2 | EKONOMI | Karakteristik ekonomi - Struktur - Produktivitas Wilayah - Konsumsi Keluarga - Belanja Publik | Keynesian, 1936 dalam Jhingan, 1983 |
| 3 | INFRASTRUKTUR | Karakteristik Fasilitas Pelayanan - Fasilitas Umum - Transportasi | Grigg, dalam Kodoatie, 2005 |

Sumber: Grigg dalam Kodoatie, 2005

BAB III

WILAYAH KABUPATEN LAHAT

3.1 Keadaan Geografis

Secara astronomis Kabupaten Lahat terletak antara 3°25' LS - 4°15'LS dan 102°37'BT- 103°45' BT. Kabupaten Lahat memiliki luas wilayah seluas 6,618.27 kilometer persegi dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas.
- Sebelah Selatan: Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Barat : Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan pemekaran dengan dibentuknya Kota Otonom, yaitu Pagar Alam dan pada tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan pengembangan kecamatan dari kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Lahat menjadi 19 kecamatan. Kecamatan sebagai perangkat pemerintah Kabupaten Lahat dalam melakukan fungsi pemerintahan, pembagian wilayah merupakan upaya untuk mendekatkan rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat dalam hal fungsi pelayanan bagi publik. Kabupaten Lahat sampai dengan tahun 2004 terdiri dari 19 kecamatan, 510 desa definitif dan 15 kelurahan serta 3 desa persiapan.

Dari seluruh desa/kelurahan yang definitif, 382 diantaranya termasuk klasifikasi desa swasembada dan 146 desa berklasifikasi desa swakarsa. Jarak kecamatan paling dekat ibukota kabupaten adalah Kecamatan Merapi, yaitu 15 Km, dan kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Pasemah Air Keruh sejauh 158 Km.

TABEL III.1
PEMBAGIAN DAERAH ADMINISTRATIF KABUPATEN LAHAT

| | Kecamatan | Ibu Kota | Jumlah Sesuai SK | | Jumlah/ Total | Jumlah Dusun |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | | Desa/ Villages | Kelurahan/ Wards | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 01. | Tj. Sakti | Tj. Sakti | 32 | - | 32 | 78 |
| 02. | Kota Agung | Kota Agung | 32 | - | 32 | 80 |
| 03. | Mulak Ulu | Muara Tiga | 30 | - | 30 | 75 |
| 04. | Pulau Pinang | Kedaton | 43 | - | 43 | 75 |
| 05. | Jarai | Jarai | 28 | - | 28 | 86 |
| 06. | Pajar Bulan | Sumur | 30 | - | 30 | 87 |
| 07. | Ma.Pinang | Ma.Pinang | 22 | - | 22 | 59 |
| 08. | Lintang Kanan | Babatan | 16 | - | 16 | 48 |
| 09. | Pendopo | Pendopo | 30 | - | 30 | 84 |
| 10. | Ulu Musi | Padang Tepong | 25 | - | 25 | 75 |
| 11. | Pasemah A.K | Nanjungan | 15 | - | 15 | 52 |
| 12. | Tebing Tinggi | Ps. Tebing Tinggi | 33 | 2 | 31 | 99 |
| 13. | Tl. Padang | Ps. Tl. Padang | 13 | - | 13 | 37 |
| 14. | Kikim Barat | Saung Naga | 19 | - | 19 | 58 |
| 15. | Kikim Timur | Bunga Mas | 33 | - | 33 | 92 |
| 16. | Kikim Selatan | Pagar Jati | 16 | - | 16 | 43 |
| 17. | Kikim Tengah | Tanjung Aur | 9 | - | 9 | 23 |
| 18. | Lahat | Lahat | 46 | 12 | 58 | 96 |
| 19. | Merapi | Merapi | 41 | 1 | 42 | 121 |
| Jumlah/Total | | 2004 | 513 | 15 | 528 | 1.368 |

Sumber : BPS Kabupaten Lahat, 2004

Secara administratif Kabupaten Lahat dibagi dalam 19 wilayah kecamatan yang mencakup 528 wilayah desa/kelurahan dengan rata-rata jumlah penduduk perdesa sebesar 1,026.31 orang.

3.2 Topografi

Derajat kemiringan tanah di Kabupaten Lahat relatif bervariasi, dimana dataran rendah s.d.100 seluas 17,28 %, lebih dari 100 meter seluas, 28,77 % dpl, dataran tinggi > 500 meter seluas 37,20 % dan dataran tinggi > dari 1000 meter dpl, seluas 16,74 %. Daerah yang mempunyai permukaan bergunung adalah Kecamatan Tanjung Sakti, Kota Agung dan Jarai. Ketinggian di atas permukaan laut sebagai berikut:

TABEL III.2
KABUPATEN LAHAT MENURUT KETINGGIAN
DI ATAS PERMUKAAN LAUT

| No | Ketinggian (M) Dpl | Daerah Sebaran/Kecamatan |
|----|--------------------|--|
| 1. | 25-100 | Tebing Tinggi, Lahat, Merapi dan Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Selatan |
| 2. | 100-500 | Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Muara Pinang, Pendopo,Ulu Musi, Kikim Barat, Lintang Kanan, Pulau Pinang |
| 3. | 500-1000 | Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Muara Pinang, Pendopo,Ulu Musi, Pasemah Air Keruh, Merapi dan Pulau Pinang |
| 4. | >1000 | Pulau Pinang, Kota Agung, Mulak Ulu, Muara Pinang, Jarai dan Tj. Sakti |

Sumber: Dinas Pertanahan Kab. Lahat, 2007

3.3 Keadaan Iklim.

Kabupaten Lahat beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara maksimum 30.47 derajat dan rata-rata suhu udara minimum 22.16 derajat. Ketinggian wilayah

Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut bervariasi mulai dari 100 meter sampai dengan 1.000 meter. Dengan rata – rata curah hujan 251,27 mm dan kelembaban udara 73.50 (%) serta rata-rata kecepatan angin 4.66 km/jam.

3.4 Demografi.

Jumlah penduduk di Kabupaten Lahat pada tahun 2004 berjumlah 541.894 orang terdiri dari 277,516 orang laki-laki dan 264.378 orang perempuan. Pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir mengakibatkan jumlah penduduk menjadi bertambah. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Kabupaten Lahat hanya mencapai 493.552 dengan tingkat pertumbuhan 1.16%.

TABEL III.3
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK
DI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2003

| No | Kecamatan | Jumlah KK | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Per /Km ² |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tj. Sakti | 5.676 | 500,59 | 34.558 | 69,03 |
| 2. | Kota Agung | 4.122 | 197,57 | 21.074 | 106,67 |
| 3. | Mulak Ulu | 4.241 | 222,58 | 15.862 | 71,26 |
| 4. | Pulau Pinang | 6.328 | 357,18 | 29.347 | 82,16 |
| 5. | Jarai | 6.026 | 205,02 | 29.005 | 141,47 |
| 6. | Pajar Bulan | 4.305 | 201,34 | 17.620 | 87,51 |
| 7. | Ma.Pinang | 6.181 | 193,72 | 27.872 | 143,88 |
| 8. | Lintang Kanan | 4.639 | 264,55 | 24.360 | 92,08 |
| 9. | Pendopo | 9.175 | 288,06 | 47.873 | 166,19 |
| 10. | Ulu Musi | 9.301 | 560,38 | 33.708 | 60,15 |
| 11. | Pasemah A.K | 4.958 | 217,90 | 13.143 | 60,32 |
| 12. | Tebing Tinggi | 10.538 | 590,93 | 48.578 | 82,21 |
| 13. | Tl. Padang | 2.210 | 140,90 | 12.237 | 86,85 |
| 14. | Kikim Barat | 4.127 | 312,30 | 20.395 | 65,31 |
| 15. | Kikim Timur | 6.743 | 497,75 | 19.216 | 38,61 |
| 16. | Kikim Selatan | 3.719 | 118,00 | 10.877 | 92,18 |
| 17. | Kikim Tengah | 2.170 | 299,80 | 6.845 | 22,83 |
| 18. | Lahat | 22.948 | 757,37 | 114.281 | 150,89 |
| 19. | Merapi | 9.587 | 593,33 | 43.909 | 63,33 |
| Jumlah | | 126.994 | 6.619 | 570.760 | 86,23 |

Sumber: BPS Kabupaten Lahat, 2003.

Dari Tabel III.4 terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Lahat sebesar 6.618,27 Km² dengan kepadatan penduduk rata-rata 86,23 jiwa /Km². Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Lahat dengan kepadatan penduduk rata-rata 150,89 jiwa/Km² dan kecamatan terjarang penduduknya adalah Kecamatan Kikim Tengah dengan kepadatan tercatat 22,83 per/ Km². Angkatan kerja di Kabupaten Lahat sebanyak 208.570 orang. Dilihat dari tingkat pengangguran di Kabupaten Lahat terus mengalami peningkatan, yaitu 10,4 %. Sebagian besar pengangguran pada tamatan pendidikan SMU. Tingkat pengangguran tertinggi ada di Kecamatan Lahat, Pendopo dan Tanjung Sakti. Persentase lapangan pekerjaan utama penduduk sebagian besar pada sektor primer (bidang pertanian) sebesar 79,8 %, selanjutnya di sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan restoran) 16,3 % dan di sektor sekunder (bangunan) yaitu 3,9 %.

3.5 Sosial Budaya

3.5.1 Pendidikan

Kondisi sosial budaya ditinjau dari komposisi SDM di suatu daerah. Berdasarkan data sensus, proporsi penduduk Kabupaten Lahat yang tidak tamat SD pada tahun 2003 sebesar 34,3%, tamat SD 32,3%, tamat SLTP 17,5%, tamat SMU 14,0% dan tamat Perguruan Tinggi 1,9%. Tahun 2003 penduduk yang buta huruf sebanyak 17 %. Kondisi pendidikan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada table III.4

TABEL III.4
KONDISI PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAHAT 2004

| No. | Uraian | Jlh(unit/Buah) | Murid | Guru |
|-----|----------------------------|----------------|-------|------|
| 1 | Play Group | 2 | | |
| 2 | Tk Negeri | 1 | | |
| 3 | TK Swasta | 29 | 1609 | 112 |
| 4 | SLB Negeri | 1 | 52 | 7 |
| 5 | SD Negeri | 473 | 73512 | 3888 |
| 6 | SD Swasta | 19 | 3254 | 145 |
| 7 | SLTP Negeri | 48 | 23601 | 265 |
| 8 | SLTP Swasta | 19 | 2554 | 627 |
| 9 | SLTA Negeri | 17 | 8691 | 170 |
| 10 | SLTA Swasta | 9 | 1989 | 469 |
| 11 | SMK Negeri | | 737 | 189 |
| 12 | SMK Swasta | | 1407 | 97 |
| 13 | Perguruan Tinggi Swasta | 3 | 201 | 97 |
| 14 | Madrasah ibtidaiyah Negeri | 5 | 653 | 55 |
| 15 | Madrasah Ibtidaiyah Swasta | 10 | 1849 | 151 |
| 16 | Mts Negeri | 5 | 1321 | 127 |
| 17 | Mts Swasta | 6 | 940 | 177 |
| 18 | Madrasah Aliyah Negeri | 2 | 1111 | 91 |
| 19 | Madrasah Aliyah Swasta | 1 | 269 | 72 |

Sumber: BPS Kabupaten Lahat, 2004

3.5.2 Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Lahat yang memeluk Agama Islam sebesar 99,44 % pada tahun 2002, sedangkan sisanya memeluk Agama Kristen sebesar 0,15 %, Protestan sebesar 0,19, Budha sebesar 0,066 dan Agama Hindu sebesar 0,08 %. Sampai dengan akhir tahun 2002, jumlah masjid yang ada sebanyak 705 unit, musholah 48 unit, langgar 160 unit, gereja 6 unit, wihara 1 Unit.

3.5.3. Kesehatan

Derajat kesehatan di Kabupaten Lahat diindikasikan dari Angka Kematian Bayi (AKB), Neo Natal serta Angka Kematian Ibu (AKI) yang

menggambarkan status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, angka pelayanan kesehatan, terutama pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan dan masa nifas. Di Kabupaten Lahat angka kematian bayi berkisar 5,03%, angka kematian ibu melahirkan 8-9 orang pada 100.000 kelahiran, dan gangguan kesehatan lainnya rata-rata 12,6%.

Pemanfaatan pelayanan kesehatan Kabupaten Lahat dapat dilihat dari sebagian besar penduduk memanfaatkan pelayanan Bidan desa 52%, puskesmas 23,3%, Rumah Sakit 16,7%, selebihnya adalah praktik swasta. Tetapi ada juga yang masih memanfaatkan tenaga dokter, yaitu sebanyak 3,3%.

TABEL III.5
RASIO TENAGA KESEHATAN PER-JUMLAH PENDUDUK
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN

| Jumlah Penduduk | Jumlah Pkm | Dr. Umum | | Dr. Gigi | | Paramedis Perawatan | |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|---------|
| | | Jml | Rasio | Jml | Rasio | Jml | Rasio |
| 570.760 | 30 | 40 | 1:14.269 | 4 | 1:142.690 | 515 | 1:1.108 |

Sumber: Bagian Tata Usaha Dinkes Kab. Lahat, 2007

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari Rumah Sakit 2 unit, puskesmas 28 unit, Pustu 95 unit, apotik 7 buah, rumah bersalin KIA swasta 3 buah, Posyandu AUTIS 523 buah, pusling 30 buah, polindes 291 buah, Lab Air dan balai pengobatan 7 buah. Jumlah Dokter Umum sebanyak 37 orang (3,55%), Dokter Spesialis 5 orang atau (10,48%), Dokter Gigi 4 orang (0,38%). Bidan 321 orang (30,83%), Perawat 194 orang (8,63%). Ahli Gizi 6 orang (0,58%), Ahli Kesehatan Lingkungan 13 orang (1,25%). Tenaga Farmasi 3 orang (0,29%), Tenaga Rontgen 3 orang (0,25%), SKM 7 orang (0,67%). Tenaga penyuluhan 448 (43,03%).

TABEL III.6
JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN LAHAT

| Tempat Pelayanan Kesehatan | | |
|-----------------------------|-----|------|
| Rumah Sakit Umum Type C | 1 | Unit |
| Rumah Sakit Umum TNI | 1 | Unit |
| Klinik Bersalin | 1 | Unit |
| Puskesmas | 28 | Unit |
| Puskesmas pembantu | 96 | Unit |
| KIA Swasta | 3 | Unit |
| Posyandu | 747 | Unit |
| Posyandu Aktif | 523 | Unit |
| Puskesmas Keliling | 30 | Unit |
| Polindes | 291 | Unit |
| Balai Pengobatan | 6 | Unit |
| Laboratorium dan Lingkungan | 1 | Unit |

Sumber: BPS Kabupaten Lahat, 2004

3.5.4 Kepariwisataaan

Pada dasarnya Kabupaten Lahat memiliki berbagai obyek pariwisata, yaitu



Sumber: Kabupaten Lahat 2007.

GAMBAR 3.1
LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN LAHAT

wisata alam, wisata budaya dan minat khusus yang potensial untuk dikembangkan. Obyek wisata alam dan buatan yang ada, yaitu:

1. Kecamatan Lahat, yaitu Taman Wisata Sungai Lematang, Taman Rekreasi Ribang Kemambang, Gua Suruman di Desa Batu Niding.
2. Kecamatan Pulau Pinang, Taman Rekreasi Ribang Gayau di Desa Terkul, Air Terjun Curup Panjang, Air Terjun Goa Laye di Desa Karang Agung, Goa Mensanap dan Air Terjun di Lekung Daun.
3. Kecamatan Kota Agung, yaitu Bukit Rancing di Desa Suka Raja, Air Terjun Embun di Tebat Bukit Gedung Agung.
4. Kecamatan Tanjung Sakti, yaitu Air Terjun dan Air Panas.
5. Kecamatan Jarai, yaitu Wisata Alam dan Ngarai.
6. Kecamatan Pendopo, yaitu Tebat Besar di Gunung Meraksa Baru.
7. Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu Wisata Air Terjun Jaya Loka, Air Panas Talang Padang, Wisata Alam Ulak Dabuk, Goa Bukit Balai.
8. Kecamatan Pasemah Air Keruh, yaitu Obyek Wisata Air Terjun, Air Panas, Danau dan Tugu Perjuangan Bambang Utoyo di Desa Nanjungan.
9. Kecamatan Merapi, yaitu Obyek Wisata Pelatihan Gajah dan Bukit Serelo di Desa Ulak Penantian Suka Cinta, Danau Putusan Sungai Lematang.
10. Kecamatan Kikim Tengah, yaitu Obyek Wisata Sepingtian di Desa Air Lingsing serta daerah perburuan yang berada di Kecamatan Kikim Selatan.

Untuk wisata budaya banyak terdapat batuan megalit yang tersebar hampir di tiap kecamatan. Untuk menunjang bidang pariwisata Pemerintah Kabupaten Lahat

berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana penunjang pariwisata, misalnya dengan pembangunan Hotel Bukit Serele.

3.5.5. Angkatan Kerja.

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lahat pada tahun 2004 berjumlah 425.158 orang yang sebagian besar merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat sebesar 213.387 orang terdiri dari 116.292 laki-laki dan 97.095 perempuan. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut 12.795 orang diantaranya sedang mencari pekerjaan. Dilihat karakteristiknya, angkatan kerja di Kabupaten Lahat sebagian besar berusia 15 – 29 tahun yang menunjukkan sebagai angkatan kerja muda. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Lahat tahun 2004 berjumlah 10.783 orang, terdiri dari 2.331 perempuan dan 8.446 orang laki-laki.

TABEL III.7
JUMLAH ANGKATAN KERJA DAN BUKAN ANGKATAN KERJA
DI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2004

| Jenis Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Laki – Laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. Angkatan Kerja | | | |
| A. Bekerja | 110.325 | 90.267 | 200.592 |
| B. Mencari Pekerjaan | 5.967 | 6.828 | 12.795 |
| II. Bukan Angkatan Kerja | | | |
| A. Sekolah | 40.576 | 35.982 | 76.555 |
| B. Mengurus Rumah Tangga | - | 90.405 | 90.405 |
| C. Lainnya | 26.388 | 18.423 | 44.811 |
| Jumlah 2004 | 183.253 | 241.905 | 425.158 |
| 2003 | 182.535 | 237.332 | 419.867 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Lahat, 2004

3.6 Pertanian

Pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilakukan pemerintah diarahkan pada sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi lebih penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar.



Sumber: Kabupaten Lahat, 2007

GAMBAR 3.2
KOMODITI DI KABUPATEN LAHAT

Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Lahat pada tahun 2004, produksi tanaman bahan makanan padi sawah Kabupaten Lahat mencapai 178,344.68 ton, sedangkan pada tahun 2003 produksi padi sawah di Kabupaten Lahat sebesar 155,334.76 ton. Angka ini menunjukkan dalam satu tahun terakhir produksi padi sawah naik 14.8 persen. Adapun produksi padi ladang pada tahun 2004 dibandingkan tahun sebelumnya naik sebesar 13.28 persen.

Subsektor Perkebunan

Komoditas perkebunan besar di Kabupaten Lahat yang menghasilkan produksi adalah komoditas kelapa sawit dan karet. Pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Lahat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) perkebunan yang usahanya dilakukan oleh masyarakat sendiri yang dikenal dengan perkebunan rakyat, (2) perkebunan yang usahanya dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum yang dikenal dengan perkebunan besar.

Produksi kopi pada tahun 2004 sebesar 43,222,7 ton dan pada tahun 2003 sebesar 57.697,55 ton. Hal ini berarti dalam satu tahun mengalami penurunan produksi 25,1 persen. Produksi karet mengalami penurunan hanya 0,18 persen, begitu juga dengan tanaman lada mengalami penurunan sebesar 23,1 persen. Adapun peningkatan yang terbesar adalah tanaman kelapa sebesar 72,6 persen.

Subsektor Kehutanan

Pada tahun 2003, Kabupaten Lahat memiliki luas wilayah hutan sebesar 661.807 Ha, yang terdiri dari hutan tetap sebesar 219.904,70 Ha. Adapun hutan menurut penggunaannya sebesar 441.902,30 Ha, yang dirinci menurut fungsinya sebagai berikut:

- Hutan Lindung 113.447,70 Ha.
- Hutan Produksi tetap 41.747,00 Ha.
- Hutan Produksi Terbatas 11.881,00 Ha.
- Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 52.889,00 Ha.

Hutan lindung yang ada di Kabupaten Lahat dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok terdiri dari:

1. Bukit. : 67,776 Ha.
2. Gunung Patah : 45,254 Ha.
3. Bukit Balai : 13,825 Ha.
4. Gumai Tb.Tinggi : 50 Ha.
5. Isau-Isau : 1.850 Ha.
6. Bukit Sereho : 401 Ha.
7. Bukit Naval : 169 Ha.

Sub Sektor Peternakan

Padat tahun 2004 populasi ternak kerbau mengalami peningkatan dari 7.106 ekor tahun 2003 menjadi 7.249 ekor pada tahun 2004, sedangkan ternak sapi meningkat sebesar 1,99 persen. Ternak kecil mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga ternak unggas seperti ayam kampung (buras), ayam ras, dan itik/bebek/angsa, mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sub Sektor Perikanan

Tahun 2004 luas area perikanan di Kabupaten Lahat sebesar 2.994,64 Ha, yaitu sebesar 2.994.14 Ha. Produksi ikan segar meningkat menjadi 4.639,46 ton pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 4,36 persen. Produksi ikan terbesar di Kecamatan Tanjung Sakti, yaitu sebesar 593,62 ton.

3.7 Industri, Pertambangan, Listrik dan Air Minum

Pembangunan industri yang dilaksanakan bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor menunjang pembangunan di daerah, memanfaatkan sumber dan energi serta sumber daya manusia.

Jumlah perusahaan industri 2004 sebanyak 1.900 unit usaha yang terdiri dari industri hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 1.414 unit usaha dan aneka industri sebanyak 486 unit usaha. Dari keseluruhan unit usaha yang ada, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.622 orang. Akan tetapi, besarnya investasi tahun 2004 sebesar 5.455,7 juta dan nilai produksi sebesar 10.920,5 juta menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,91 persen dan 1,38 persen.

Perkembangan produksi bahan galian golongan C beberapa tahun ini selalu meningkat. Pada tahun 2003 produksi bahan galian golongan C meningkatkan 117,8 persen dari tahun sebelumnya hanya mencapai 146,350M³. Hasil produksinya sebanyak 60 persen lebih ada di Kecamatan Merapi.



Sumber: Observasi lapangan, 2007

GAMBAR 3.3
GALIAN C DI SUNGAI LEMATANG

Tenaga Listrik yang berhasil diproduksi oleh PLN di Kabupaten Lahat pada tahun 2004 sebesar 54.891.940 Kwh. Dari keseluruhan tenaga listrik yang diproduksi, yang berhasil terjual sebanyak 51.098.501Kwh (93,09 persen) dengan jumlah pelanggan sebanyak 60.715 pelanggan. Dari banyaknya pelanggan, 60.475 adalah pelanggan rumah tangga dan 240 adalah instansi.

Banyaknya air yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lahat tahun 2004 sebesar 1.741.464,72 M³, sedangkan banyaknya air yang terjual sebanyak 1.258.670M³ (72 persen) dari total air yang disalurkan. Jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Lahat pada tahun 2004 sebanyak 5.127 pelanggan yang terdiri dari rumah tempat tinggal 4.594, badan sosial 54 pelanggan, instansi pemerintah 111 buah perusahaan, pertokoan dan industri sebanyak 368 pelanggan. Berdasarkan pengguna air pada tahun 2004 terlihat bahwa kelompok rumah tangga merupakan pengguna air PDAM terbesar, yaitu sebanyak 1.064.675 M³ atau sebesar 84,59 persen.

3.8 Perdagangan

Selama tahun 2004 jumlah wajib daftar perusahaan di Kabupaten Lahat sebanyak 92 perusahaan. Dari jumlah tersebut 48,9 persen berbentuk Perusahaan Dagang (PD), 21,74 persen berbentuk CV, dan 7,61 persen berbentuk PT, sementara sisanya berbentuk koperasi. Selama tahun 2003 SIUP yang diterbitkan sebanyak 272 lembar, sedangkan pada tahun 2004 banyaknya SIUP yang diterbitkan sebanyak 490 lembar, berarti mengalami kenaikan sebesar 80,8 persen untuk usaha di Kecamatan Lahat.

Jumlah pasar di Kabupaten Lahat selama tahun 2004 sebanyak 59 pasar, terdiri dari 51 pasar merupakan jenis kalangan, pasar inpres tiga buah dan pasar swadaya 5 lima buah, sedangkan jumlah pasar yang mempunyai kapasitas ruko dan kios terbanyak adalah Pasar Lematang, yaitu 48 ruko, dan 561 kios.

3.9 Perhubungan dan Komunikasi

Kabupaten Lahat pada tahun 2004 memiliki ruas jalan sepanjang 1,076.97 Km, yang berarti mengalami kenaikan kurang lebih 0,65 persen dari tahun sebelumnya. Dari panjang jalan tersebut sebanyak 48,27 persen sudah diaspal dan 46,15 persen dalam keadaan baik. Adapun panjang jembatan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sepanjang 2,140.7 m.

TABEL III.8
PANJANG JALAN MENURUT LAPISAN PERMUKAAN (KM)

| No | Kecamatan | Lapisan Permukaan | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Aspal | Kerikil | Tanah |
| 1 | Tanjung Sakti | 30,00 | 7,00 | - |
| 2 | Kota Agung | 10,30 | 31,40 | 19,00 |
| 3 | Mulak Ulu | 5,00 | - | - |
| 4 | Pulau Pinang | 88,40 | 5,00 | 15,30 |
| 5 | Jarai | 30,60 | 2,50 | 24,00 |
| 6 | Pajar Bulan | 7,40 | 18,00 | - |
| 7 | Muara Pinang | 5,50 | 22,10 | - |
| 8 | Lintang Kanan | - | 16,50 | - |
| 9 | Pendopo | 32,90 | - | 29,50 |
| 10 | Ulu Musi | 24,40 | 34,00 | 8,00 |
| 11 | Pasemah Air Keruh | 10,60 | 12,00 | - |
| 12 | Tebing Tinggi | 34,50 | 45,20 | 7,00 |
| 13 | Talang Padang | 15,00 | - | - |
| 14 | Kikim Barat | 24,20 | 27,70 | - |
| 15 | Kikim Timur | 36,00 | 90,50 | 20,00 |
| 16 | Kikim Selatan | 39,17 | 9,00 | - |
| 17 | Kikim Tengah | 15,20 | 51,30 | - |
| 18 | Lahat | 74,20 | 55,60 | 1,50 |
| 19 | Merapi | 36,50 | - | 5,00 |
| Jumlah | | 519,87 | 427,80 | 129,30 |

Sumber: BPS Kabupaten Lahat, 2004.

Data SK.133 Perumka Lahat tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah jembatan, stasiun, perlintasan dan panjang rel kereta api di Kabupaten Lahat sebagai berikut:

- Panjang Rel : 126 Km.
- Jembatan : 26 buah.
- Stasiun : 8 buah.
- Perlintasan
 - Berpalang : 4 buah.
 - Tidak berpalang : 15 buah.

Jumlah kendaraan yang diuji pada Dinas LLAJ Kabupaten Lahat selama tahun 2004 sebanyak 2,283 kendaraan. Dari jenis kendaraan yang diuji tersebut, mobil barang sebanyak 1.790 kendaraan, mobil bus mencapai 174 kendaraan, mobil penumpang umum sebanyak 258 kendaraan, serta mobil khusus sebanyak 61 kendaraan. Jumlah hotel di Kabupaten Lahat pada tahun 2004 tercatat sebanyak delapan buah dengan fasilitas kamar dan tempat tidur dari hotel-hotel tersebut tercatat pada tahun 2004 sebanyak 260 buah kamar dan 260 tempat tidur.

3.10 Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan distribusi PDRB atas`dasar harga berlaku tahun 2004 (tanpa migas) menunjukkan sektor pertanian mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat, yaitu sebesar 41,03 persen disusul sektor jasa-jasa sebesar 11,79 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran di urutan ketiga sebesar 11,39 persen. Berikutnya sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,21 persen, kemudian sektor bangunan 9,60 persen, sedangkan sektor industri pengolahan, sektor keuangan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta

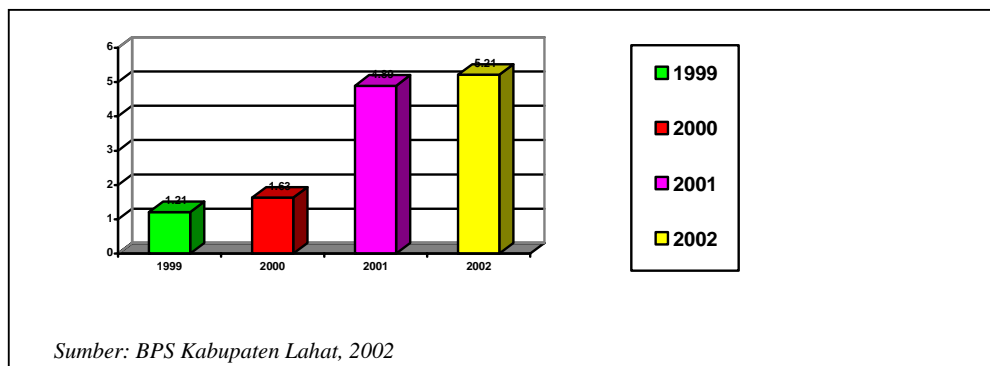
sektor listrik dan air bersih secara berurutan masing masing sebesar 7,87 persen, 4,37 persen, 2,53 persen serta 0,22 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2004 dengan migas mencapai 5,37 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tanpa memasukkan migas tumbuh sebesar 4,88 persen. Nilai ini naik sebesar 0,33 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang menggambarkan kondisi perekonomian pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sejak 1999 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan sebesar -7,44 % setelah melalui tahap pemulihan (*recovery*). Tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat sebesar 5,21%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 1999 meningkat menjadi 1,21 %, kemudian tahun 2000 kembali mengalami kenaikan menjadi 1,63 %.

Demikian juga pada tahun 2001 dan 2002 dimana laju pertumbuhan ekonomi cukup meyakinkan, yaitu mencapai 4,89 % dan 5,21 %. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2003 didukung oleh tingginya laju pertumbuhan sektor listrik, dan air bersih yang mencapai 8,48 % terutama subsektor listrik. Selanjutnya di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,31 % disusul sektor komunikasi dan transportasi yang didukung oleh angkutan rel kereta api mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2001 sebesar 3,36 %. Adapun sektor yang mengalami penurunan berada pada sektor jasa-jasa sebesar hanya 1,94 %. Pada tahun hotel dan restoran dari 5,78 % pada tahun 2001 turun menjadi 4,30

% pada tahun 2003 dan bangunan tahun 2001 sebesar 11,18 % yang turun drastis pada tahun 2002 sebesar 6,77 %.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat dalam kurun waktu periode 1999 sampai 2002 dapat dilihat pada Gambar 3.1 sedangkan kontribusi persektor dalam PDRB dapat dilihat pada Tabel III. 9



GAMBAR 3.4
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. LAHAT TAHUN 1999-2002

TABEL III.9
PERTUMBUHAN SEKTOR DALAM PDRB
KABUPATEN LAHAT 1999-2002

| No. | Lapangan Usaha | 1999 (%) | 2000 (%) | 2001 (%) | 2002 (%) |
|-----|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Pertanian | 3.27 | 6.81 | 5,60 | 5,61 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 2.59 | 1.95 | 5.68 | 6.31 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.11 | -3.88 | 0.81 | 4.93 |
| 4 | Listrik, gas, dan air bersih | -7.18 | -0.26 | 7.52 | 8.48 |
| 5 | Bangunan | 1.42 | -6.06 | 11.18 | 6.77 |
| 6 | Perdagangan, hotel & restoran | -3.62 | -4.95 | 5.78 | 4.30 |
| 7 | Pengangkutan dan komunikasi | 0.79 | 2.69 | 1.79 | 5.89 |
| 8 | Bank, Keu, sewaan & jasa per | -2.88 | 4.07 | 0.79 | 5.40 |
| 9 | Jasa-jasa | 2.35 | 2.98 | 3.17 | 1.94 |

Sumber: BPS Kabupaten Lahat, 2002

Pendapatan regional perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar biaya faktor dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan perkapita Kabupaten Lahat menunjukkan angka meningkat selama periode 2001 – 2004.

3.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku maupun konstan 1993 terlihat meyakinkan. Berdasarkan harga berlaku PDRB perkapita tahun 1999 sebesar Rp 2.778.083,60 tahun 2003 mencapai Rp. 4.000.798,90 Adapun menurut harga konstan tahun 1999 tercatat sebesar Rp. 1.092.540,50 dan tahun 2003 mencapai Rp.1.247.612,20. Untuk pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku 1999 sebesar Rp. 2.432.518,30, sedangkan tahun 2003 mencapai Rp.3.563.543,80. Peranan masing-masing sektor secara umum dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat masih didominasi sektor pertanian, pertambangan dan penggalian (primer), yaitu sebesar 47,64 % pada tahun 2003, selanjutnya sektor tersier, seperti perdagangan, pengangkutan dan jasa sebesar 31,42 % dan sektor sekunder seperti industri pengolahan listrik dan bangunan.

3.12 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Lahat tahun 2004 mencapai 4.709.426, rupiah (dengan migas), dan pendapatan perkapita tanpa migas sebesar 4.594.101 rupiah.

Tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan regional perkapita. Adapun tingkat kemakmuran suatu daerah dilihat dari pendapatan regional dan pajak daerah. Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi sudah tentu akan menaikkan pendapatan perkapita

masyarakat. Pada tahun 1999 pendapatan perkapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2.432.518,3,00 meningkat menjadi Rp. 2.801.728,8 pada tahun 2000, Rp. 3.124.617,3 pada tahun 2001, dan pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi Rp. 3.563.543,8,00. Indikasi ini merupakan peluang bagi penanam modal (investor), karena dengan meningkatnya pendapatan perkapita berarti meningkat pula daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

PDRB menurut harga tahun dasar (*constant price*) memberikan gambaran besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan masing-masing sektor memberikan indikator tentang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi setiap bidang. Jika dirinci menurut bidang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat Tahun 1993 dan tahun 2002 berdasarkan harga konstan 1993 dapat dilihat pada Tabel III.10

TABEL III. 10
PERTUMBUHAN PDRB PER-BIDANG
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
TAHUN 1999-2002

| No | Sektor/Bidang | 1999 (%) | 2000 (%) | 2001 (%) | 2002 (%) |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Pertanian | 3.27 | 6.81 | 5.60 | 5.61 |
| 2 | Pertambangan &Penggalian | 2.59 | 1.95 - | 5.68 | 6.31 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.11 - | 3.88 - | 0.81 | 4.93 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | 7.18 | 0.26 - | 7.52 | 8.48 |
| 5 | Bangunan | 1.42 - | 6.06 - | 11.18 | 6.77 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 3.62 | 4.95 | 5.78 | 4.30 |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi | 0.79 - | 2.69 | 1.79 | 5.89 |
| 8 | Bank dan Keuangan | 2.88 | 4.07 | 0.79 | 5.40 |
| 9 | Jasa-jasa | 2.35 | 2.98 | 3.17 | 1.94 |
| PDRB Total | | 1.21 | 1.63 | 4.89 | 5.21 |

Sumber: BPS kabupaten lahut, 2003

Kabupaten Lahat merupakan daerah pertanian, sebab bidang pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten, terutama tanaman perkebunan, seperti kopi, karet dan kelapa sawit serta pertanian tanaman pangan. Sepertinya ke depan dibutuhkan perhatian yang cukup besar terhadap faktor-faktor produksi tanaman pangan, seperti perbaikan jaringan irigasi, penyediaan bibit komoditas andalan yang mempunyai ciri khas daerah, seperti tanaman padi “Surya”, tanaman “ jagung manis” hingga menjadikan Kabupaten Lahat swasembada pangan. Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Lahat tahun 2002 atas dasar harga berlaku adalah Rp.3,6 juta, meningkat sebesar 46,5 % dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar Rp. 2,4 Juta. Adapun secara riil berdasarkan atas harga konstan 1993 pada tahun 2002 sebesar Rp.1,06 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 14,9 % dibandingkan dengan Pendapatan Regional Perkapita tahun 1999 sebesar Rp. 0,9 Juta. Hal ini berarti diperlukan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur serta sarana pendukung investasi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, jelas bahwa penanaman modal (investasi) di daerah ini merupakan tantangan dan sekaligus juga peluang bagi dunia usaha untuk pertumbuhan yang lebih baik lagi.

Indikator lain yang dapat mewujudkan perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan perkapita. Data pendapatan perkapita Kabupaten Lahat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sampai dengan tahun 2002 total pendapatan asli daerah sebesar Rp.7.078.103.608,71,00 (89,45%) dan meningkat cukup besar menjadi Rp.10.138.541.729,10 atau sekitar 89 %. Bagi sektor swasta indikasi ini

merupakan suatu peluang bahwa penduduk di wilayah ini merupakan pasar yang baik bagi penanam modal (investor), karena dengan meningkatnya pendapatan perkapita berarti pula peningkatan daya beli masyarakat bagi produk yang dihasilkan. Berdasarkan uraian terdahulu disimpulkan bahwa kondisi ekonomi wilayah Kabupaten Lahat masih didominasi oleh bidang pertanian. Proses transformasi produk baru pada tahap transformasi primer yang mengarah ke sekunder dengan nilai tambah yang belum optimal. Namun demikian pada sektor industri, transformasi strukturnya sudah mengarah ke nonpertanian. Dengan demikian, secara ekonomis Kabupaten Lahat memiliki potensi, baik pertanian maupun nonpertanian yang prospektif.

BAB IV

ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

Penelitian tentang perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran dengan mengkaji perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat. Penelitian melalui survei primer dan sekunder, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada variabel penelitian yang telah ditentukan, yaitu variabel karakteristik ekonomi, variabel karakteristik penduduk dan variabel tingkat pelayanan infrastruktur.

4.1 Analisis Perkembangan Ekonomi

Variabel perekonomian yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah diukur berdasarkan produktivitas, perubahan struktur ekonomi dan perubahan taraf hidup masyarakat yang akan mendorong terjadinya transformasi pada lapangan kerja, terutama perubahan mata pencaharian penduduk dari sektor primer, ke sektor sekunder dan tersier. Adanya peningkatan produksi komoditas wilayah tersebut mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat wilayah itu sendiri. Struktur ekonomi merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah, dimana beralihnya mata pencaharian masyarakat suatu daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan keluarga dan pola konsumsi masyarakat, baik meningkat ataupun menurun.

4.1.1 Analisis Struktur Ekonomi

Kabupaten Lahat sebagai daerah berbasis pertanian, lapangan kerja utama penduduknya adalah sektor primer (pertanian). Hampir 80 persen pekerja di Kabupaten Lahat bekerja di sektor pertanian, sedangkan lebih dari 17 persen pekerja yang bekerja di sektor sekunder. Persentase penduduk yang bekerja di sektor primer mengalami penurunan yang tidak begitu berarti dibanding tahun 2003. Adapun sektor tersier justru mengalami penurunan, namun sebaliknya, sektor sekunder mengalami peningkatan yang sangat besar. Dengan demikian terlihat bahwa dalam kurun waktu 2003-2005 terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor tersier ke sektor sekunder. Perkembangan perekonomian setiap kecamatan di Kabupaten Lahat diindikasikan dengan terjadinya transformasi bidang pekerjaan dari primer ke sekunder dan sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, antara lain terjadinya alih lapangan pekerjaan dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebelum pemekaran wilayah, sebagian besar masyarakat (80%) bekerja pada sektor primer (pertanian), yaitu antara tahun 1990–1998, namun setelah tahun 2000 komposisi pekerja yang berada di kecamatan mengalami peralihan ke sektor sekunder. Hal ini terlihat dengan meningkatnya persentase pekerja sektor sekunder sebesar 17%. Pergeseran ini didorong oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada di setiap kecamatan. Hal ini pula mencerminkan adanya peningkatan pada sektor pembangunan serta mencerminkan adanya peningkatan modal, terutama dari alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

TABEL .IV.1
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

| KECAMATAN | | LAPANGAN KERJA | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| | | Sektor Primer | | | Sektor Sekunder | | | Sektor Tersier | | |
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Kec. Tanjung Sakti. | 90.7 | 88.2 | 85.6 | 0.5 | 2.9 | 5.2 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
| 2 | Kec. Kota Agung | 95.7 | 95.5 | 95.3 | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 1.2 |
| | Kec. Mulak Ulu | 98.1 | 98.4 | 98.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 |
| 3 | Kec. Pulau Pinang | 89.9 | 78.7 | 67.4 | 5.0 | 16.7 | 28.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 |
| 4 | Kec. Jarai | 90.7 | 86.2 | 81.7 | 0.0 | 8.1 | 16.1 | 9.3 | 5.8 | 2.2 |
| | Kec. Pajar Bulan | 98.0 | 95.4 | 92.8 | 0.0 | 2.3 | 4.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| 5 | Kec. Muara Pinang | 89.4 | 85.2 | 80.9 | 0.8 | 7.2 | 13.6 | 9.8 | 7.6 | 5.4 |
| | Kec. Lintang Kanan | 93.3 | 92.1 | 90.8 | 0.0 | 3.8 | 7.5 | 6.7 | 4.2 | 1.7 |
| 6 | Kec. Pendopo | 78.1 | 83.6 | 89.1 | 0.5 | 4.1 | 7.7 | 21.4 | 12.3 | 3.2 |
| 7 | Kec. Ulu Musi | 97.1 | 96.5 | 95.9 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 2.9 | 1.7 | 0.5 |
| | Kec. Pasemah Air Keruh | 99.1 | 94.9 | 90.6 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.9 | 2.7 | 4.4 |
| 8 | Kec. Tebing Tinggi | 74.7 | 66.7 | 58.7 | 7.1 | 19.9 | 32.6 | 18.2 | 13.5 | 8.7 |
| | Kec. Talang Padang | 95.0 | 92.5 | 90.0 | 0.0 | 5.0 | 9.9 | 5.0 | 2.6 | 0.1 |
| 9 | Kec. Kikim Barat | 96.3 | 88.8 | 81.3 | 0.0 | 5.2 | 10.3 | 3.7 | 6.1 | 8.4 |
| | Kec. Kikim Timur | 93.2 | 86.2 | 79.1 | 0.0 | 5.5 | 10.9 | 6.8 | 8.5 | 10.1 |
| | Kec. Kikim Tengah | 95.7 | 93.6 | 91.4 | 0.0 | 3.1 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 2.5 |
| | Kec. Kikim Selatan | 93.5 | 90.4 | 87.2 | 0.0 | 5.8 | 11.6 | 6.5 | 3.9 | 1.3 |
| 10 | Kec. Lahat | 14.4 | 22.5 | 30.5 | 15.3 | 33.2 | 51.1 | 70.3 | 44.4 | 18.4 |
| 11 | Kec. Merapi | 81.2 | 89.6 | 97.9 | 11.9 | 6.2 | 0.5 | 6.9 | 4.3 | 1.6 |
| | Kab.Lahat | 79.8 | 78.1 | 76.3 | 3.9 | 10.6 | 17.2 | 16.3 | 11.4 | 6.5 |

Sumber Hasil Analisis, 2008

Berdasarkan status pekerjaannya, terjadi kecenderungan transformasi struktur ekonomi, dimana pada Tabel IV.1 terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dari tahun 2003–2005. Sebaliknya, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor sekunder. Hal ini mencerminkan terjadinya transformasi lapangan usaha dan mengindikasikan perubahan ekonomi, baik meningkat ataupun menurun. Menurunnya persentase pekerja sektor primer ini berarti meningkatnya sektor sekunder dan tersier dalam hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan perekonomian suatu wilayah kecamatan.

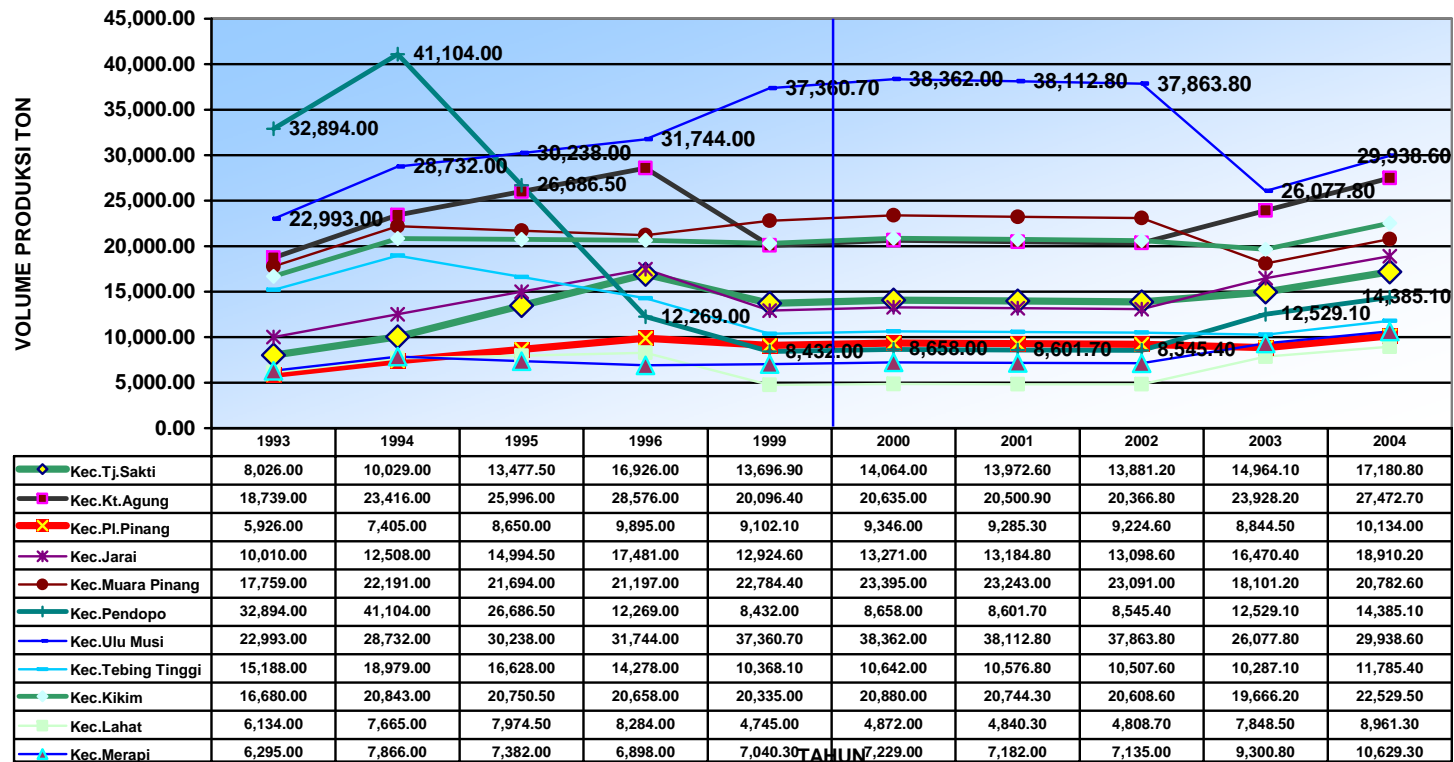
Sebelum pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 1990-1998, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor primer (pertanian). Namun setelah tahun 2000, komposisi pekerja di Kabupaten Lahat beralih ke sektor sekunder. Hal ini mencirikan adanya perkembangan perekonomian di kecamatan tersebut.

4.1.2 Produktivitas Ekonomi Kecamatan

Produktivitas wilayah kecamatan merupakan variabel ekonomi yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Pada tahun 2003 hingga tahun 2004 mayoritas penduduk Kabupaten Lahat bekerja pada sektor primer dengan komposisi sebesar 80%. Dengan demikian, pendapatan masyarakat terutama berasal dari komoditas pertanian, peternakan dan perikanan air tawar. Produktivitas merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan perekonomian kecamatan di Kabupaten Lahat. Sebagai asumsi, nilai ekspor daerah kecamatan dapat meningkatkan perekonomian serta perkembangan kecamatan. Produktivitas wilayah Kabupaten Lahat akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat masing-masing kecamatan, sehingga komposisi kelompok

konsumsi keluarga mencerminkan dan mengindikasikan terjadinya perkembangan ekonomi. Gambar 4.1 menggambarkan perkembangan yang terjadi di setiap kecamatan pada tahun 1993 hingga 2004. Tabel IV.1 menunjukkan bahwa pada tahun 1993 hingga 1996 produksi beras tampak lebih tinggi bila dibandingkan dengan setelah tahun 2000 hingga 2004, Kondisi ini mempengaruhi perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan dari sektor pertanian. Jumlah produksi yang terbatas dan tidak disertai dengan peningkatan jumlah produksi akan berpengaruh pada kenaikan harga jual, sehingga akan melemahnya daya beli. Fenomena ini bila terjadi setiap tahun akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam wilayah kinerja kecamatan yang kurang produktif, serta berpenduduk yang relatif padat akan lebih berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Dengan demikian diketahui bahwa perkembangan perekonomian wilayahnya yang didasarkan pada produktivitas yang didukung oleh adanya peningkatan persentase tingkat konsumsi masyarakat setiap kecamatan.

Diketahui pula bahwa setelah tahun 2000 hingga 2004 peningkatan produksi beras relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah produksi beras yang terjadi pada tahun 1993. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan produksi secara total yang memerlukan penggulungan secara seksama untuk meningkatkan produksi beras, dengan melakukan intensifikasi lahan pertanian yang didukung oleh sistem.

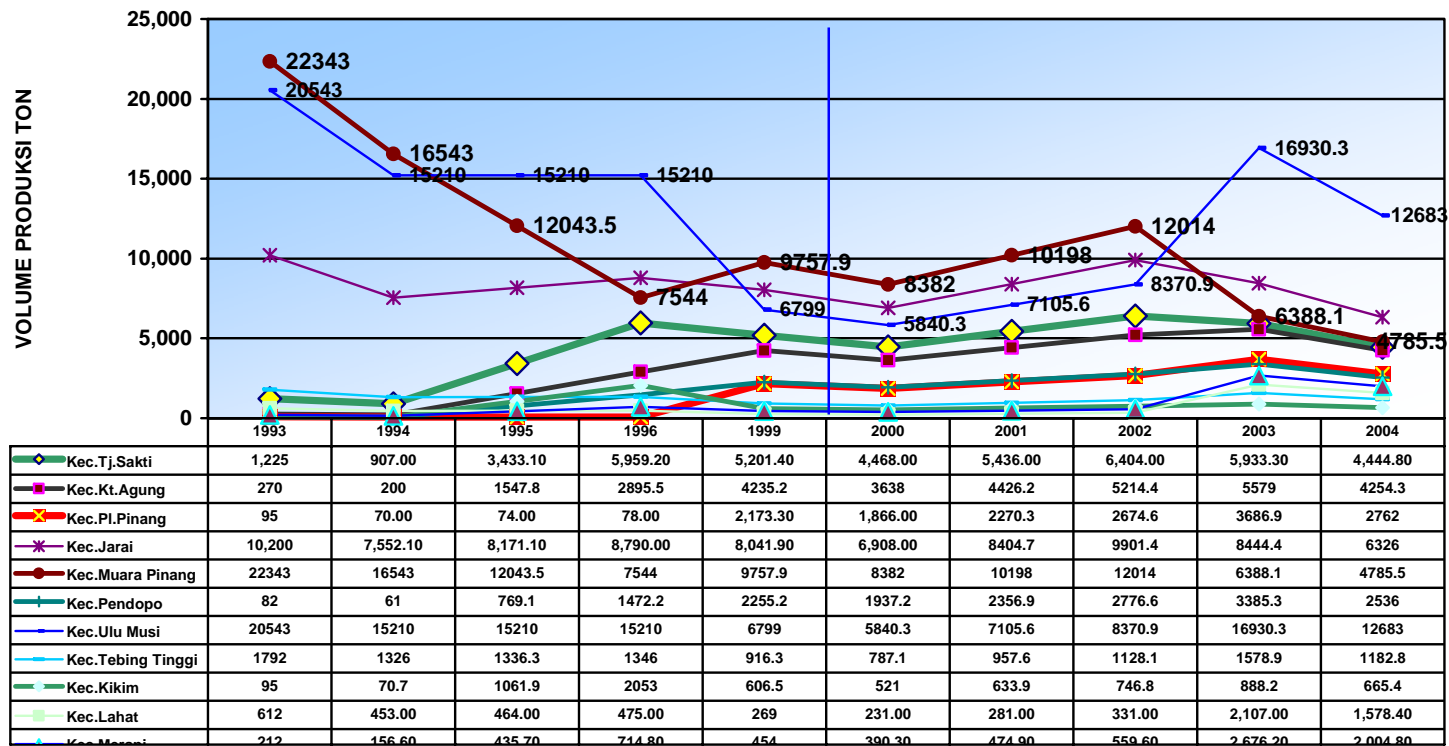


Sumber : Hasil Analisis 2008

GAMBAR 4.1
GRAFIK PRODUKSI BERAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

Dari Gambar 4.1 di atas tercermin bahwa sebelum pemekaran wilayah kabupaten, hasil pertanian berupa beras relatif lebih besar, akan tetapi setelah pemekaran wilayah produksi hasil pertanian padi cenderung menurun. Pada akhirnya, hal tersebut mempengaruhi pendapatan dan tingkat konsumsi keluarga pada sebagian besar kecamatan, antara lain: Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo dan Ulu Musi. Adapun untuk kecamatan lainnya cenderung mendatar, yang berarti kesejahteraan akibat adanya faktor nonekonomi, seperti penambahan penduduk akan mendorong *demand*, sehingga harga pasar meningkat.

Produksi kedua yang dominan di kecamatan dalam Kabupaten Lahat adalah produksi hasil perkebunan berupa biji kopi yang merupakan komoditas unggulan bagi Kabupaten Lahat. Dalam memenuhi permintaan pasar, biji kopi mempunyai harga yang cukup baik, sehingga hasil perdagangan kopi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi kecamatan di Kabupaten Lahat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4.2



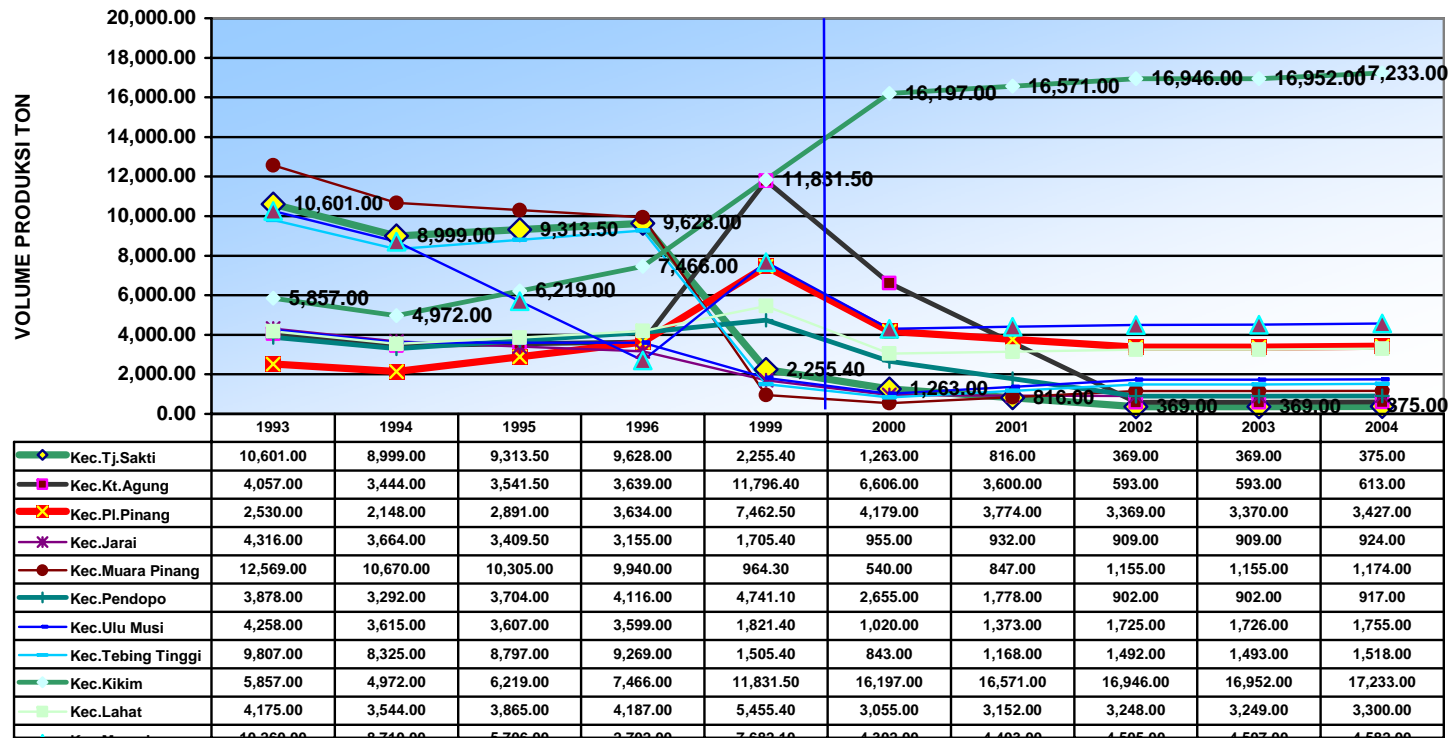
Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR.4.2
GRAFIK PERKEMBANGAN PRODUKSI KOPI KECAMATAN
KABUPATEN LAHAT

Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa produksi kopi yang tertinggi terjadi sebelum pemekaran wilayah. Kecamatan yang produksinya tertinggi adalah Kecamatan Muara Pinang sebesar 22.343 ton pada tahun 1993. Namun, setelah pemekaran turun menjadi 4785 ton pada tahun 2004. Produksi kopi Kecamatan Ulu Musi pada tahun 1993 adalah sebesar 20.537 ton, namun setelah pemekaran turun menjadi 12.683 ton pada tahun 2004. Kecamatan Jarai mempunyai produksi kopi yang relatif konstan dari sebelum hingga sesudah pemekaran, yaitu berkisar pada 7500 ton pertahun.

Produksi kopi yang relatif kecil terjadi pada Kecamatan Merapi dan Kecamatan Lahat. Hal ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kepadatan penduduk. Sebanyak 69,5% penduduk Kecamatan Lahat bekerja pada sektor nonpertanian, seperti industri dan perdagangan. Hal tersebut terjadi karena kecamatan tersebut terletak pada jalur yang strategis, dan menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Dengan demikian, perkembangan perekonomian kedua kecamatan tersebut relatif cepat, walaupun tidak didukung oleh produktivitas sektor pertanian.

Produksi peternakan juga cukup baik dalam perekonomian, karena masih terdapatnya lahan yang luas, yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam perkembangannya, terjadi penurunan produksi peternakan yang terjadi hampir di seluruh kecamatan. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan meningkatkan harga penjualan, walaupun di sisi lain juga dapat mengurangi suplai produksi daging. Untuk mengetahui perkembangan produksi ternak besar dapat dilihat pada Gambar 4.3.

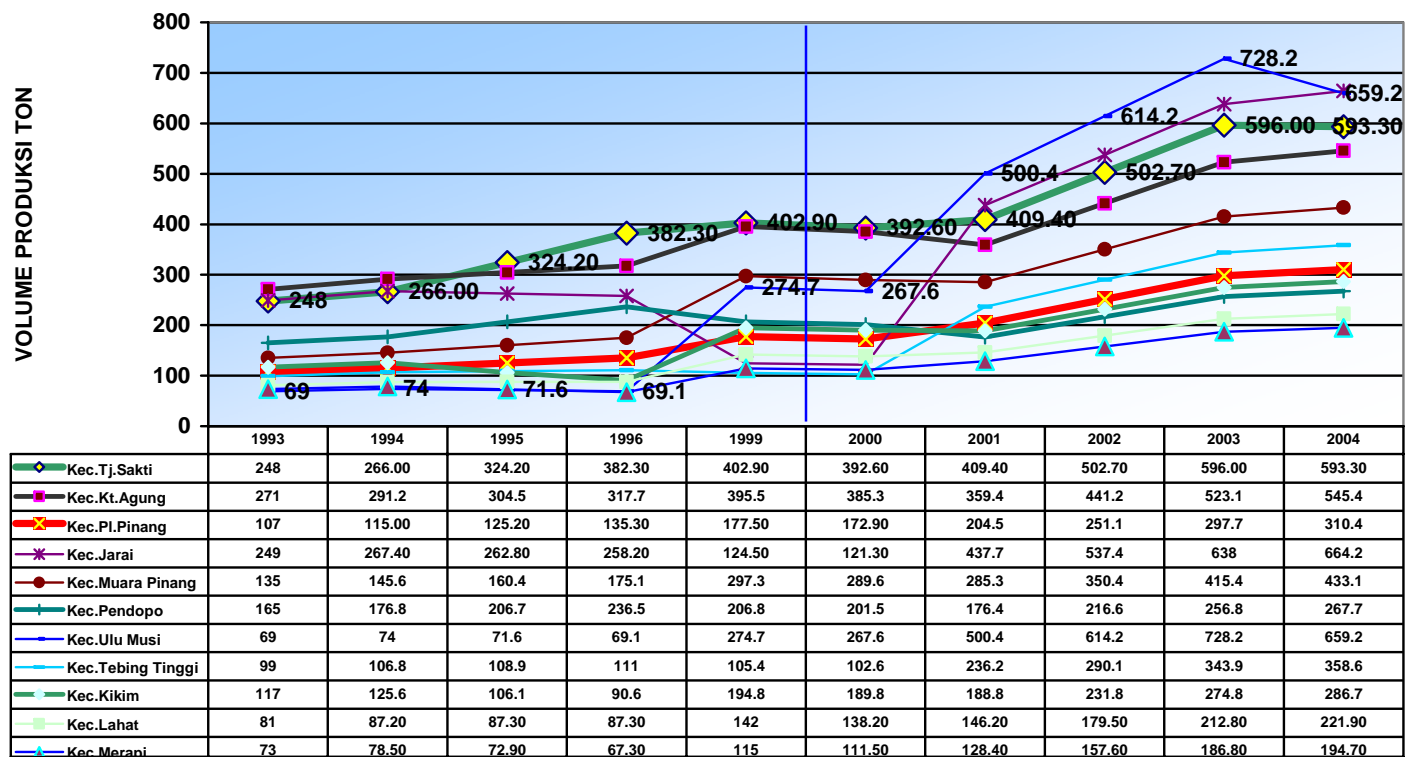


Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 4.3
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH TERNAK BESAR
DI KECAMATAN KABUPATEN LAHAT

Kabupaten Lahat masih mempunyai banyak hutan lindung yang merupakan sumber air alami bagi alam sekitarnya. Banyaknya sumber air yang mengalir, seperti sungai dan anak sungai serta danau memungkinkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lahat dapat mengembangkan hasil perikanan air tawar. Produksi ikan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik untuk dikembangkan adalah jenis ikan mas, ikan mujair, ikan nilam dan ikan gurami.

Perkembangan produksi hasil perikanan yang terjadi di kecamatan di Kabupaten Lahat pada setiap tahunnya dapat dilihat pada Gambar 4.4. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebelum pemekaran perikanan belum terlalu dikembangkan, sehingga produksi hasil ikan air tawar setiap tahun relatif kecil. Akan tetapi, setelah pemekaran pada tahun 2001 produksi hasil perikanan air tawar cenderung meningkat. Hal ini mengingat perkembangan perikanan relatif lebih cepat dan bernilai ekonomi. Kecamatan yang memiliki produksi ikan air tawar yang relatif tinggi adalah Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Jarai dan Tanjung Sakti, mengingat daerah ini banyak terdapat sawah dan perbukitan yang memiliki sumber air alami, sehingga cocok untuk pengembangan perikanan air tawar. Adapun jenis ikan yang dikembangkan di Kabupaten Lahat yaitu: Ikan Mas, Nilam, Gurame, Mujair, Patin. dari Gambar 4.4 terlihat bahwa terjadinya peningkatan produksi ikan air tawar pada setiap tahunnya mencerminkan meningkatnya pendapatan petani ikan dan secara tidak langsung meningkatnya kontribusi hasil perikanan terhadap perekonomian wilayah Kecamatan penghasil ikan, untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar 4.4 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR.4.4
PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

Untuk mengetahui perkembangan perekonomian setiap kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran wilayah digunakan analisis *scoring*. Analisis ini digunakan untuk menentukan bobot masing-masing tingkat perkembangan kecamatan yang diukur dari variabel perekonomian pada masing-masing wilayah kinerja kecamatan dengan memberikan nilai pada setiap variabel. Kondisi perkembangan kecamatan di Kabupaten Lahat dilakukan dengan mengklasifikasikan karakteristik variabel. Adapun hasil dari perhitungan *scoring* pada masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada lampiran.

Hasil analisis ini menggambarkan bahwa ekonomi yang terjadi di setiap kecamatan berbeda-beda sesuai dengan produktivitas ekonomi wilayah yang dominan, seperti produk hasil pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan, dimana setiap tahun akan mengalami perubahan, baik meningkat atau pun menurun. Hal ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat wilayah kecamatan.

Berdasarkan pemberian bobot/ nilai didapat skor tertinggi dan terendah untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

- Total skor tertinggi = $8,33 \times 8,33 \times 100 = 100$
- Total skor terendah = $2,67 / 8,33 \times 100 = 32$

Keterangan :

10 = Bobot tertinggi untuk setiap variabel

1 = Bobot terendah untuk setiap variabel

Dari perhitungan rumus rentang, banyak kelas, dan interval kelas, diperoleh

perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rentang} = (100 - 32) / 3 = 22,667$$

TABEL IV.2
KELAS HASIL SKORING

| Kelas | Penjelasan | Skor |
|--------------|---------------------------------------|-------------|
| I | Kecamatan yang mengalami Perkembangan | 86,4 – 100 |
| II | Kecamatan yang Tetap Stabil | 59,3-72,8 |
| III | Kecamatan Menurun | 32 – 45,6 |

Sumber: Hasil Analisa, 2008

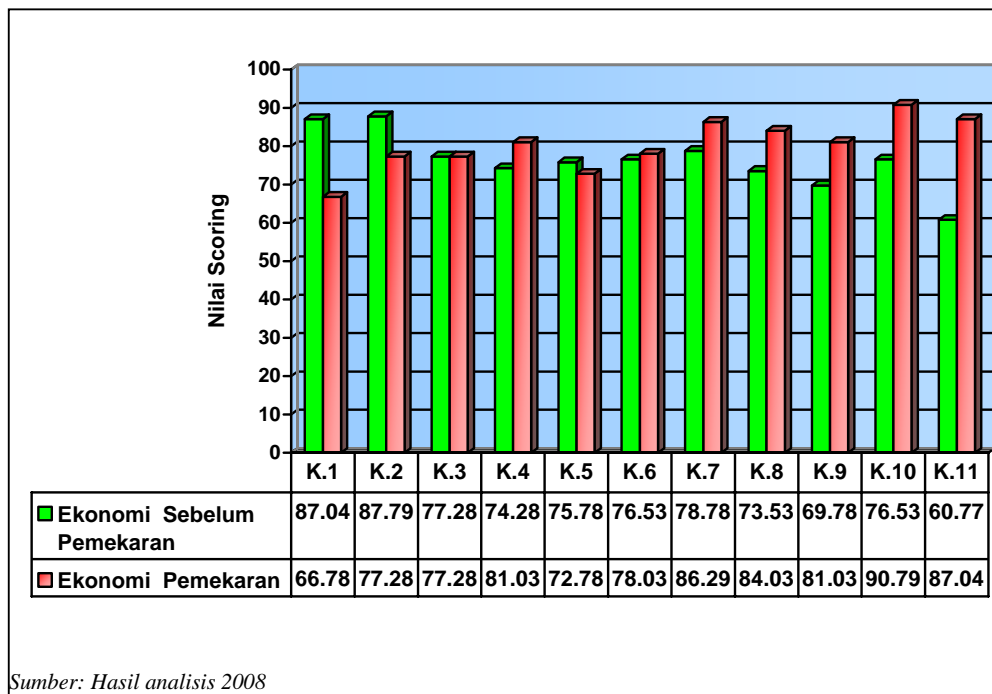
Dari hasil perhitungan *scoring* tersebut dapat dilihat tingkat perkembangan yang terjadi dapat dilihat tingkat perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran, yaitu interval waktu 1993 hingga 1996 dan tahun 2001 hingga 2004 dengan skor masing-masing kecamatan di Kabupaten Lahat sebagaimana Tabel IV.3.

TABEL IV.3
HASIL SCORING PERKEMBANGAN EKONOMI
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

| Kode | Kecamatan | Kriteria Ekonomi | | Tingkat Perkembangan Ekonomi Kecamatan |
|-------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran | |
| | | Tahun 1993 - 1996 | Tahun 2001-2004 | |
| | | Rata-rata Score | Rata-rata Score | |
| K.1 | Kec. Tj.Sakti | 87.035 | 66.777 | Menurun |
| K.2 | Kec. Kt.Agung | 87.785 | 77.281 | Menurun |
| K.3 | Kec.Pl.Pinang | 77.281 | 77.281 | Tetap |
| K.4 | Kec.Jarai | 74.280 | 81.032 | Berkembang |
| K.5 | Kec.Ma.Pinang | 75.780 | 72.779 | Menurun |
| K.6 | Kec.Pendopo | 76.531 | 78.031 | Berkembang |
| K.7 | Kec.Ulu Musi | 78.782 | 86.285 | Berkembang |
| K.8 | Kec.Tb.Tinggi | 73.529 | 84.034 | Berkembang |
| K.9 | Kec.Kikim | 69.778 | 81.032 | Berkembang |
| K.10 | Kec.Lahat | 76.531 | 90.786 | Berkembang |
| K.11 | Kec.Merapai | 60.774 | 87.035 | Berkembang |

Sumber: Hasil Analisis, 2008

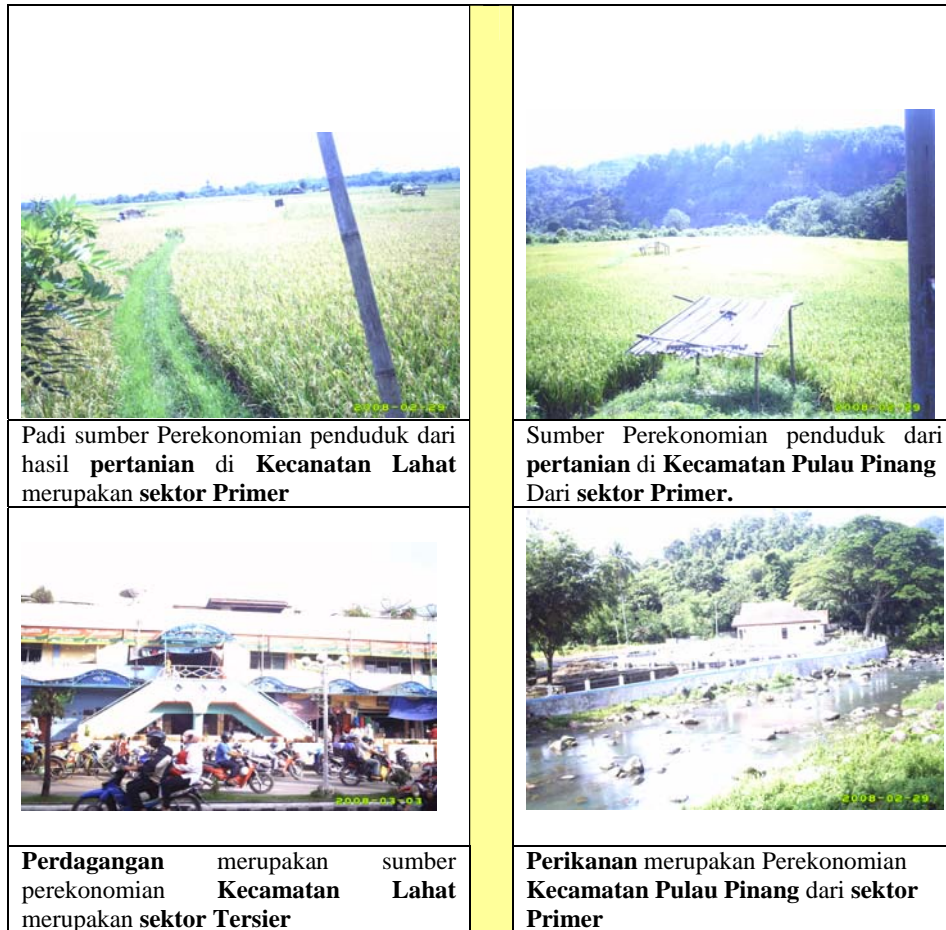
Tabel IV.3 di atas menunjukkan perkembangan ekonomi melalui penilaian terhadap subvariabel produktivitas yaitu produk pertanian, perkebunan, peternakan besar dan perikanan air tawar. Perkembangan kecamatan yang terjadi dari nilai ekonomi adalah kecamatan yang mengalami penurunan yaitu: Kecamatan Tanjung Sakti dengan skor 87.035 turun menjadi 66.777, dan Kecamatan Muara Pinang dengan skor 75.780 turun menjadi 72.779. Adapun kecamatan yang berkembang perekonomiannya adalah Kecamatan Lahat, Kecamatan Jarai, Tebing Tinggi, Pendopo dan Merapi. Untuk lebih lengkap perkembangan ekonomi kecamatan sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada Gambar 4.4.



GAMBAR.4.5
DIAGRAM PERKEMBANGAN EKONOMI KECAMATAN
DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

Keterangan:

- **Kecamatan yang berkembang secara ekonomi:** kecamatan yang produktivitas wilayahnya semakin meningkat pada setiap tahunnya. Apabila ditinjau dari produk dominan yang ada di setiap kecamatan, seperti hasil pertanian padi, perkebunan kopi, peternakan besar berupa kerbau, sapi, kuda dan banteng, setiap tahunnya mengalami peningkatan produksi. Dengan demikian, peningkatan jumlah produk setiap tahunnya akan menyebabkan peningkatan perekonomian wilayah kecamatan.
- **Kecamatan yang perkembangannya tetap/stagnan secara ekonomi:** Kecamatan yang produktivitas wilayahnya selalu tetap. Apabila ditinjau dari produk yang dominan, seperti hasil pertanian padi, perkebunan kopi, peternakan besar berupa kerbau, sapi, kuda dan banteng, yang setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan produksi, dan peningkatan produksi yang terjadi tidak sebanding dengan permintaan terhadap hasil produksi bagi konsumen. Hal ini terjadi karena tingkat pertumbuhan penduduk secara alamiah lebih tinggi, sehingga peningkatan produksi tidak memberikan arti bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
- **Kecamatan yang menurun perkembangannya secara ekonomi:** Kecamatan yang produktivitas wilayahnya selalu menurun Ditinjau dari produk yang dominan, seperti hasil pertanian padi, perkebunan kopi, peternakan besar berupa kerbau, sapi, kuda dan banteng, yang setiap tahunnya menurun produksinya, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan perekonomian suatu wilayah kecamatan.



Sumber: Kabupaten Lahat, 2008

GAMBAR.4.6 **SUMBER PEREKONOMIAN KECAMATAN** **DI KABUPATEN LAHAT**

Gambar 4.5 menunjukkan sektor primer dan tersier penduduk Kecamatan Lahat yang dominan pada sektor tersier, dan Kecamatan Pulau Pinang yang dominan pada sektor primer. Dalam perkembangannya kecamatan yang dominan masyarakatnya pada sektor primer akan berkembang lebih lambat bila dibandingkan dengan kecamatan yang dominan masyarakatnya bekerja pada sektor tersier. Hal ini terjadi karena terjadinya perputaran modal pada setiap harinya.

**TABEL IV.4
ASPEK EKONOMI**

| No. | WILAYAH KECAMATAN | KRITERIA PERKEMBANGAN | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|--|---|
| | | | Tahun 1993 - 1996 | 2001 - 2004 | |
| 1 | Kecamatan Tanjung Sakti | 1.Produksi: Padi Komoditas Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 8.026,7 – 16.926 ton 1.225,0- 5.959,2 ton 10.601- 9.628 ekor 248-382,3 ton Primer > 91 % | 13.972,6-17.180,8 5.436.-4.444,8 ton 816 – 375 ekor 409,4-593,3 ton 80%- 51,6% > Rp. 500 ribu. 90,7%-85,6% | - Meningkatkan 6 % - Menurun 25,41 % - Menurunan 96,1 % - Meningkatkan 55,19 % - Menurunnya 28,4% - Transformasi Meningkatkan 4,9 % |
| 2 | Kecamatan Kota Agung Kecamatan Mulak Ulu | 1.Produksi: Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 18.739 – 28.576 ton 270- 2.895,5 ton 4.057- 3.639 ekor 271-317,7 ton Primer > 98 % | 20.500,9-27.472,7 4.426,2-4.254,3ton 3.600 – 603 ekor 359,4-545,4 ton 64,1%- 86,1% > Rp. 500 ribu. 95,7%-95,5% | - Menurun 3,86 % - Meningkatkan 46,93 % - Menurunan 83,43 % - Meningkatkan 71,67 % - Meningkatkan 22,0% - Transformasi Meningkatkan 0,2 % |
| 3 | Kecamatan Pulau Pinang | 1.Produksi: Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 5.926, – 9.895 ton 95- 78 ton 2.530- 3.634 ekor 107-135,3 ton Primer > 90 % | 9.285,0-10.137,0 2.270,3-2.762 ton 3.734 – 3427 ekor 204,5-310,4 ton 48%- 61,3% > Rp. 500 ribu. 89,9%-67,4% | - Meningkatkan 2,45 % - Meningkatkan 2,8 % - Menurunan 5,7 % - Meningkatkan 29,42 % - Meningkatkan 13,3% - Transformasi Meningkatkan 22,5% |
| 4 | Kecamatan Jarai Kecamatan Pajar Bulan | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 10.010 – 17.481 ton 10.200- 8.790 ton 4.316- 3.155 ekor 249-258,2 ton Primer > 91 % | 13.184,8-18.910,2t 8.404,7-6.326 ton 932 – 924 ekor 437,7-664,2 ton 33,8%- 79,7% > Rp. 500 ribu. 90,7%-81,7% | - Meningkatkan 8,17% - Menurun 28,03 % - Menurunan 29,29 % - Meningkatkan 57,24 % - Meningkatkan 45,9% - Transformasi Meningkatkan 9 % |

Lanjut ke halaman 84

Lanjutan Tabel IV.4 Halaman 83

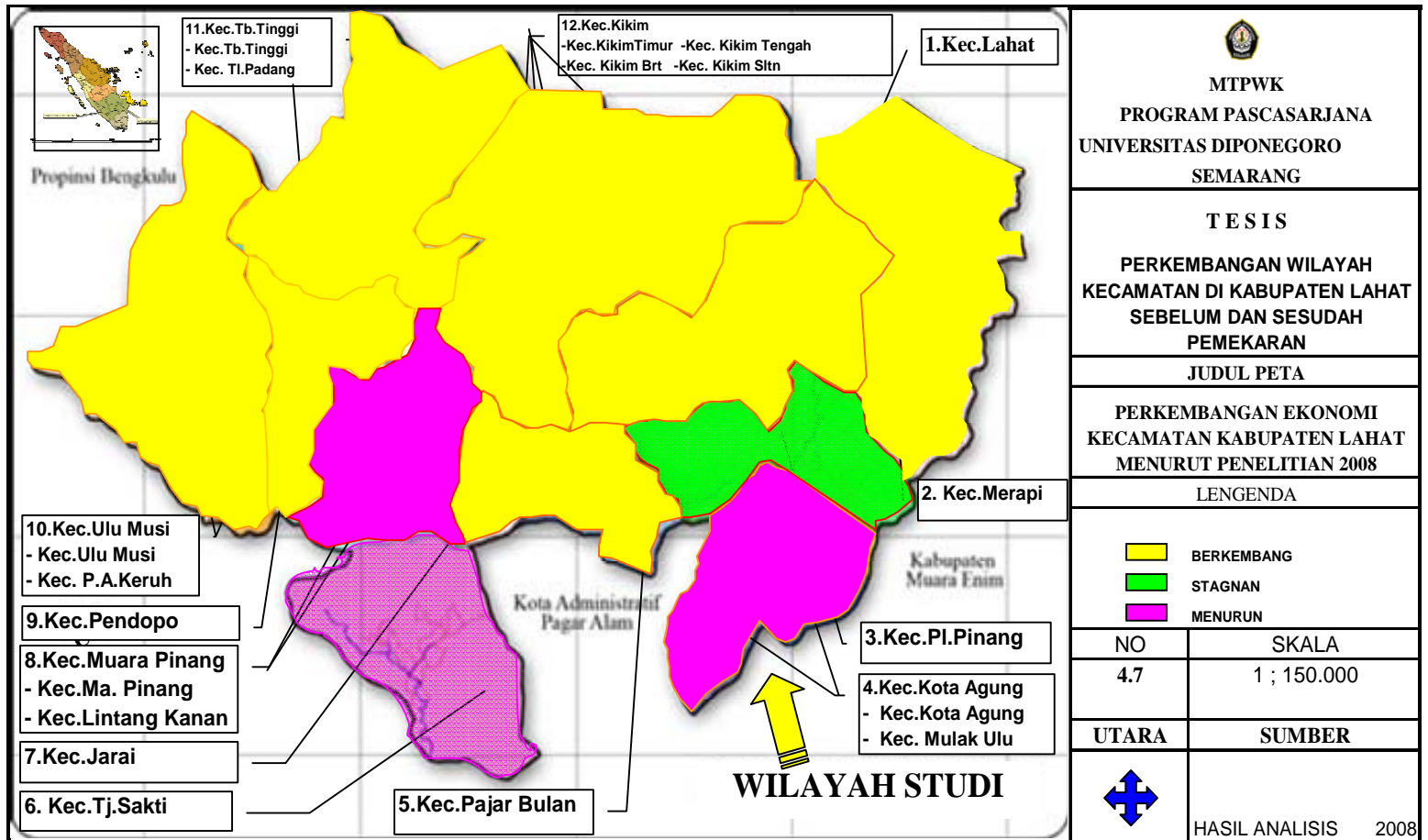
| No. | WILAYAH KECAMATAN | KRITERIA PERKEMBANGAN | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|---|--|
| | | | Tahun 1993 - 1996 | 2001 - 2004 | |
| 5 | Kecamatan Muara Pinang Kecamatan Lintang Kanan | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 17.759 – 21.197 ton 22,343- 7,544 ton 12.569- 9.940 ekor 135-175,1 ton Primer > 90 % | 23.243-20.782,6 10.198.-4.785,5 tn 847 – 1,174 ekor 285,3-433,1 ton 32,8%- 16,3% > Rp. 500 ribu. 89,4%-80,9% | - Menurun 1,96 % - Menurun 36,56 % - Menurunan 88,19 % - Meningkatkan 47,34 % - Menurunnya 16,5% - Transformasi Meningkatkan 8,5 % |
| 6 | Kecamatan Pendopo | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 32.894 – 12.269 ton 82- 1.477,2 ton 3.878- 4.116 ekor 165-236,5 ton Primer > 85 % | 8.601,7-14.385,1 2.356,9-2.536 ton 1.778 – 917 ekor 176,4-267,7 ton 51,8%- 30,4% > Rp. 500 ribu. 78,1%-89,1% | - Meningkatkan 17,25 % - Meningkatkan 71,67 % - Menurunan 22,28 % - Meningkatkan 13,19 % - Menurunnya 21,4% - Kembali bertani Meningkat 11 % |
| 7 | Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Pasemah Air Keruh | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 22.993 – 31.744 ton 20.543- 15,210 ton 4.258- 3.599 ekor 69-69,1 ton Primer > 97 % | 38.112,8-29.938,6 7.105,6-12.683 ton 1,373 – 1,755 ekor 500,4-759,2 ton 9,4%- 38,5% > Rp. 500 ribu. 97,1%-95,9% | - Menurun 5,69 % - Menurun 16,61 % - Menurunan 51,24 % - Meningkatkan 10X - Meningkatkan 29,1% - Transpormasi Meningkatkan 1,2 % |
| 8 | Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Talang Padang | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 15.188 – 14.278 ton 1,792- 1,346 ton 9.807- 9.269 ekor 99-111 ton Primer > 75 % | 10.576,8-11.785,4 957,6-1.182,8 ton 1.168 – 1.518 ekor 236,2-358,7 ton 48,9%- 68,5% > Rp. 500 ribu. 74,7%-58,7% | - Menurun 17,46 % - Menurun 12,12 % - Menurunan 83,62 % - Meningkatkan 223,15 % - Meningkatkan 19,16% - Transformasi Meningkatkan 16 % |

Lanjut ke halaman 85

Lanjutan Tabel.IV.4 Halaman.84

| No. | WILAYAH KECAMATAN | KRITERIA PERKEMBANGAN | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | | Tahun 1993 - 1996 | 2001 - 2004 | |
| 9 | Kecamatan Kikim Barat Kecamatan Kikim Timur Kecamatan Kikim Tengah Kecamatan Kikim Selatan | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 16.680 – 20.658 ton 95- 2,053 ton 5.857- 7,466 ekor 117-90 ton Primer > 94 % | 20,744,3-22.529,6 633,9-665,4 ton 16.571-17.233ekr 188,8-286,6 ton 85,9%- 75% > Rp. 500 ribu. 93,2%-79,1% | - Meningkat 9,06 % - Menurun 32,41 % - Meningkat 30,82 % - Meningkat 218 % - Menurunnya 10,9% - Transformasi Meningkat 14,1 % |
| 10 | Kecamatan Lahat | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 6.134 – 8.284 ton 612- 475 ton 4.175- 4.187 ekor 81-87,3 ton Primer < 31 % | 4.840,3-8.961,3 t 281-1.578,4 ton 3.152 – 3.300 ekor 146,2-221,9 ton 67,5%- 67,2% > Rp. 500 ribu. 14,4%-30,5% | - Meningkat 8,18 % - Meningkat 232,29 % - Menurunan 21,18 % - Meningkat 154,18 % - Menurunnya 0,3% - Kembali Tani 16,1 % |
| 11 | Kecamatan Merapi | 1.Produksi Padi Kopi Ternak Besar Perikanan 2.Tingkat Konsumsi 3.Lapangan Usaha | 6.295– 6.898 ton 212- 714,8 ton 10.260- 2.702 ekor 73-67,3 ton Primer > 85 % | 7.182-10.629,3 474,9-2.004,8 ton 4.403–4.582 ekor 128,4-194,7 ton 67,9%- 87,2% > Rp. 500 ribu. 81,2%-97,9% | - Meningkat 54,09 % - Meningkat 180,47 % - Meningkat 69,58 % - Meningkat 189,30 % - Meningkat 19,3% - Kembali Tani 16,7 % |

Sumber: Hasil Analisis 2008.



4.1.3 Tingkat Konsumsi Keluarga di Kecamatan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk, dimana semakin besarnya persentase penduduk yang berada pada kelompok yang konsumsi keluarga yang tinggi maka semakin baiknya tingkat kesejahteraan. Di Kabupaten Lahat sebagian besar pengeluaran rumah tangga dalam sebulan lebih besar dari 500.000 rupiah, yaitu sebesar 60,8% dari keseluruhan rumah tangga. Persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran lebih dari 500.000 rupiah perbulan meningkat dibanding tahun 2003, sedangkan persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran kurang dari 100.000 rupiah perbulan menunjukkan penurunan. Hal ini mencerminkan kondisi kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan secara kualitatif, akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian berupa inflasi akibat terjadinya kenaikan harga-harga pada setiap tahun. Dengan demikian peningkatan pengeluaran belanja keluarga tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu berkaitan dengan pengeluaran selain konsumsi keluarga seperti sandang pangan papan, serta aktivitas sosial, dan pengaruh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan relatif kecil, untuk lebih dapat dilihat dari Tabel IV.5

TABEL.IV.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT PENGELUARAN DALAM SEBULAN

| KECAMATAN | | Besarnya Pengeluaran/ Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----------|------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|--------|
| | | <100,000 | | | 100,000-199,999 | | | 200,000-299,999 | | | 300,000-399,999 | | | 400,000-499,999 | | | >500000 | | | |
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 1 | Kec. Tanjung Sakti. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 6.9 | 12.5 | 16.3 | 23.8 | 31.3 | 80.0 | 65.8 | 51.6 | 100.0 |
| 2 | Kec. Kota Agung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 7.8 | 4.6 | 1.3 | 25.0 | 17.0 | 8.9 | 64.1 | 75.1 | 86.1 | 100.0 |
| | Kec. Mulak Ulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 16.7 | 11.5 | 6.3 | 75.0 | 78.9 | 82.8 | 100.0 |
| 3 | Kec. Pulau Pinang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 6.9 | 10.0 | 28.8 | 20.1 | 11.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 48.8 | 55.1 | 61.3 | 100.0 |
| 4 | Kec. Jarai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 8.8 | 5.1 | 1.3 | 26.3 | 17.0 | 7.6 | 28.8 | 20.1 | 11.4 | 33.8 | 56.8 | 79.7 | 100.0 |
| | Kec. Pajar Bulan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 23.4 | 18.8 | 14.1 | 29.7 | 24.3 | 18.8 | 35.9 | 45.3 | 54.7 | 100.0 |
| 5 | Kec. Muara Pinang | 4.7 | 2.4 | 0.0 | 14.1 | 12.1 | 10.0 | 37.5 | 24.4 | 11.3 | 20.3 | 18.3 | 16.3 | 14.1 | 22.7 | 31.3 | 9.4 | 20.4 | 31.3 | 100.0 |
| | Kec. Lintang Kanan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7.1 | 12.5 | 10.9 | 17.4 | 23.8 | 26.6 | 24.0 | 21.3 | 28.1 | 26.6 | 25.0 | 32.8 | 24.6 | 16.3 | 100.0 |
| 6 | Kec. Pendopo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 5.8 | 8.9 | 12.5 | 26.4 | 40.2 | 30.4 | 24.2 | 17.9 | 51.8 | 41.1 | 30.4 | 100.0 |
| 7 | Kec. Ulu Musi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 30.2 | 19.8 | 9.4 | 42.7 | 29.7 | 16.7 | 12.5 | 21.4 | 30.2 | 9.4 | 24.0 | 38.5 | 100.0 |
| | Kec. Pasemah Air Keruh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 31.3 | 20.1 | 8.9 | 41.7 | 36.7 | 31.6 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 10.4 | 25.5 | 40.5 | 100.0 |
| 8 | Kec. Tebing Tinggi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 7.3 | 9.9 | 6.3 | 11.3 | 16.2 | 48.9 | 58.7 | 68.5 | 100.0 |
| | Kec. Talang Padang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 9.4 | 7.9 | 6.3 | 15.6 | 12.0 | 8.3 | 65.6 | 73.5 | 81.3 | 100.0 |
| 9 | Kec. Kikim Barat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 14.6 | 16.8 | 19.0 | 77.1 | 73.5 | 69.8 | 100.0 |
| | Kec. Kikim Timur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.7 | 6.3 | 8.6 | 10.9 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 85.9 | 80.5 | 75.0 | 100.0 |
| | Kec. Kikim Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 4.2 | 8.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.6 | 15.7 | 16.7 | 83.3 | 77.1 | 70.8 | 100.0 |
| | Kec. Kikim Selatan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 12.5 | 10.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 81.3 | 73.1 | 64.8 | 100.0 |
| 10 | Kec. Lahat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 13.3 | 12.1 | 10.9 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 67.5 | 67.4 | 67.2 | 100.0 |
| 11 | Kec. Merapi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 11.6 | 8.8 | 6.0 | 17.9 | 12.4 | 6.8 | 67.9 | 77.6 | 87.2 | 100.0 |

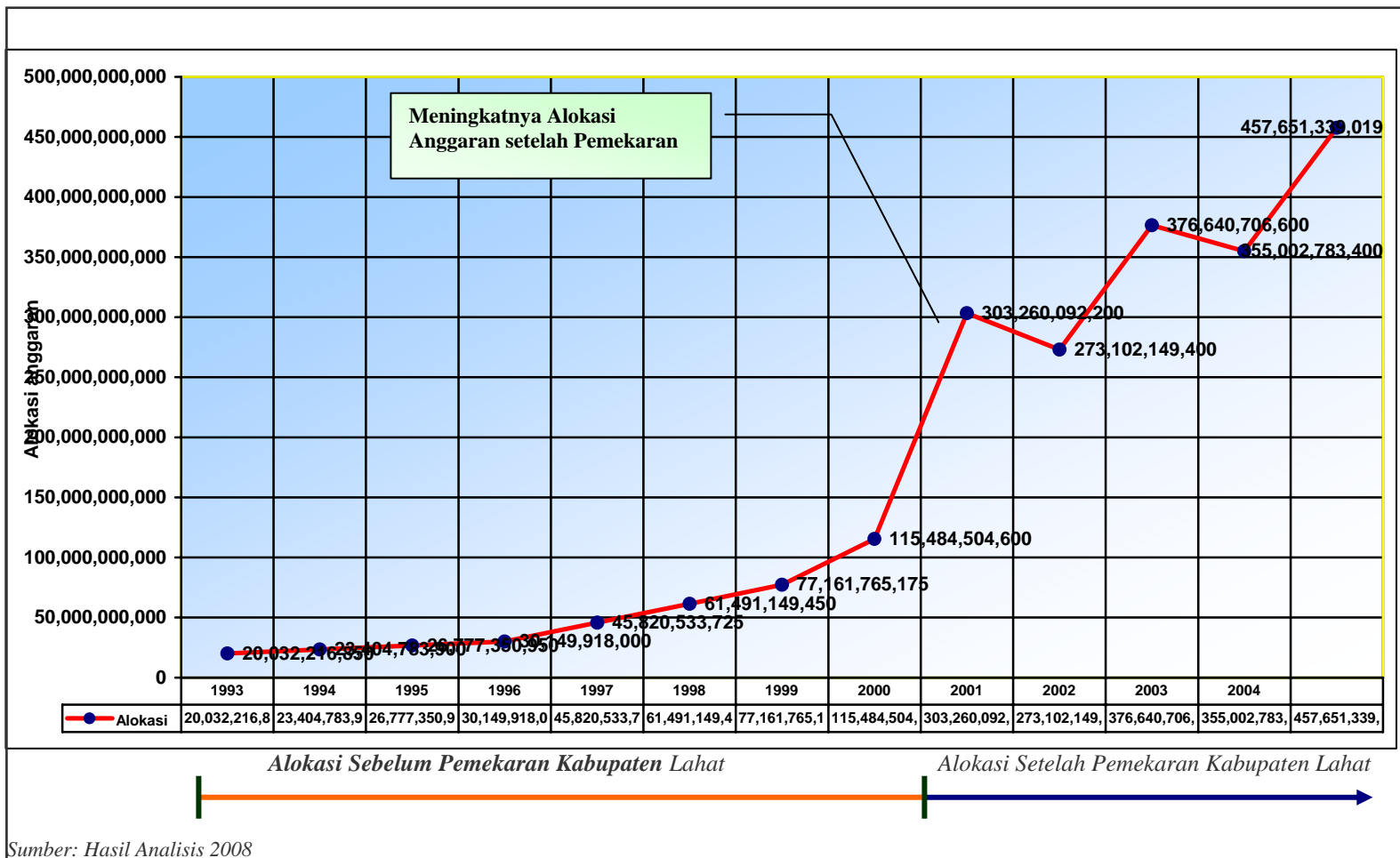
Sumber : Hasil Analisis, 2008

Tabel IV.5 di atas menunjukkan kelompok konsumsi keluarga di atas Rp.500 ribu perbulan. Dari setiap kecamatan tampak bahwa terjadi penurunan atau pergeseran persentase kelompok tingkat konsumsi. Hal ini berarti terjadinya penurunan konsumsi keluarga dalam kurun waktu 2003 hingga 2005, yang merupakan indikasi terjadinya penurunan kesejahteraan penduduk pada beberapa kecamatan secara umum yang ditandai dengan warna merah. Kecamatan yang mengalami penurunan konsumsi adalah Kecamatan Tanjung Sakti, Pendopo dan Kikim. Sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Lahat lebih besar dari 500.000 rupiah perbulan, yaitu sebesar 86,1% dari keseluruhan rumah tangga. Persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran lebih dari 500.000 rupiah perbulan menurun dibanding tahun 2003, sedangkan persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran kurang dari 300.000 rupiah perbulan menunjukkan peningkatan. Melihat kondisi ini sepintas dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dalam satu tahun terakhir mengalami perubahan ke arah sedikit menurun.

Komposisi pengeluaran rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2005 menunjukkan terjadinya pergeseran tingkat konsumsi keluarga yang berada di *range* antara Rp 300.000-500.000. Pada tahun 2003 tingkat konsumsi keluarga menurun, yaitu dari 13,3 menjadi 10,9% dan dari 13,3 menjadi 11,9% pada tahun 2005.

4.1.4 Belanja Publik

Alokasi anggaran pembangunan pada setiap tahun digunakan untuk membangun infrastruktur wilayah Kabupaten Lahat agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Alokasi anggaran merupakan fungsi turunan dari infrastruktur wilayah, dimana semakin besar alokasi anggaran maka akan semakin baik infrastruktur wilayahnya. Alokasi anggaran yang meliputi pembangunan baru, pemeliharaan dan peningkatan, yang kesemuanya sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan inflasi, yang merupakan faktor penghambat perkembangan infrastruktur wilayah. Alokasi anggaran pembangunan selama tahun 1993 hingga tahun 2004 tampak mengalami peningkatan, sebagaimana Gambar 4.8 berikut



GAMBAR 4.8
GRAFIK PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAHAT

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa setelah terjadi pemekaran maka alokasi anggaran semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari DAU dan DAK. Adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah berakibat pada peningkatan konsentrasi pembangunan pada wilayah kecamatan dan mengecilnya wilayah kabupaten dengan terlepasnya Kota Pagar Alam. Dengan demikian, akan meningkatkan konsentrasi pembangunan infrastruktur wilayah setiap kecamatan.

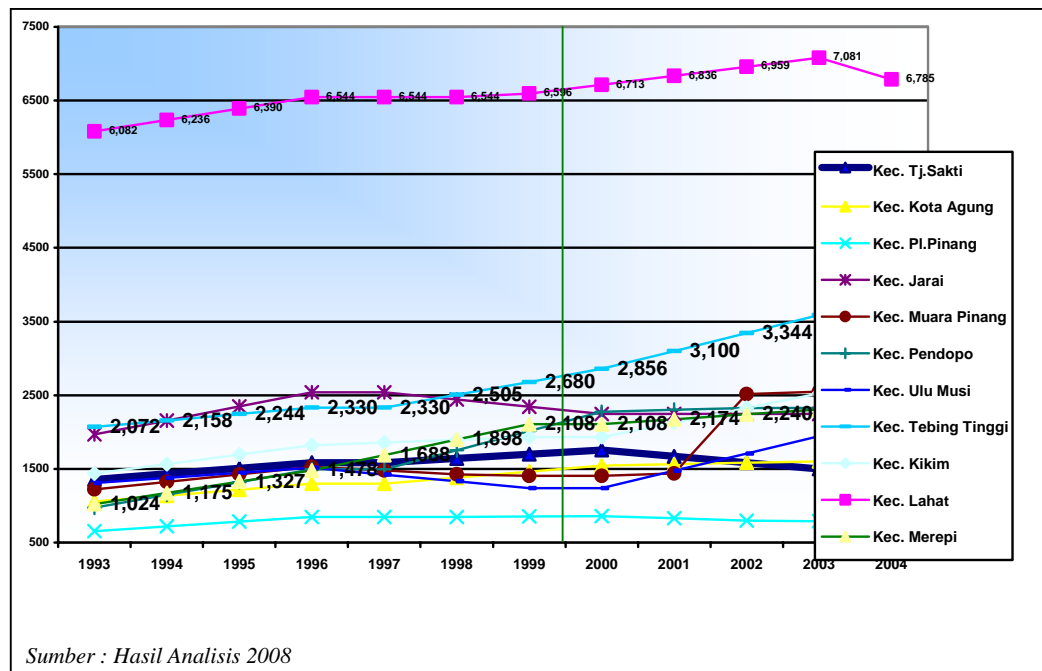
4.2 Analisis Sosial, Penduduk

Kabupaten Lahat dengan luas 6.618,27 Km² memiliki kepadatan penduduk sekitar 80,58 orang per Km² pada tahun 2003, dan meningkat menjadi 82,46 orang perkm² pada tahun 2005. Kecamatan Pendopo merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terpadat, yaitu 162,77 orang perkm², sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kikim Timur. Kecamatan ini hanya ditempati sekitar 43 orang setiap satu kilo meter persegi.

Distribusi penyebaran jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Lahat secara alami serta luas wilayah kerja kecamatan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat serta produktivitas wilayah kecamatan. Pertumbuhan penduduk secara alami merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat mempengaruhi perkembangan wilayah, khususnya di Kabupaten Lahat. Dengan demikian, dituntut adanya kesejahteraan dari segi ekonomi, dan pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Lahat.

4.2.1 Kondisi Pendidikan

Secara umum perkembangan kualitas sumber daya manusia di setiap kecamatan tercermin dari banyaknya siswa usia sekolah pada tingkat SLTP, yaitu usia sekolah 12-15 tahun. Indikator ini dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia secara global. Bertambahnya jumlah pelajar SLTP pada setiap tahunnya mencerminkan meningkatnya pendidikan di kecamatan Kabupaten Lahat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4.8



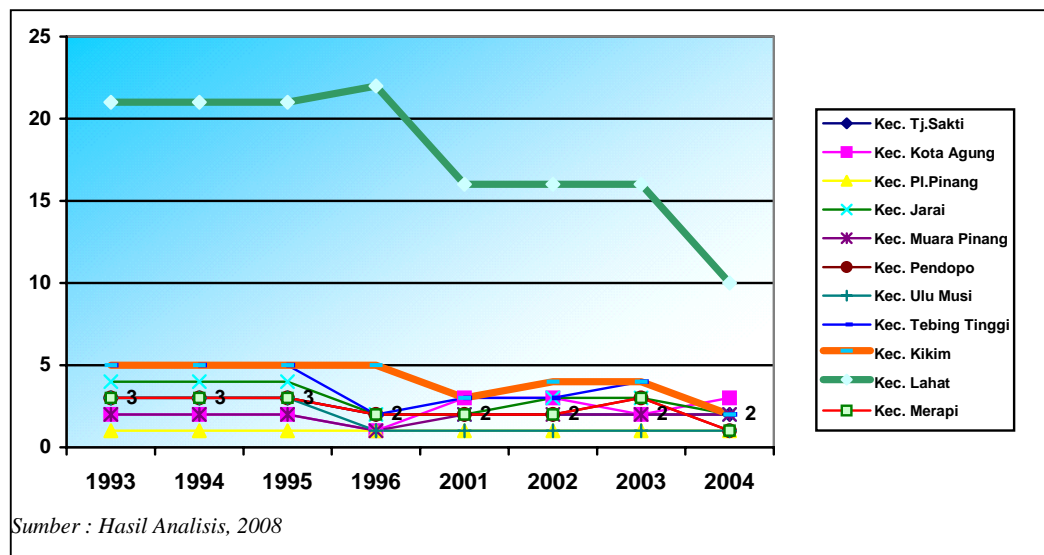
GAMBAR 4.9
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA SLTP
KECAMATAN KABUPATEN LAHAT

Gambar 4.8 di atas mencerminkan telah terjadi perkembangan di bidang sumber daya manusia, yang dilihat dari banyaknya pelajar yang sedang bersekolah

di kecamatan di Kabupaten Lahat. Hal ini mencerminkan terjadinya peningkatan sumber daya manusia pada beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat.

4.2.2 Kondisi Kesehatan

Untuk mengukur perkembangan tingkat kesehatan masyarakat, dapat diketahui melalui banyaknya tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang ada serta didukung dengan sarana kesehatan yang tersedia seperti rumah sakit, klinik, puskesmas yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Lahat. Perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat dalam Gambar 4.9 berikut:



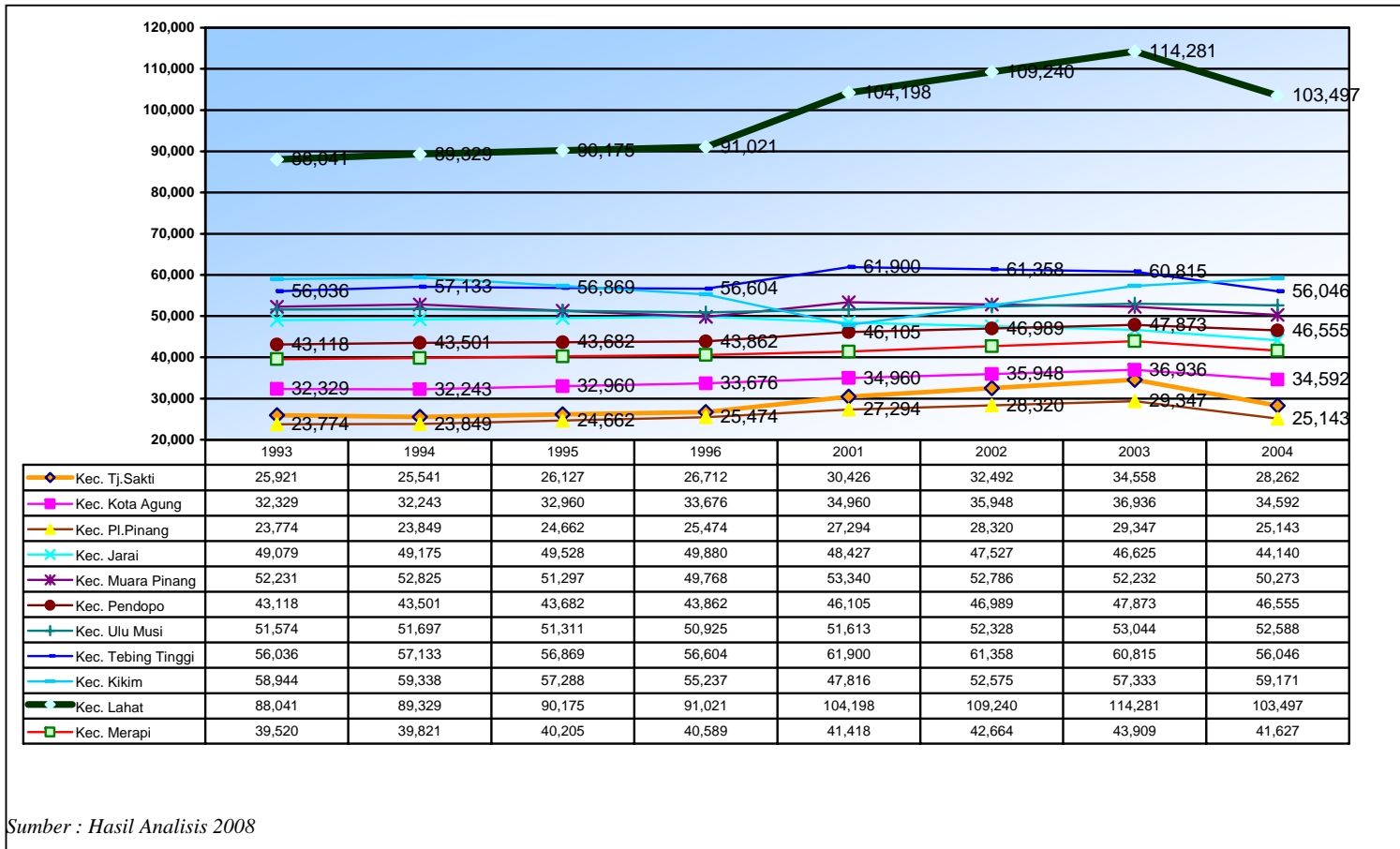
GAMBAR 4.10
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA DOKTER
DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN LAHAT

Pelayanan kesehatan masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat selain lingkungan dan perilaku. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana

kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, dokter spesialis, dokter umum, para medis dan sebagainya. Berdasarkan Gambar 4.9 di atas tampak bahwa tahun 1994 jumlah dokter menurun pada tahun 2004 rasio. Kurangnya tenaga dokter untuk memberikan layanan kesehatan di beberapa kecamatan mempengaruhi menurunnya layanan kesehatan di Kabupaten Lahat.

4.2.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk

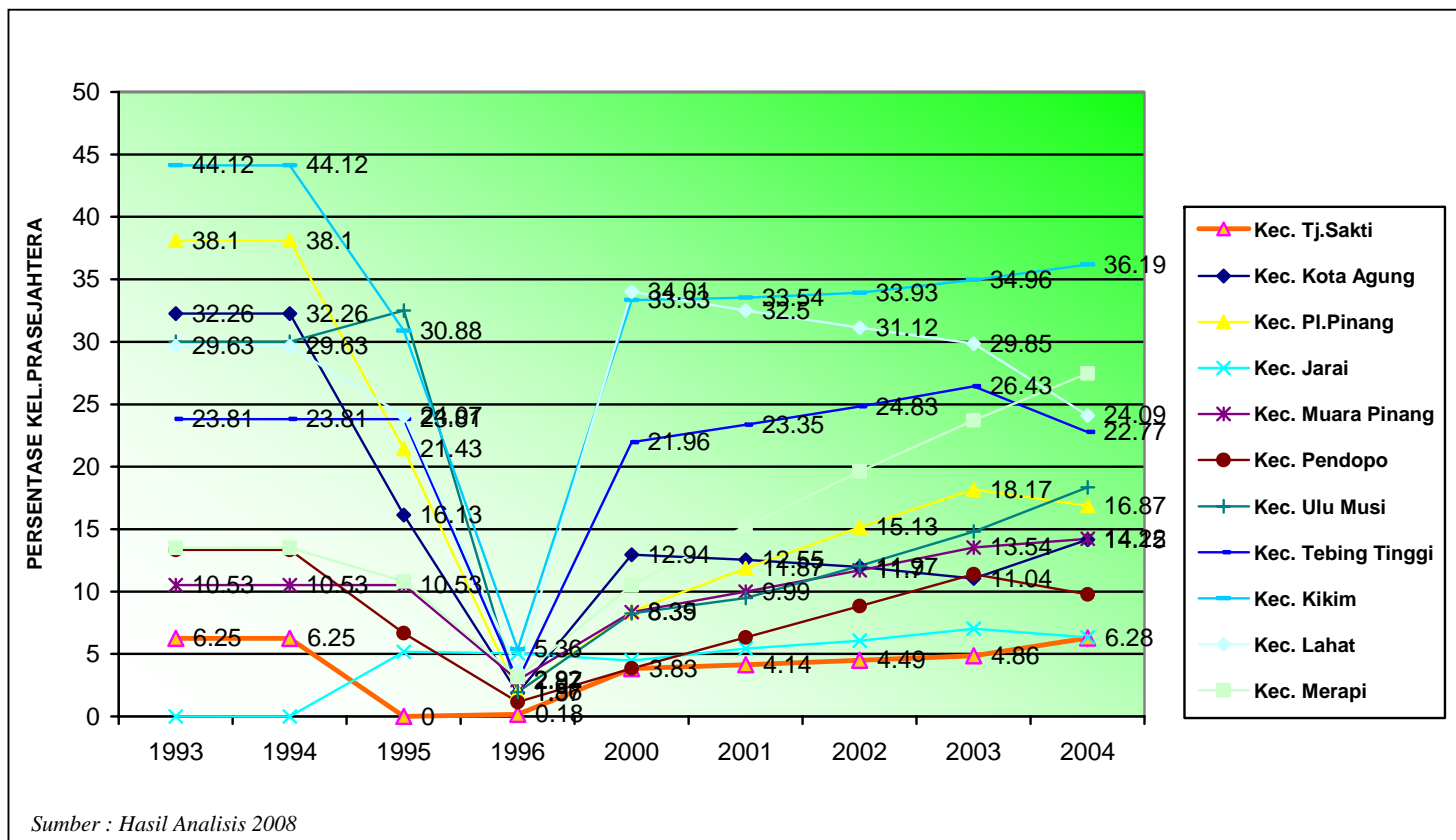
Pertambahan penduduk di kecamatan merupakan sumber daya yang sangat besar. Akan tetapi, pertumbuhan jumlah penduduk haruslah bersinergi dengan perkembangan ekonomi, karena penduduk merupakan faktor produksi yang berupa ketersediaan tenaga kerja, yang akan menggerakkan perekonomian di kecamatan. Pertambahan penduduk rata-rata 1,06% pertahun, dimana bertambahnya penduduk secara ideal akan menawarkan jumlah angkatan kerja bagi pengembangan produktivitas wilayah kecamatan. Pertambahan penduduk juga akan meningkatkan *demand* terhadap produk wilayah kecamatan berupa kebutuhan primer dan sekunder, guna memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara umum.



GAMBAR 4.11
GRAFIK PERTUMBUHAN PENDUDUK KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja akan berakibat pada timbulnya pengangguran yang setiap tahun akan bertambah. Hal tersebut mengakibatkan semakin berkurangnya tingkat kesejahteraan keterbatasan penduduk. Di sisi lain, terdapat keterbatasan pemupukan modal yang teralokasi pada wilayah kecamatan, sehingga membuat perkembangan ekonomi menjadi lambat.

Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk yang terjadi di wilayah kinerja kecamatan yang terjadi sebelum dan setelah pemekaran wilayah tampak dari Gambar 4.11, dimana terlihat bahwa pada tahun 1994 hingga 1997 tingkat kesejahteraan penduduk cenderung meningkat. Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah keluarga prasejahtera di beberapa kecamatan. Hal ini pada dasarnya tidak dapat terlepas dari kesetabilan ekonomi pada sektor riil, dan struktur ekonomi pada sektor pertanian, yang bergantung pada kondisi alam. Akan tetapi, perkembangan yang terjadi setelah pemekaran wilayah (setelah tahun 2001) adalah tingkat kesejahteraan penduduk yang cenderung menurun. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk prasejahtera pada setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari pertambahan penduduk yang relatif besar dengan kesempatan kerja formal yang terbatas, akibat pengaruh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 serta akibat inflasi yang terjadi akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan industri yang mempengaruhi setiap sektor pada setiap lapisan masyarakat.



GAMBAR 4.12
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH KELUARGA PRASEJAHTERA
DI KECAMATAN KABUPATEN LAHAT

Pertambahan penduduk dan keterbatasan lapangan kerja merupakan faktor yang cukup berperan dalam mempengaruhi pertambahan jumlah keluarga prasejahtera. Dari Gambar 4.11 dapat diketahui bahwa jumlah keluarga prasejahtera masih cukup memprihatinkan.

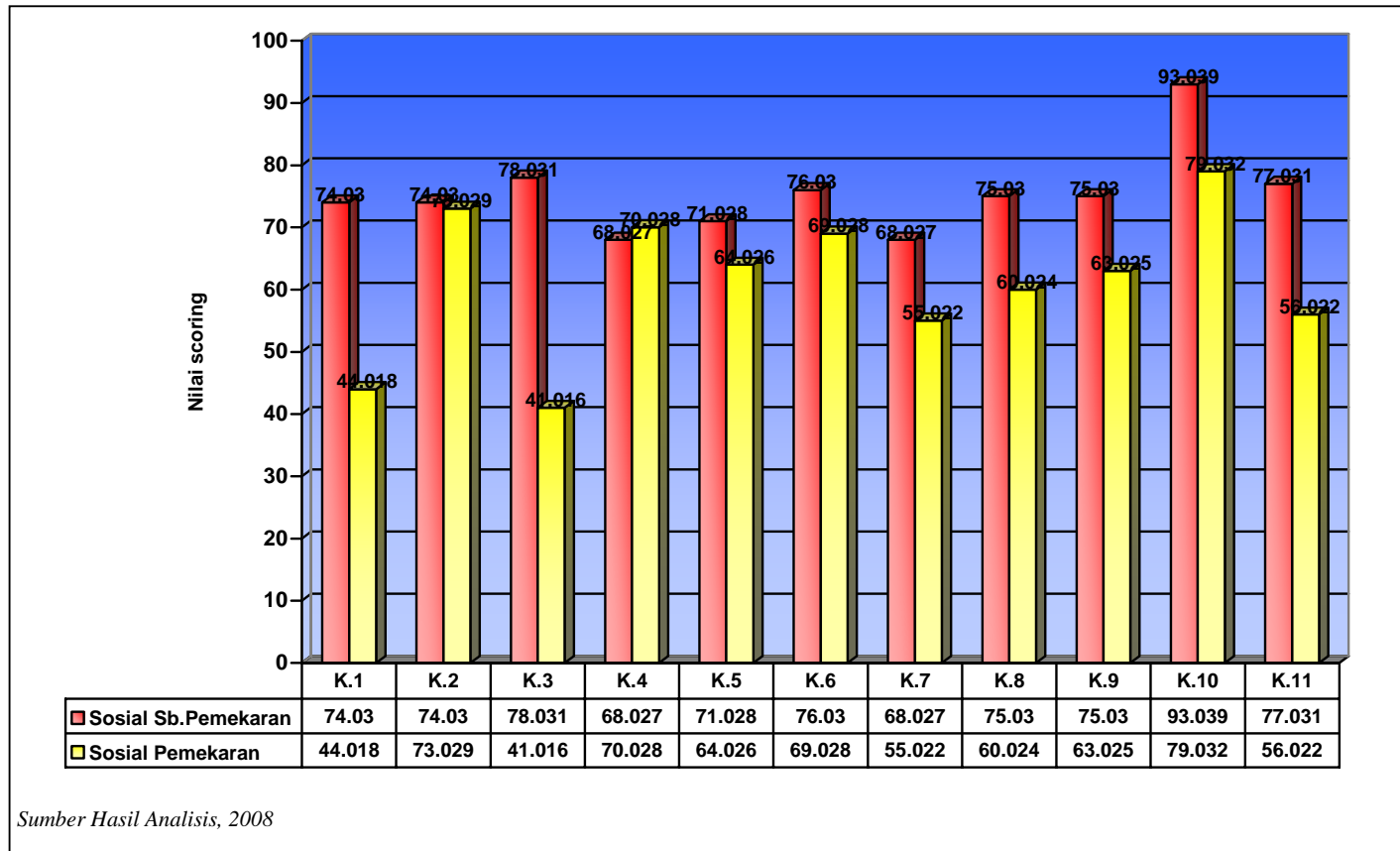
Untuk mengetahui kondisi perkembangan setiap kecamatan, dilakukan analisis *scoring* guna mengukur tingkat perkembangan yang terjadi, melalui pemberian nilai terhadap variabel perkembangan berupa pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dengan kriteria-kriteria perkembangan yang ada. Dari hasil pembobotan nilai terhadap kriteria sosial penduduk yang terjadi, maka dilakukan perhitungan terhadap perkembangan sosial penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran yaitu. Hasil perhitungan *scoring* yang dilakukan terhadap kriteria-kriteria sosial penduduk didapat skor perkembangan sosial penduduk setiap kecamatan. Kecamatan yang memiliki skor yang meningkat bila dibandingkan dengan sebelum pemekaran berarti terjadinya peningkatan perkembangan sosial penduduk. Adapun untuk kecamatan yang memiliki skor awal lebih besar dari pada skor setelah pemekaran berarti terjadi penurunan sosial penduduk pada masing-masing kecamatan. Tingkat perkembangan sosial penduduk diklasifikasikan sebagai kecamatan berkembang, kecamatan stagnan dan kecamatan menurun sesuai dengan nilai skor yang didapat dari hasil perhitungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.6

TABEL.IV.6
HASIL SCORING PERKEMBANGAN SOSIAL PENDUDUK
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

| K. | Kecamatan | Kriteria Sosial Penduduk | | Tingkat Perkembangan Sosial Penduduk Kecamatan |
|------|------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran | |
| | | Tahun 1993 – 1996 | Tahun 2001 – 2004 | |
| | | Rata-rata Score | Rata-rata Score | |
| K.1 | Kec.Tj.Sakti | 74.030 | 44.018 | Menurun |
| K.2 | Kec.Kt.Agung | 74.030 | 73.029 | Tetap Stabil |
| K.3 | Kec.Pl.Pinang | 78.031 | 41.016 | Menurun |
| K.4 | Kec.Jarai | 68.027 | 70.028 | Tetap Stabil |
| K.5 | Kec.Muara Pinang | 71.028 | 64.026 | Tetap Stabil |
| K.6 | Kec.Pendopo | 76.030 | 69.028 | Tetap Stabil |
| K.7 | Kec.Ulu Musi | 68.027 | 55.022 | Tetap Stabil |
| K.8 | Kec. Tb.Tinggi | 75.030 | 60.024 | Tetap Stabil |
| K.9 | Kec.Kikim | 75.030 | 63.025 | Tetap Stabil |
| K.10 | Kec.Lahat | 93.037 | 79.032 | Berkembang |
| K.11 | Kec.Merapi | 77.031 | 56.022 | Tetap Stabil |

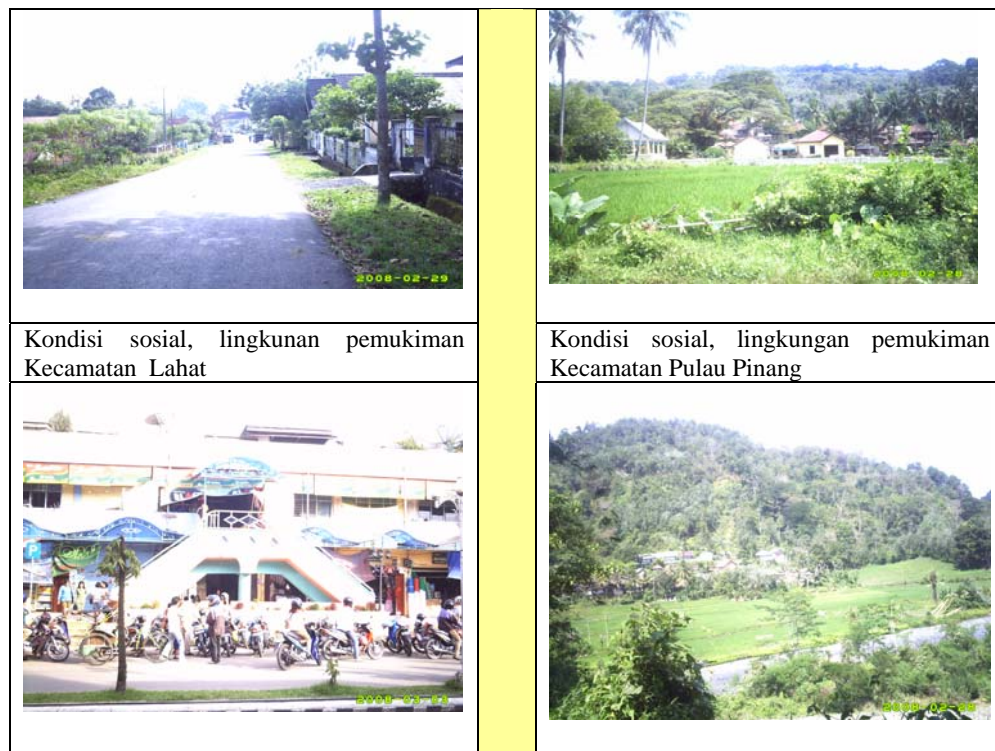
Sumber : Hasil Analisis 2008

Dari hasil pembobotan nilai terhadap kriteria sosial penduduk yang terjadi, maka dilakukan penilaian terhadap perkembangan sosial penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4.12



GAMBAR .4.13
DIAGRAM PERKEMBANGAN SOSIAL PENDUDUK
KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

Dari Gambar 4.12 di atas tampak bahwa kesejahteraan di setiap kecamatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk sebesar 1,6% pertahun mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Tanjung Sakti dan Kecamatan Pulau Pinang mengalami penurunan sosial, dari skor 74.030 turun menjadi 44.018. Pada kedua kecamatan tersebut tidak terdapat pusat aktivitas ekonomi, seperti bangunan pasar, sehingga transaksi perdagangan hasil produksi terbatas, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan ekonomi.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR.4.14
KONDISI PERKEMBANGAN SOSIAL PENDUDUK
DI KECAMATAN KABUPATEN LAHAT

TABEL.IV.7
KOMPARASI PERKEMBANGAN ASPEK SOSIAL PENDUDUK

| No. | WILAYAH KECAMATAN | KRITERIA PERKEMBANGAN | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|---|--|
| | | | 1993 - 1996 | 2001 - 2004 | |
| 1 | Kecamatan Tanjung Sakti | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Pendidikan SLTP 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 25921 – 26712 4.888 – 5.067 1.358-1584 1 : 8.904 1 : 1.406 6,25%-0,18% | 30.426 – 28.262 6.633 – 5.533 1.672-1.451 1 : 14.131 1 : 3.140 4,14%-6,28% | Pertambahan Pddk 1.550 org (5,8 %). Pertambahan 466 KK (9,2%). Penurunan 133 (8,4%) Menurunnya 58,7% Menurun 44,8% Meningkat 6,1% |
| 2 | Kecamatan Kota Agung Kecamatan Mulak Ulu | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 32.329 – 33.676 7.083 – 7.002 1.057 – 1.300 1 : 16.838 1 : 1.772 32,26%-16,18% | 34.960-34.529 8.254 - 8373 1.565 – 1.734 1 : 17.264 1 : 2.302 12,26%-14,71% | Meningkat 853 Org (2,47%) Pertambahan1371KK (19,58%) Meningkat434orang(33.38%). Penurunan 2,53% Menurun 29,91% Menurun 1,47 % |
| 3 | Kecamatan Pulau Pinang | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Pendidikan SLTP 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 23.774 – 25.474 4.668 – 5.553 657 - 847 1 : 25.474 1 : 749 38,10%-21,43% | 27.294 – 25.143 6.541 – 6.076 830 - 763 1 : 25.143 1 : 4.191 11,87%-16,87% | Menurun 331 org (1,3%) Meningkat 523 KK (9,42%) Menurun 84 org (9,92%) Meningkat 1,23% Menurun 4,6X Menurun 4,56% |
| 4 | Kecamatan Jarai Kecamatan Pajar Bulan | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Pendidikan SLTP 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 49.079 – 49.850 9.086 – 9.409 1.968 – 2.538 1 : 16.617 1 : 3.116 0 – 5,17% | 48.427 – 44.140 10.399 – 10.422 2.246 – 2.323 1 : 22.070 1 : 2.597 5,17% - 5,08% | Menurun 5.710 org (11,45%) Meningkat 1.013 KK Menurun 215 org Menurun 32,81% Meningkat 16.65% Menurun 0,05 % |

Lanjut ke Halaman 104

Lanjutan Tabel IV.7 Halaman 103

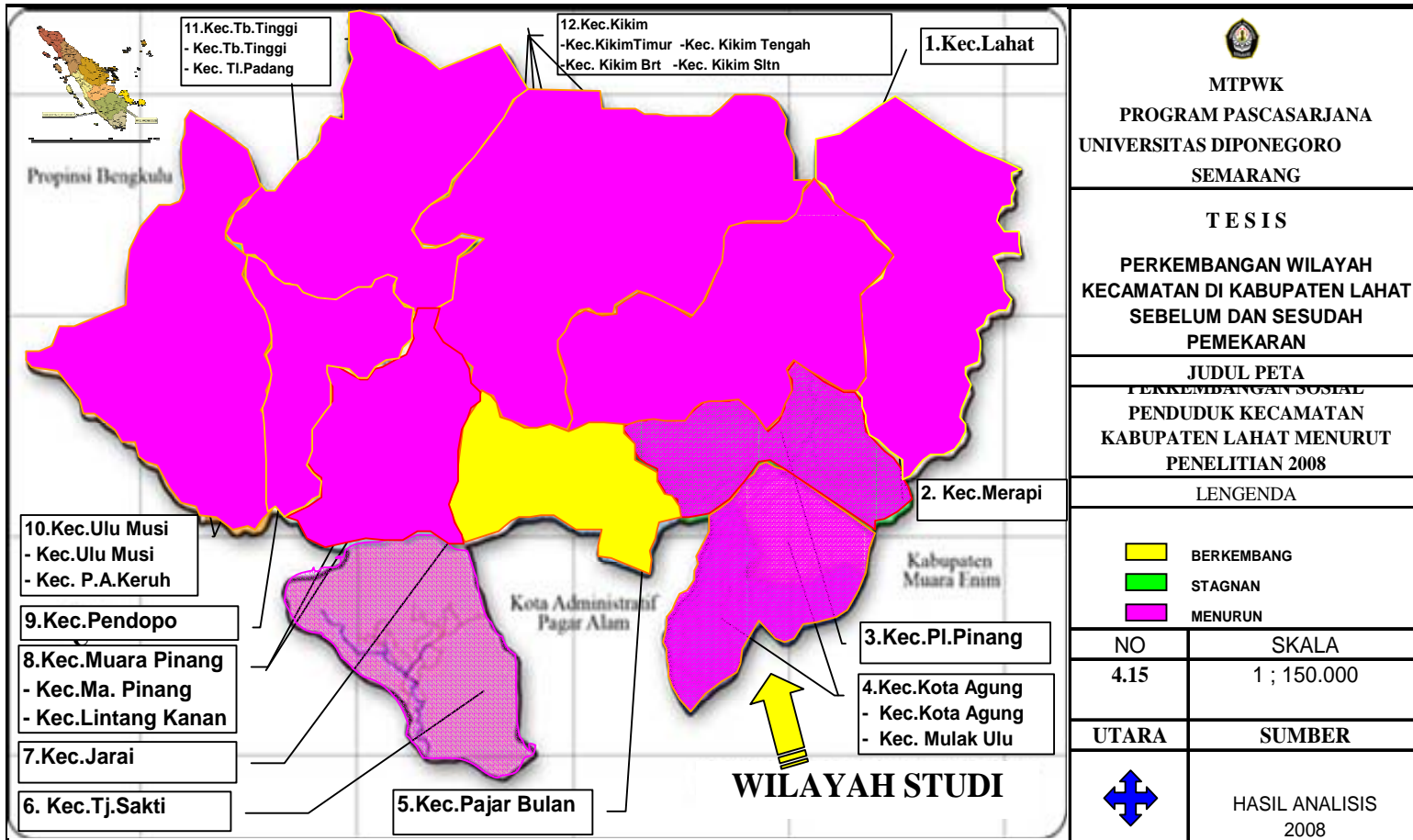
| No. | WILAYAH KECAMATAN | KRITERIA PERKEMBANGAN | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|---|---|--|
| | | | 1993 - 1996 | 2001 - 2004 | |
| 5 | Kecamatan Muara Pinang Kecamatan Lintang Kanan | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 52.231 – 49.768 9.738 – 9.810 1.224 – 1.527 1 : 24.884 1 : 3.111 10,53% – 10,53% | 53.340 – 50.273 9.897 – 11.004 1.437 – 2.724 1 : 25.146 1 : 3.591 9,51% – 13,69% | Meningkat 505 org (1,01%) Meningkat 1.194 KK (12,17%) Meningkat 1.197 org (78,39%) Menurun 1,05% Menurun 15,43% Meningkat 3,16% |
| 6 | Kecamatan Pendopo | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 43.118 – 43.862 7.647 – 8.748 974 – 1.494 1 : 21.931 1 : 3.133 13,33% - 6,67% | 46.105 – 46.555 8.805 – 9.080 2.301 – 2.297 1 : 46.555 1 : 5.173 6,32% - 9,78% | Meningkat 2693 org (6,14%) Meningkat 332 KK (3,8%) Meningkat 803 org (53,75%) Menurun 47,11% Menurun 65,11% Meningkat 3,11% |
| 7 | Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Psmh. Air Keruh | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 51.574 – 50.925 11.037 – 12.173 1.307 – 1.515 1 : 25.462 1 : 2.829 30% - 32,5% | 51.613 – 52.588 12.462 – 14.129 1.474 – 2.037 1 : 52.588 1 : 5.843 9,19% - 17,95% | Meningkat 1663 org (3,26%) Meningkat 1956 KK (16,07%) Meningkat 522 org Menurun 48,42% Menurun 48,42% Menurun 14,55% |
| 8 | Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Talang Padang | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 56.036 – 56.604 11.449 – 11.504 2.072 – 2.330 1 : 14.151 1 : 2.830 23,81% - 23,81% | 61.900 – 56.046 12.207 – 12.637 3.100 – 3.173 1 : 18.682 1 : 2.802 21,05% - 22,86% | Menurun 558 org (0,99%) Meningkat 1.133 KK (9,85%) Meningkat 843 org (36,18%) Menurun 32,02% Meningkat 0,99% Menurun 0,95% |






Lanjut ke Halaman 105

Lanjutan Tabel.IV.7. Halaman 104

| No. | WILAYAH KECAMATAN | KRITERIA PERKEMBANGAN | SEBELUM PEMEKARAN | SETELAH PEMEKARAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|--|---|
| | | | 1993 - 1996 | 2001 - 2004 | |
| 9 | Kecamatan Kikim Barat Kecamatan Kikim Timur Kecamatan Kikim Tengah Kecamatan Kikim Selatan | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 58.944 – 55.237 11.625 – 12.600 1.438 – 1.823 1 : 11.047 1 : 1.063 44,12% – 30,88% | 47.816 – 59.171 10.876 – 14.213 2.129 – 2.220 1 : 29.585 1 : 3.115 33,84% -30,46% | Meningkat 3.934 org 7,12% Meningkat 1.613 org 12,80%. Meningkat 397 org 21,78% Menurun 67,81% Menurun 93,04% Menurun 0,42% |
| 10 | Kecamatan Lahat | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 88.041 – 91.021 20.807 – 21.169 6.082 – 6.544 1 : 4.335 1 : 492 29,63% -24,07% | 104.198-103.497 25.457 – 23.155 6.836 – 6.785 1 : 10.350 1 : 1.125 32,5% - 24,09% | Meningkat 12.476 org 13,71% Meningkat 1.986 KK 9,38% Meningkat 241 org 3,68% Menurun 138,75% Menurun 128,66% Meningkat 0,02% |
| 11 | Kecamatan Merapi | 1.Distribusi Penduduk 2.Jml. KK 3.Kondisi Pendidikan 4.Kesehatan: - Rasio Dokter - Rasio Tng.Keseht 5.Jml.Kel.Prasejahtera | 39.520 – 40.589 8.365 – 8.510 1.024 – 1.478 1 : 13.530 1 : 2.388 13,51 – 10,81 | 41.418 – 41.627 9.461 – 9.532 2.174 – 2.103 1 : 20.814 1 : 3.469 15,23% - 27,46% | Meningkat 1.041 org 2,56% Meningkat 1.022 KK 12,01% Meningkat 625 org 42,29% Menurun 53,84% Menurun 45,27% Meningkat 16,65% |

Sumber: Hasil Analisis, 2008



| | |
|--|--------------------------------------|
|  MTPWK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | |
| TESIS PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN | |
| JUDUL PETA PERKEMBANGAN SOSIAL PENDUDUK KECAMATAN KABUPATEN LAHAT MENURUT PENELITIAN 2008 | |
| LENGENDA | |
|  | BERKEMBANG |
|  | STAGNAN |
|  | MENURUN |
| NO | SKALA |
| 4.15 | 1 ; 150.000 |
| UTARA | SUMBER |
|  | HASIL ANALISIS 2008 |

4.3 Analisis Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas atau struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah mencerminkan perkembangan suatu wilayah, terutama dalam hal sebagai fungsi layanan bagi masyarakat. Dengan demikian, infrastruktur merupakan salah aspek yang sangat mempengaruhi bagi perkembangan wilayah dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan aspek sosial dalam peningkatan layanan bagi masyarakat.

4.3.1 Transportasi

Sebagai fungsinya berfungsi untuk memindahkan manusia dan barang, transportasi juga berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsi antara kegiatan sosial-ekonomi di Kabupaten Lahat. Dalam kaitannya dengan perkembangan transportasi di wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat, hasil pengamatan menunjukkan semakin meningkatnya perkembangan transportasi secara kuantitas. Hal ini juga didukung oleh adanya pembangunan serta akumulasi pembangunan setiap tahun, baik berupa pembangunan baru, program peningkatan maupun pemeliharaan, yang pada akhirnya berdampak pada berupa jalan raya dan jalan kereta api, maupun jalan lingkungan pemukiman. Kabupaten Lahat pada tahun 2004 memiliki 1.076,7 Km jalan raya, dimana 48,27% sudah diaspal, 46,15% dalam keadaan baik dan jembatan dengan total panjang 2.140,7 m. Adapun jalan tanah sudah tidak terdapat lagi. Untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dirasakan masih kurang. Hal ini merupakan pengaruh alam dan keterbatasan program

pemeliharaan. Gambar 4.15 berikut ini mencerminkan program peningkatan jalan yang tidak diimbangi dengan program pemeliharaan.

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Kondisi infrastruktur kondisi baik, kurang dimanfaatkan dan memerlukan peliharaan di Kecamatan Lahat</p> | <p>Kondisi infrastruktur baik, tapi kurangnya program pemeliharaan rutin, Kecamatan Pulau Pinang dan Kec. Lahat</p> |
|  |  |

GAMBAR.4.16
KONDISI PERKEMBANGAN TRANSPORTASI
KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT

4.3.2 Fasilitas Sosial

Infrastruktur suatu wilayah yang merupakan fasilitas layanan publik meliputi prasarana jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan utilitas, serta penerangan dan komunikasi. Perkembangan infrastruktur di suatu wilayah bertujuan untuk memberikan layanan bagi publik dalam beraktivitas. Analisis infrastruktur bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan publik, yaitu dengan menilai ketersediaan infrastruktur yang berada di wilayah kinerja kecamatan. Infrastruktur wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sekarang ini dirasakan

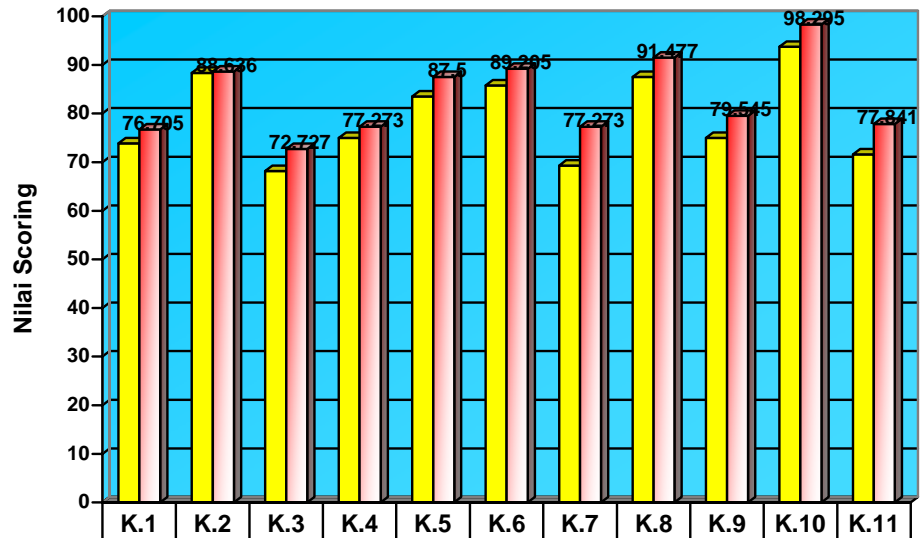
sangat berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari adanya kenaikan anggaran pemerintah sebagai akibat adanya biaya berupa dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta biaya tidak tersangka. Akibatnya terjadinya kenaikan alokasi pembangunan sampai ke kecamatan dan terakumulasi dalam bentuk pembangunan baru serta pemeliharaan rutin pada setiap tahunnya.

Dengan naiknya sarana dan prasarana wilayah maka secara langsung naik pula pelayanan yang tersedia di wilayah kecamatan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Untuk mengukur tingkat pelayanan yang ada di kecamatan maka diadakan analisis *scoring*, yang dilakukan terhadap variabel penelitian dengan cara menilai kriteria-kriteria yang berkaitan dengan variabel ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah setiap kecamatan. Adapun infrastruktur dimaksudkan meliputi: sarana pendidikan dan kesehatan, sarana ibadah, air bersih, drainase lingkungan, jalan, penerangan dan perhubungan. Hasil analisis diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi infrastruktur sebagai fungsi layanan bagi masyarakat yaitu: baik, kurang dan sedang sesuai dengan jumlah skor yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing kecamatan. Melalui perhitungan *scoring* terhadap variabel infrastruktur wilayah setiap kecamatan yang berfungsi sebagai layanan masyarakat maka didapat hasil perhitungan sebagaimana Tabel IV.8 berikut:

TABEL.IV.8
HASIL SCORING PERKEMBANGAN TINGKAT PELAYANAN
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN.

| NO. | Kecamatan | Kriteria Infrastruktur | | Tingkat Pelayanan Infrastruktur Kecamatan |
|------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|
| | | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran | |
| | | Tahun 1993 – 1996 | Tahun 2001 – 2004 | |
| | | Rata-rata Score | Rata-rata Score | |
| K.1 | Kec.Tj.Sakti | 73.864 | 76.705 | Kurang |
| K.2 | Kec.Kt.Agung | 88.636 | 88.636 | Baik |
| K.3 | Kec.PLPinang | 68.182 | 72.727 | Kurang |
| K.4 | Kec.Jarai | 75.000 | 77.273 | Kurang |
| K.5 | Kec.Muara Pinang | 83.523 | 87.500 | Kurang |
| K.6 | Kec.Pendopo | 85.795 | 89.205 | Baik |
| K.7 | Kec.Ulu Musi | 69.318 | 77.273 | Kurang |
| K.8 | Kec. Tb.Tinggi | 87.500 | 91.477 | Baik |
| K.9 | Kec.Kikim | 75.000 | 79.545 | Sedang |
| K.10 | Kec.Lahat | 93.750 | 98.295 | Baik |
| K.11 | Kec.Merapi | 71.591 | 77.841 | Sedang |

Sumber: Hasil Analisis, 2008



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ Tk. Pelayanan Sb.Pemekaran | 73.86 | 88.36 | 68.18 | 75 | 83.52 | 85.8 | 69.32 | 87.5 | 75 | 93.75 | 71.59 |
| ■ Tk.Pelayanan Pemekaran | 76.71 | 88.64 | 72.73 | 77.27 | 87.5 | 89.21 | 77.27 | 91.48 | 79.55 | 98.3 | 77.84 |

Sumber : Hasil Analisis 2008

GAMBAR.4.17
DIAGRAN PERKEMBANGAN TINGKAT PELAYANAN KECAMATAN
DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

Dari hasil analisis *scoring* Infrastruktur menunjukkan bahwa tingkat pelayanan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat cenderung mengalami peningkatan secara kuantitas. Perkembangan tingkat pelayanan yang baik terjadi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lahat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Pendopo, sedangkan kecamatan yang lambat berkembang adalah Kecamatan Pulau Pinang.



Sumber Hasil Penelitian, 2008

GAMBAR .4.18
PROFIL PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR
DI KECAMATAN LAHAT DAN KEC. PULAU PINANG

4.4 Temuan Penelitian

Hasil analisis perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat yang ditinjau sebelum dan setelah pemekaran dalam kurung waktu 1993 hingga tahun 2004, yang ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial penduduk serta aspek infrastruktur sebagai fungsi layanan bagi masyarakat, terdapat beberapa hal penting yang ditemukan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung dalam mengambil kebijakan dalam program pembangunan, baik secara langsung ataupun sebagai akibat dari program itu sendiri.

4.4.1 Utama

Hasil analisis *scoring* dan didukung oleh data empiris menunjukkan adanya hasil perkembangan sebelum dan setelah pemekaran yang terjadi, antara lain:

1. Hasil analisis aspek ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 8 dari 11 wilayah kecamatan mengalami perkembangan bila dibandingkan dengan sebelum pemekaran. hal ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas wilayah kecamatan. Peningkatan ini terjadi karena adanya penawaran tenaga kerja sebagai akibat pertambahan penduduk dan angkatan kerja.
2. Hasil analisis aspek sosial penduduk menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 11 kecamatan mengalami penurunan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena terbatasnya kemampuan produktivitas dalam mengimbangi permintaan bagi konsumsi keluarga. Hal ini menuntut adanya transformasi lapangan usaha dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Penurunan kesejahteraan

masyarakat ini dilihat dari adanya pergeseran tingkat konsumsi rumah tangga kepada kelompok konsumsi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta didukung oleh data empiris bahwa pada Kecamatan Jarai mengalami perkembangan sosial karena terjadinya transformasi lapangan usaha ke sektor tersier sebesar 9%, terjadinya peningkatan yang pada akhirnya mengakibatkan pendapatan masyarakat.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 11 Kecamatan penelitian, semuanya mengalami peningkatan pelayanan publik yang dicerminkan oleh ketersediaan infrastruktur wilayah kecamatan. hal ini terjadi karena adanya peningkatan alokasi anggaran, serta akumulasi biaya pembangunan infrastruktur di kecamatan yang terjadi setiap tahunnya. Peningkatan ini juga terjadi akibat pemekaran wilayah kabupaten yang terjadi, sehingga mengakibatkan mengecilnya wilayah kinerja, sedangkan terjadinya peningkatan alokasi anggaran memberikan peluang untuk pembangunan infrastruktur.

4.4.2 Implikasi

Perkembangan wilayah yang terjadi sebelum dan setelah pemekaran wilayah tidak terlepas dari adanya hubungan kausal. Hasil analisis terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan adalah:

1. Hasil analisis dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa tiga dari sebelas wilayah kinerja kecamatan kurang berkembang, Hal ini disebabkan dari adanya kelemahan-kelemahan wilayah kecamatan, antara lain belum tersedianya pasar permanen di kecamatan tersebut, sehingga aktivitas perdagangan hasil pertanian kecamatan tersebut. Dan bila dibandingkan

dengan hasil pertanian pada tahun-tahun sebelumnya, terjadinya penurunan hasil pertanian, hal ini terjadi karena telah dicapainya titik *equilibrium* sehingga peningkatan produksi hasil pertanian tidak dapat lagi diharapkan untuk meningkat. Hal ini mendorong untuk dilakukan transformasi lapangan usaha melalui inovasi, industrialisasi dan perdagangan antardaerah.

2. Hasil analisis mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran semakin menurun. Hal ini terkait dengan perkembangan penduduk dengan aspek ekonomi, dimana hasil produktivitas wilayah tidak sebanding dengan permintaan akan bahan produksi. Akibatnya, berlaku hukum ekonomi, seperti naiknya beberapa harga komoditas pada setiap tahunnya, juga akibat kebijakan otonomi daerah yang memacu pendapatan dengan mengefektifkan pajak. Dengan demikian, produsen memasukkan pajak tidak langsung ke dalam harga barang dan jasa yang ditanggung oleh konsumen, yaitu masyarakat.
3. Hasil analisis infrastruktur menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan dalam hal tingkat pelayanan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan parasana wilayah pemukiman. Peningkatan infrastruktur ini terjadi karena dampak otonomi daerah dan pemekaran wilayah sebagai akibat meningkatnya alokasi anggaran yang bersumber dari DAU dan DAK serta berkurangnya luas wilayah kinerja, yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya alokasi bagi setiap kecamatan di Kabupaten Lahat.

TABEL IV.9
KOMPARASI SKORING VARIABEL PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN
SEBELUM DAN SETELAH PEMAKARAN WILAYAH

| NO | Kecamatan | Hasil Skoring Variabel Perkembangan | | | | | | Hasil Analisis |
|----|---|-------------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------|---------------|--|
| | | Sebelum Pemekaran | | | Setelah Pemekaran | | | |
| | | Sosial Penduduk | Ekonomi | Infrastruktur | Sosial Penduduk | Ekonomi | Infrastruktur | |
| 1 | Kec.Tj. Sakti | 74.030 | 87.035 | 73.864 | 44.018 | 66.777 | 76.705 | Menurun pesat untuk sosial dan ekonomi, tingkat pelayanan kurang |
| 2 | Kec.Kota Agung Kec. Mulak Ulu | 74.030 | 87.785 | 88.636 | 73.029 | 77.281 | 88.636 | Berkembang menurun, tingkat pelayanan sedang. |
| 3 | Kec.Pl Pinang | 78.031 | 77.281 | 68.182 | 41.016 | 77.281 | 72.727 | Menurun pesat sosial dan ekonomi statis, kurang |
| 4 | Kecamatan Jarai Kec.Pajar Bulan | 68.027 | 74.281 | 75.000 | 70.028 | 81.032 | 77.273 | Berkembang meningkat, tingkat pelayanan kurang |
| 5 | Kec.Ma Pinang Kec.Lintang Kanan | 71.028 | 75.780 | 83.523 | 64.026 | 72.779 | 87.500 | Menurun sosial dan ekonomi, tingkat pelayanan kurang |
| 6 | Kec. Pendopo | 76.030 | 76.531 | 85.795 | 69.028 | 78.031 | 89.205 | Menurun sosial dan ekonomi meningkat, tingkat Pelayanan baik |
| 7 | Kec.Ulu Musi Kec.P. Air Keruh | 68.027 | 78.782 | 69.318 | 55.022 | 86.285 | 77.273 | Sosial menurun dan ekonomi meningkat, tingkat pelayanan kurang |
| 8 | Kec. Tebing Tinggi Kec.Talang Padang | 75.030 | 73.529 | 87.500 | 60.024 | 84.034 | 91.477 | Sosial menurun, perekonomian meningkat, tingkat pelayanan baik |
| 9 | Kec.Kikim Barat Kec. Kikim Timur Kec.Kikim Tengah Kec. Kikim Selatan | 75.030 | 69.778 | 75.000 | 63.025 | 81.032 | 79.545 | Sosial menurun perekonomian meningkat, tingkat pelayanan sedang |
| 10 | Kec. Lahat | 93.037 | 76.531 | 93.750 | 79.032 | 90.786 | 98.295 | Sosial menurun perekonomian meningkat, tingkat pelayanan baik |
| 11 | Kecamatan Merapi | 77.031 | 60.774 | 71.591 | 56.022 | 87.035 | 77.841 | Sosial menurun dan ekonomi Meningkat, tingkat layanan sedang |

Sumber : Hasil Analisis 2008

Tabel IV.9 menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi di setiap kecamatan sebelum dan setelah pemekaran berbeda dari setiap aspek. Perkembangan aspek sosial penduduk setiap kecamatan cenderung mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya setelah pemekaran wilayah. Hal ini terjadi karena peningkatan produktivitas wilayah relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan akan konsumsi keluarga. Hal ini diketahui dari terjadinya penurunan persentase kelompok konsumsi keluarga yang lebih tinggi, yang bergeser pada kelompok yang lebih rendah. Data ini sesuai dengan hasil dari Suseda Kabupaten Lahat, serta didukung oleh data pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun.

Perkembangan yang terjadi sebelum pemekaran (tahun 1993 hingga 1996), menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang dilihat dari peningkatan produktivitas wilayah secara umum. Adapun setelah pemekaran yang ditinjau pada tahun 2001 hingga 2004, menunjukkan penurunan tingkat kesejahteraan terhadap produktivitas wilayah, serta menurunnya kualitas layanan kesehatan secara absolut.

Ditinjau dari tingkat pelayanannya, terdapat kecenderungan peningkatan tingkat pelayanan. Hal ini terjadi karena akumulasi alokasi anggaran pembangunan setiap tahun yang teralokasi untuk pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin. Perkembangan infrastruktur setelah pemekaran tahun 2001 hingga 2004 cenderung meningkat relatif lebih baik. Deskripsi kondisi perkembangan setiap kecamatan di Kabupaten Lahat yang terjadi sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada Tabel IV.10

TABEL IV.10
KONDISI PERKEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN PEMEKARAN

| No. | Wilayah Kecamatan | Ekonomi Sosial Infrastruktur | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran | Keterangan |
|-----|------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | Tahun 1993-1996 | Tahun 2001-2004 | |
| 1 | Kec.Tj. Sakti | - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian, dan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat pelayanan kurang | Terjadinya kecenderungan menurunnya perekonomian, serta menurunnya kesejahteraan akan tetapi tingkat pelayanan infrastruktur meningkat. | Kondisi kesejahteraan sebelum pemekaran relatif lebih baik. mengindikasikan terjadinya pergeseran tingkat konsumsi keluarga. |
| 2 | Kec.Kota Agung Kec. Mulak Ulu | - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian, dan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat pelayanan baik | Terjadinya peningkatan perekonomian, akan tetapi menurunnya kesejahteraan, dengan tingkat pelayanan yang tetap baik. | Kondisi kesejahteraan setelah pemekaran cenderung menurun, bertambahnya kelompok konsumsi > 500rb. |
| 3 | Kec.Pulau Pinang | - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian, meningkatnya kondisi sosial, tingkat pelayanan Kurang. | Terjadinya peningkatan ekonomi, menurunnya, kesejahteraan dengan kondisi infrastruktur kurang. | Terjadinya peningkatan perkembangan setelah pemekaran, terjadinya kelompok konsumsi >500 rb. |
| 4 | Kecamatan Jarai Kec.Pajar Bulan | - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian dan terjadinya penurunan kesejahteraan, tingkat pelayanan kurang | Terjadinya peningkatan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan, dan kondisi infrastruktur kurang | Terjadinya peningkatan perkembangan setelah pemekaran dan meningkatnya kelompok konsumsi >500 rb. |
| 5 | Kec.Ma Pinang Kec.Lintang Kanan | - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian dengan kesejahteraan stabil, dan kondisi infrastruktur kurang. | Terjadinya penurunan perekonomian, dan penurunan kesejahteraan dengan tingkat pelayanan kurang. | Setelah pemekaran daerah kondisi ekonomi dan sosial semakin menurun, tingkat konsumsi diatas Rp.500 rb hanya 16%. |

Lanjut ke Halaman 119

Lanjutan Tabel IV.10 Halaman 118

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 6 | Kec. Pendopo | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, kondisi pelayanan kurang. | Terjadinya peningkatan ekonomi, dan menurunnya tingkat kesejahteraan dengan tingkat pelayanan baik. | Kondisi perkembangan perekonomian setelah pemekaran dan kesejahteraan menurun, konsumsi di atas >500 rb berjumlah 30,4% |
| 7 | Kec.Ulu Musi Kec.P. Air Keruh | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas - Konsumsi keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, dengan pelayanan kurang. | Terjadinya penurunan perekonomian dan menurunnya kesejahteraan, kondisi pelayanan Kurang | Kondisi perekonomian setelah pemekaran cenderung menurun, bertambahnya kelompok konsumsi >500 rb berjumlah 38,5%. |
| 8 | Kec. Tebing Tinggi Kec.Talang Padang | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya penurunan perekonomian, kesejahteraan stabil, tingkat pelayanan baik. | Terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, kondisi pelayanan yang baik. | Kondisi setelah pemekaran perekonomian meningkat, tingkat kesejahteraan tetap dan tingkat pelayanan baik, 68,5% konsumsi >500rb. |
| 9 | Kec.Kikim Barat Kec. Kikim Timur Kec.Kikim Tengah Kec. Kikim Selatan | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian tingkat kesejahteraan meningkat, tingkat pelayanan sedang. | Terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, dengan tingkat pelayanan sedang. | Kondisi perekonomian dan kesejahteraan setelah pemekaran berkembang, dengan tingkat pelayanan sedang, 75% konsumsi >500rb. |
| 10 | Kec. Lahat | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan meningkat dengan tingkat pelayanan baik. | Terjadinya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan meningkat dengan tingkat pelayanan yang baik. | Kondisi perkembangan setelah pemekaran lebih baik, kesejahteraan stabil tingkat pelayanan baik, 67,2% konsumsi >500rb. |
| 11 | Kecamatan Merapi | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas - Konsumsi Keluarga - Struktur ekonomi - Kesejahteraan - Tingkat Pelayanan | Terjadinya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, dengan tingkat pelayanan sedang. | Terjadinya peningkatan ekonomi dan menurunnya kesejahteraan, dengan tingkat pelayanan sedang. | Kondisi perekonomian setelah pemekaran lebih baik, tingkat pelayanan sedang 87,2% konsumsi >500rb. |

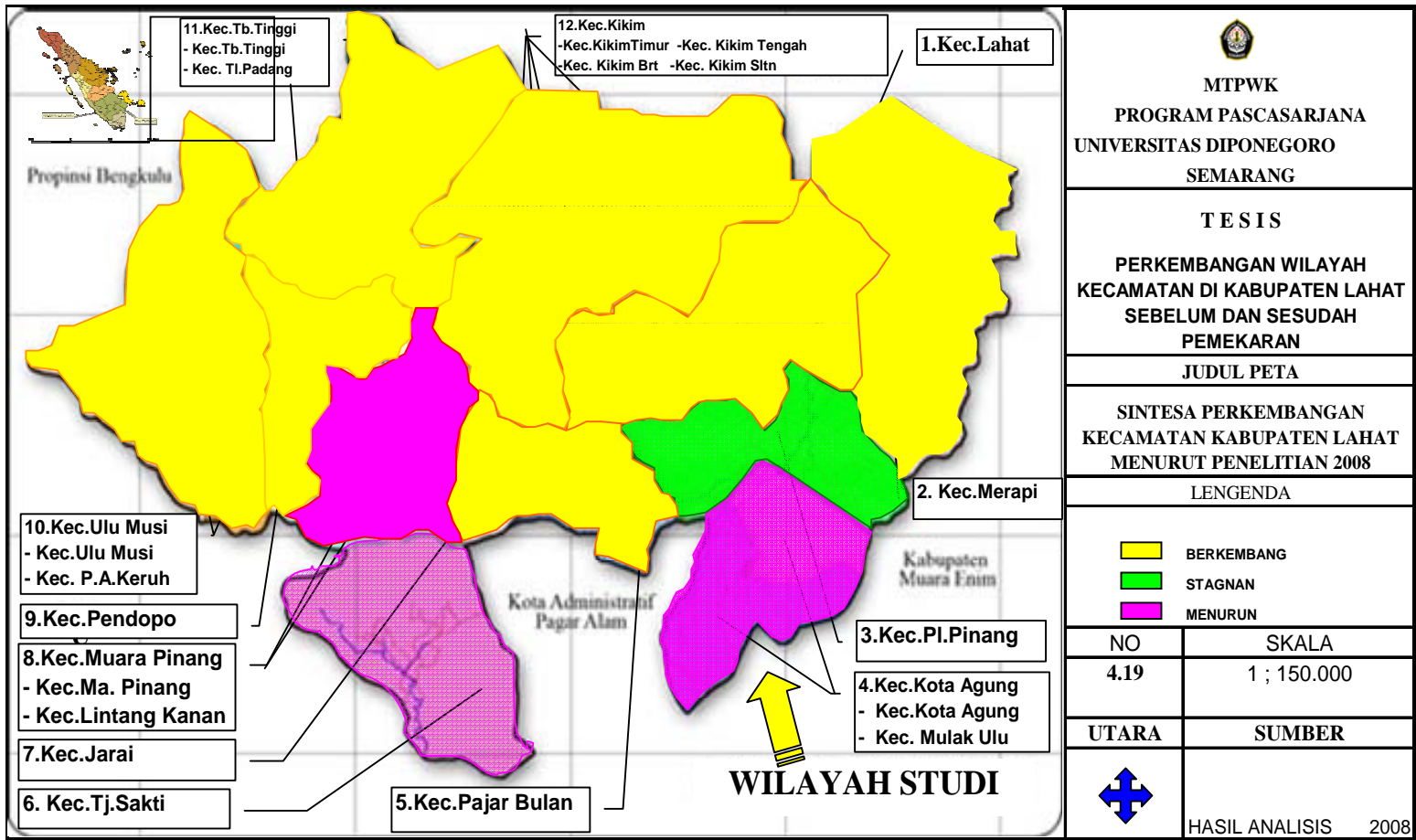
Sumber: Hasil Analisis, 2008



TABEL.IV.11
SINTESA PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI
KABUPATEN LAHAT

| Kecamatan | Aspek Perkembangan | | | Secara Umum |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Ekonomi | Sosial Penduduk | Tingkat Pelayanan Infrastruktur | |
| Kec.Tj. Sakti | Menurun | Menurun | Meningkat | Menurun |
| Kec.Kota Agung Kec. Mulak Ulu | Menurun | Menurun | Stagnan | Stagnan |
| Kec.PI Pinang | Menurun | Stagnan | Meningkat | Menurun |
| Kecamatan Jarai Kec.Pajar Bulan | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Berkembang |
| Kec.Ma Pinang Kec.Lintang Kanan | Menurun | Menurun | Meningkat | Menurun |
| Kec. Pendopo | Meningkat | Menurun | Meningkat | Berkembang |
| Kec.Ulu Musi Kec.P. Air Keruh | Meningkat | Menurun | Meningkat | Menurun |
| Kec. Tebing Tinggi Kec.Talang Padang | Meningkat | Menurun | Meningkat | Menurun |
| Kec.Kikim Barat Kec. Kikim Timur Kec.Kikim Tengah Kec. Kikim Selatan | Meningkat | Menurun | Meningkat | Berkembang |
| Kec. Lahat | Meningkat | Menurun | Meningkat | Berkembang |
| Kecamatan Merapi | Meningkat | Menurun | Meningkat | Berkembang |

Sumber: Hasil analisis 2008

Tabel IV.11 di atas menggambarkan hasil analisis komparasi hasil perkembangan sebelum dan setelah pemekaran wilayah, yang ditinjau dari ketiga aspek perkembangan. Hasil perkembangan secara umum didapat dari perhitungan dengan alat bantu program excel, sehingga ditemukan adanya garis kecenderungan (*trendline*) yang terfokus pada kondisi tahun 1993. Kecendrungan disini ditinjau dari dua titik fokus yang berbeda yaitu 1993 dan 2001, sehingga dapat diadakan perbandingan hasil perkembangan, antara sebelum dan setelah pemekaran. Tabel IV.11 dibawah ini menunjukkan kondisi perkembangan sebelum dan setelah pemekaran wilayah.



| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|---|---------|---|---------|
|  MTPWK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | | | | | | | |
| TESIS PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN | | | | | | | |
| JUDUL PETA SINTESA PERKEMBANGAN KECAMATAN KABUPATEN LAHAT MENURUT PENELITIAN 2008 | | | | | | | |
| LENGENDA | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>BERKEMBANG</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>STAGNAN</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>MENURUN</td> </tr> </table> | | ■ | BERKEMBANG | ■ | STAGNAN | ■ | MENURUN |
| ■ | BERKEMBANG | | | | | | |
| ■ | STAGNAN | | | | | | |
| ■ | MENURUN | | | | | | |
| NO | SKALA | | | | | | |
| 4.19 | 1 ; 150.000 | | | | | | |
| UTARA | SUMBER | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| HASIL ANALISIS 2008 | | | | | | | |

B A B V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap kondisi perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa setelah pemekaran wilayah kesejahteraan penduduk secara absolut justru semakin menurun. Hal ini terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang menekankan pada pajak, sehingga mendorong naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan berakibat inflasi. Untuk wilayah kecamatan yang berbasis pertanian cenderung terjadi penurunan secara ekonomi akibat lamanya siklus panen pertama dan panen berikutnya pada setiap tahunnya. Lain halnya pada kecamatan yang berbasis perdagangan (sektor tersier), dimana aktivitas ekonomi terjadi pada setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian aspek ekonomi, terdapat tiga kecamatan yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada kecamatan yang belum memiliki fasilitas perdagangan berupa bangunan pasar permanen, pertumbuhan ekonominya cenderung lambat akibat kurangnya transaksi perdagangan hasil produksi wilayahnya. Terkait dengan aspek ekonomi dan aspek sosial penduduk, dapat diketahui bahwa hubungan kausal antara produktivitas wilayah dan konsumsi rumah tangga, jumlah produksi wilayah yang meningkat tidak seimbang dengan nilai konsumsi masyarakat setiap kecamatan, sehingga terjadinya penurunan kesejahteraan.

Hasil analisis aspek infrastruktur dan ekonomi menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik akan mempengaruhi perkembangan tingkat pelayanan dan perkembangan ekonomi wilayah kecamatan. Hal ini dilihat pada kecamatan yang tidak memiliki fasilitas perdagangan, seperti bangunan pasar permanen akan cenderung mengalami kelambatan perkembangan ekonomi. Perekonomian wilayah yang menurun akan mempengaruhi perkembangan sosial penduduk.

Perkembangan wilayah hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Aspek ekonomi menunjukkan jumlah kecamatan yang berkembang sebanyak 8 dari 11 wilayah kecamatan penelitian.
2. Aspek sosial penduduk menunjukkan kecamatan yang berkembang sebanyak 1 dari 11 wilayah kecamatan penelitian
3. Aspek infrastruktur menunjukkan kecamatan yang meningkat pelayanan publiknya sebanyak 11 dari 11 wilayah kecamatan penelitian.
4. Hasil analisis *scoring* dari tiga aspek ekonomi, sosial penduduk dan infrastruktur, dapat diketahui bahwa terdapat empat dari 11 kecamatan berkembang meningkat yang terdiri dari Kecamatan Lahat, Kecamatan Jarai, Kecamatan Merapi dan Kecamatan Kikim, sedangkan kecamatan yang lain cenderung berkembang menurun secara umum.

5.2 Rekomendasi

Pemekaran wilayah kabupaten secara langsung mengakibatkan peningkatan alokasi anggaran pembangunan, sedangkan pemekaran wilayah kecamatan akan mendekatkan rentang kendali dan meningkatkan intensitas fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan hasil penelitian terhadap perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat maka direkomendasikan:

A. Rekomendasi Jangka Pendek.

1. Memprioritaskan alokasi anggaran pada program pengembangan kecamatan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan sentra produksi, jaringan irigasi teknis, pada beberapa kecamatan yang memiliki potensi dan belum dikembangkan secara optimal.
2. Mengembangkan pusat aktivitas ekonomi kecamatan dari pasar tidak tetap menjadi pasar permanen, sehingga terjadinya transaksi perdagangan komoditas wilayah kecamatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong terjadinya transformasi lapangan usaha.
3. Mengembangkan teknologi tepat guna serta inovasi guna meningkatkan nilai ekonomi bagi produk komoditas wilayah kecamatan.
4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian bagi aparatur yang berada di setiap kecamatan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam.
5. Mengembangkan sarana pendidikan dan kesehatan untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, dimana masih perlu penambahan Lokal Sekolah khususnya untuk jenjang SLTA, yaitu dua sampai tiga lokal, yaitu untuk Kecamatan Tj.Sakti, Kota Agung, Pulau Pinang, Jarai dan Ulu Musi.

B. Rekomendasi Jangka Panjang

1. Membangun kemitraan antara investor pada bidang perkebunan yang menanamkan modal di wilayah kecamatan dengan melibatkan masyarakat,

seperti PIR. Dengan demikian, terjadi sinergi yang dapat meningkatkan penghasilan investor dan masyarakat.

2. Mengembangkan UKM dan Koperasi yang ada di kecamatan untuk mendorong pemupukan modal usaha masyarakat yang ada di kecamatan.
3. Membangun instalasi air bersih untuk kesehatan, dengan membangun Drainase Lingkungan Pemukiman yang terintegrasi, sehingga dapat mencegah pencemaran air tanah yang sekarang masih dikonsumsi masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat.
4. Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di setiap kecamatan serta mengembangkan perhotelan yang dapat mendukung perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Lahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Benyamin. 2005. *Regional Management & Regional Marketing*, Semarang: Penerbit Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Amzulian. 2007." *Pembentukan Kabupaten Empat Lawang.*" Kompas, tahun 2007, 12 Mei, halaman 4.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Blair, John P. 1991. *Urban and Regional Economics*. Homewood. IL: Irwin.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Dirjen Perkim, 2002, Konsep Panduan Perhitungan Scoring dan Penilaian Ranking Prioritas.
- Djoyohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teory Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Hill and Williams(1989), *The Economi and Social Dimensions of Regional Development in Indonesia*. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 37(2) :190-218.
- Jhingan, M.L. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Perencanaan*. Terjemahan, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Kabupaten Lahat Dalam Angka, 1994
- Kabupaten Lahat Dalam Angka, 1996
- Kabupaten Lahat Dalam Angka, 2000
- Kabupaten Lahat Dalam Angka, 2003
- Kabupaten Lahat Dalam Angka, 2004
- Kerlinger, 1996. *Asas-asas Penelitian Behaviour*. Jakarta: UGM Press.
- Kodoatie, Robertj, 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- LAKIP Kabupaten Lahat 2005

Natzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Oey, M dan P, Gardian, 1990. *Lepas Landas Ekonomi dan Kesenjangan Regional*. Prisma 3: 3-13.

Piliang, Indra dan Dandi Ramdani. 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.

Profil Desa-Desa Kabupaten Lahat Tahun 2005

RENSTRA Kabupaten Lahat

Riduwan, 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung*, Penerbit; Alfabeta

Riyadi, Dodi Slamet, 2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.

Richardson, HW, 1978, *Regional and Urban Economics*, Middlese.

RTRW Kabupaten Lahat

Rustam Uton dan Canon Sarwani. 2006." *Analisa Lqshif Lqshare untuk Mengukur Dampak Perluasan Kota Terhadap Kinerja Ekonomi Regional.*" *Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 17/ No. 21 hlm.21-40.

Said, Adri & N.Ika Wijaya. 2007. *Akses Keuangan UMKM*, Jakarta: GTZ-RED

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sugiyono, 2005. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supriyady, Deddy Bratakusuma & Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pusta Utama 2003.

Supriyanto. 2006, " *Pemekaran Daerah Berdampak pada Penurunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.*" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

SUSEDA Kabupaten Lahat, 2003 s/d 2005

Syamsudin, Ahmad & Marzuki. 2007. *Iklm Investasi Daerah*, Jakarta: GTZ-RED

Tarigan, Robinson, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 tentang
Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Wijaya. 2006,“ *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.*“
Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



ALKODRA HUZAIN dilahirkan di Baturaja, sebuah kampung kecil yang sekarang telah menjadi kota penghasil semen di Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 April 1966, sebagai putra ketiga dari delapan bersaudara pasangan dari ayah H.Hupi dan ibu Zainab(alm). Kini beralamat di Perumahan Tiara, Jl.SMK Tiara Blok A.1.No.3 Bandar Agung, Lahat, Sumsel, 31414, telepon (0731)327067.

Pendidikan dimulai SD Negeri 7 Baturaja, lulus tahun 1980, kemudian melanjutkan SMP Negeri 2 Baturaja, lulus tahun 1983, dan melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Baturaja jurusan IPA, lulus tahun 1986 dengan peringkat I. Pada tahun yang sama melanjutkan di Universitas Sriwijaya Palembang jurusan Teknik Sipil hingga meraih gelar Insinyur tahun 1992. Sempat bekerja di perusahaan di Jambi, hingga diterima PNS Sumsel, ditempatkan pada Pemda Lahat Maret tahun 1993 sebagai staf Bina Marga Dinas P.U kabupaten. Pada tahun 1997 penulis melanjutkan STIE Serelo Lahat Jurusan Manajemen, lulus tahun 2002 meraih gelar Sarjana Ekonomi. Penulis pernah menjabat pada Jenjang jabatan struktural tahun 1995 s/d 2001 Kasubsi Jembatan, 2001 s/d 2002 Kasi Pembangunan dan Pengantian Jembatan, dari 2002 s/d 2006 Kasi Tata Ruang Dinas PU. Kabupaten Lahat. Di samping itu juga pernah menduduki jabatan fungsional; Ketua Panitia Tender Proyek APBD T.A 1996 hingga 1999 dan Proyek IBRD T.A 2000, Ketua Badan Pemeriksa Bangunan T.A 1996 hingga 1998, Pimpro Bencana Alam T.A 2000 dan 2001, Pimpro Perumahan dan Pemukiman 2003, dan Pelaksana Kegiatan Proyek Kesehatan Lingkungan Pemukiman T.A 2005 dan T.A 2006. Pada bulan Juli tahun 2006 melalui program beasiswa PUSDIKTEK, penulis mendapatkan kesempatan mengikuti tugas belajar pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Pernikahan dengan seorang putri Kikim Kabupaten Lahat pada tahun 1999, bernama Susiyanti Ratna Dewi. SE, saat ini telah dikaruniai oleh Allah SWT dua orang putra yang diberi nama M.Almatin Jahfal, dilahirkan pada 03 Maret 2000 dan Najmi Mumtaz, yang lahirkan 17 Maret 2004. Penulis aktif mengikuti ikatan keluarga dan pengajian Alhidayah di lingkungan tempat tinggal.

Semarang, Juni 2008.